

MEMOTRET POLITIK INDONESIA

Antara Harapan dan Kenyataan

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perubahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

MEMOTRET POLITIK INDONESIA

Antara Harapan dan Kenyataan

Dr. Ujang Komarudin, M.Si

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

*Untuk Seluruh Sivitas Akademika
Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta
Buku Ini Hadir.*

MEMOTRET POLITIK INDONESIA

Antara Harapan dan Kenyataan

Copyrights @2018 oleh Dr. Ujang Komarudin, M.Si

Editor: M.R. Muchlis

Desain Sampul: M.R. Muchlis

x + 170 hlm; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-52507-4-3

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

Eightyeight@Kasablanka Lantai 35

Jalan Casablanka Raya Kav.88, Jakarta 12870

Telepon 021.80640526

Email: info@enlights.co

www.enlights.co

Indonesia Political Review (IPR)

De Salim Town House

Jalan H. Salim No.132 Cimanggis, Depok, Jawa Barat

Email: ipoliticalreview@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Daftar Isi	vii
Sambutan Penulis	x

BAB 1 PILKADA RASA PILPRES DAN DINAMIKA PEMILU

1. Halal Bihalal	2
2. Pilkada Rasa Pilpres	7
3. Mencari Cawapres Ideal	14
4. Menanti Cawapres Jokowi	19
5. Rame-rame Jadi Caleg	24
6. Jokowi versus Prabowo	29

BAB 2 PILPRES DAN PERSOALAN PEMILU DI INDONESIA

7. Siapa Cawapres Prabowo?	36
8. Menebak Isi Kantong Jokowi dan Prabowo	41
9. Merdeka atau Mati	46
10. Ulama Juga Manusia	51
11. Berkorban untuk Bangsa dan Negara	56
12. Untung-Rugi #2019GantiPresiden	61

BAB 3 DUKUNG-MENDUKUNG DALAM PEMILU

13. Gubernur Dukung Jokowi	68
14. Politik Dua Kaki Demokrat	74
15. Taktik Demokrat Bermain Dua Kaki	79
16. KPU Kena Palu	85
17. Berebut Dukungan Ulama	90
18. Kampanye Tanpa Hoaks dan SARA	95

BAB 4 DINAMIKA DEMOKRASI DALAM PILPRES

19. Demokrasi Up and Down	102
20. Membidik Amien Rais	108
21. Magnet Politik Pesantren	113
22. Menggagas Indonesia Hebat	118
23. Refleksi Hari Santri Nasional	124
24. Politikus Sontoloyo	129

BAB 5 KAMPANYE PENUH KEBENCIAN

25. Nyinyiran Politik	136
26. Masih Adakah Pileg untuk Kita?	141
27. Buta dan Budek dalam Politik	146
28. Menggagas Kampanye Substantif	151
29. Planning for Campaigns of Substance	156

BAB 5 PENUTUP

30. Penutup	162
Daftar Pustaka	164
Tentang Penulis	168

Sambutan Penulis

Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Baik dan Hebat. Atas ijin-Nya lah buku ini bisa terbit. Tak ada daya dan upaya kecuali atas ijin dan kekuatan dari-Nya.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Atas perjuangan dan risalahnyalah kita bisa menikmati iman, Islam, dan kehidupan yang gemerlap dan penuh nikmat ini.

Tak terasa, buku ini merupakan buku saya yang ke-14. Karya kecil ini mudah-mudahan menjadi karya besar pada suatu saat nanti. Tak ada karya besar yang tak dimulai dari karya kecil. Karya besar selalu dimulai dari karya kecil yang dilakukan terus menerus secara konsisten.

Buku referensi ini merupakan hasil dari refleksi dan perenungan saya tentang persoalan-persoalan politik di Republik ini. Buku referensi ini ditulis secara ringan, *simple*, renyah, dan ilmiah. Juga dibahas secara tetap tajam, objektif, dan menebarkan virus optimisme dan kebaikan.

Semoga buku referensi karya saya yang ke-14 ini, dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Buku ini jauh dari kesempurnaan. Tak ada gading yang tak retak. Begitu juga dengan isi buku ini. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik dari pembaca sangat saya harapkan.

Semoga buku ini juga menjadi amal jari'ah bagi saya yang pahalanya akan terus mengalir hingga akhirat kelak. Aamiin.

Jakarta, 02 November 2018

Ujang Komarudin

BAB 1

PILKADA RASA PILPRES DAN DINAMIKA PEMILU

Halal Bihalal

HARI raya Idul Fitri 1439 H sudah selesai dilaksanakan. Hari kemenangan tersebut telah membawa arus pergerakan orang dan barang dari Jakarta ke seluruh pelosok tanah air. Mudik pun telah berakhir. Begitu juga dengan arus balik yang telah usai kemarin. Hari ini adalah hari masuk kerja bagi para pekerja Ibu Kota dan sekitarnya. Dan diawal masuk kerja pasca lebaran biasanya diisi dengan absensi dan halal bihalal.

Menurut M. Quraish Shihab (2007), kata ‘halal’ diambil dari kata ‘halla’ atau ‘halala’ yang artinya menyelesaikan masalah atau kesulitan atau meluruskan benang kusut atau mencairkan yang membeku atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Berdasarkan makna harfiah tersebut, halal bihalal dimaknai sebagai bentuk menyambungkan kembali apa-apa yang putus.

Di hari pertama kerja kantor, seperti biasa instansi-instansi pemerintah maupun swasta tidak luput mengadakan halal bihalal untuk bersalam-salaman saling memaafkan satu sama lain. Tradisi halal bihalal merupakan tradisi orisinil khas bangsa Indonesia. Setelah sebelas bulan bekerja bersama dan

sebulan melakukan ibadah puasa, maka halal bihalal merupakan penyempurna ibadah dan silaturrahmi.

Sejatinya halal bihalal harus menjadi tradisi yang bukan hanya terjadi setahun sekali pasca Idul Fitri. Namun budaya baik halal bihalal harus terjaga dan terjalin setiap hari, kapanpun, di manapun, dan sampai kapanpun. Halal bihalal dapat menjaga silaturrahmi dan menjadikan kita sebagai makhluk sosial yang utuh dan bersih. Jauh dari saling curiga dan pecah belah. Dengan halal bihalal akan mempersatukan yang berbeda dan akan merukunkan yang berseteru.

Halal bihalal harus dimaknai dengan hati yang bersih dan suci. Dengan halal bihalal kita juga dapat memperbaiki hubungan yang kusut dan renggang. Dapat mempersatukan yang putus dan berkonflik. Dapat mempererat persaudaraan. Dapat menjaga kesatuan dan persatuan. Dan dapat menikmati indahnya kebersamaan dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Namun harus diingat. Halal bihalal jangan hanya dijadikan seremonial kantor-kantor pemerintah dan swasta semata. Jangan sampai halal bihalal dilakukan. Tapi gontok-gontokkan tetap dilestarikan, dibudayakan, dan ditumbuhkan. Jangan sampai pasca halal bihalal pergujingan (ghibah) dimulai, konflik dikembangkan, dan perebutan jabatan dan kekuasaan dilakukan dengan cara-cara kotor dan kejam.

Jangan juga halal bihalal dilakukan. Namun budaya menjilat, tradisi upeti (setor-menyetor) antara bawahan ke atasan masih terjadi, pat gulipat terlembagakan, budaya saling injak tak terelakkan, saling jegal dan saling sikut masih mewarnai budaya kerja di kantor-kantor tempat kita bekerja. Halal bihalal dilaksanakan, namun esensi dan makna halal bihalal ditinggalkan.

Halal bihalal dibudayakan, namun permainan kotor dan curang juga dilembagakan.

Halal bihalal harusnya menjadikan kita manusia yang penuh kasih, cinta, dan kedamaian. Memaafkan orang lain adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Tak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, tradisi saling memaafkan dalam halal bihalal menjadi suatu keniscayaan. Keniscayaan karena kita perlu memaafkan dan dimaafkan.

Di hari kerja pertama pasca Lebaran ini pula. Kita harus bersyukur dapat beraktivitas seperti biasa. Kerja. Kerja. Kerja merupakan idealisme pemerintahan Jokowi-JK untuk menanamkan jiwa semangat kerja dengan total. Kerja. Kerja. Kerja juga jangan hanya menjadi slogan yang tanpa makna dan arti. Kerja. Kerja. Kerja harus dapat termanifestasikan dan terimplementasikan dalam budaya kerja sehari-hari rakyat Indonesia. Kerja. Kerja. Kerja jangan sampai hanya menjadi omong kosong yang tak berarti dan berguna.

Kerja. Kerja. Kerja juga jangan hanya dimaknai bekerja hanya sekedar bekerja. Bekerja tidak dengan hati, jiwa dan raga. Bekerja hanya ingin dilihat dan dipuji orang lain. Bekerja tidak profesional. Bekerja asal-asalan. Bekerja tanpa kecerdasan. Bekerja tanpa visi dan misi. Bekerja tanpa perencanaan yang matang. Dan bekerja tanpa semangat dalam membangun bangsa dan negara.

Buya Hamka pernah menulis, “Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja”. Oleh karena itu, kerja, kerja, dan kerja bukan hanya sekedar bekerja. Kerja harus penuh semangat dan disertai

dengan rasa penuh tanggung jawab atas tugas dan dalam rangka untuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Sehingga apapun yang kita lakukan, akan dilakukan dengan yang terbaik. Kerja, kerja kerja yang terbaik. Berkarya, berkarya dengan terbaik. Dan berbuat, berbuat yang terbaik.

Ramadan, Idul Fitri, dan halal bihalal harus menjadi momentum menumbuhkan semangat kerja dan memupuk kesholehkan sosial. Tak akan ada gunanya jika puasa Ramadan kita lakukan dengan sempurna, zakat kita tunaikan, Idul Fitri kita laksanakan, halal bihalal kita lakukan, namun dalam diri kita masih tersimpan dendam dan kebencian kepada sesama anak bangsa.

Momentum hari pertama kerja dan momentum halal bihalal adalah momentum perbaikan kita sebagai umat manusia. Perbaiki hubungan dengan sesama, perbaiki sholat, perbaiki kinerja, perbaiki hidup, perbaiki citra diri, perbaiki cara berpakaian, perbaiki bisnis, perbaiki masa depan. Memperbaiki diri untuk esok dan masa depan tidaklah rugi. Yang rugi adalah orang yang tidak mau berubah dan memperbaiki diri. Dan perbaiki hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.

Halal bihalal merupakan tahap awal kita dalam membangun silaturahmi dan relasi dengan sesama manusia. Indah jika hidup ini saling memaafkan. Indah hidup ini jika kita saling bekerja sama. Indah hidup ini jika kita dapat membangun kebersamaan. Indah hidup jika saling mencintai dan mengasihi. Dan halal bihalal menjadi titik awal untuk kita saling berbagi senyuman dan kebahagiaan. Dan kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat (Nursyam, 2015: 496).

Semangat kerja di hari pertama pasca Lebaran merupakan berkah tersendiri. Karena bagaimanapun kerja adalah ibadah. Jangan nodai dengan cara membolos kerja atau bermalasmalasan. Karena apapun yang kita kerjakan dan lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan akhirat kelak.

Dengan *halal bihalal* kita diajarkan untuk saling memaafkan, menjaga, mengasihi, mencintai, menyayangi, berbagi, saling mendoakan, menghargai, mendukung, menasehati, mendekatkan, membanggakan, membesarkan, mangayomi, membahagiakan, berbagi kebaikan, mengikhlaskan, bertegur sapa, memberdayakan dan menggerakkan, dan juga saling melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pilkada Rasa Pilpres

PILKADA serentak tahun 2018 putaran ketiga baru saja usai. Pesta demokrasi yang terjadi di 171 daerah memang sangat menarik untuk diamati. Selain karena terjadi di tahun politik. Hasil Pilkada tahun ini juga menjadi bekal dan penentu pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2019 nanti, maka tidak mengherankan jika banyak analis politik menyebut Pilkada tahun 2018 merupakan “Pilkada dengan rasa Pilpres”.

Tidak berlebihan memang jika pada Pilkada kali ini menjadi salah satu penentu kemenangan pada Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang. Partai-partai politik mengusung dan mendukung kader dan non-kadernya untuk menjadi calon kepala daerah di 171 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemenangan dan kekalahan di Pilkada 2018 juga akan menentukan kemenangan dan kekalahan di Pilpres 2019.

Kemenangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai politik tertentu akan berimbas baik dan positif untuk partai-partai tersebut. Paling tidak partai-partai tersebut akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, seperti pendanaan,

power, jaringan untuk menjadi modal bagi pertarungan di Pileg dan Pilpres 2019. Partai yang menang dalam mengusung calon kepala daerahnya akan happy untuk menatap pertarungan yang sesungguhnya di pesta demokrasi terbesar tahun depan.

Para kepala daerah memang sangat diandalkan oleh partai-partai politik untuk mem-back-up partai-partai dalam setiap pertarungan politik. Paling tidak partai yang mendukung dan calonnya menang akan lebih ringan dalam menghadapi setiap persaingan politik dalam Pileg maupun Pilpres. Karena seperti kita tahu, pesta demokrasi di Indonesia seperti Pilkada, Pileg, dan Pilpres akan banyak menghabiskan banyak uang.

Kenapa Pilkada serentak tahun 2018 serasa Pilpres. Karena pada Pilkada kali ini melibatkan pemilih lebih dari 50% suara pemilih nasional. Dan Pilkada tahun ini melibatkan daerah-daerah strategis yang memiliki jumlah pemilih gemuk dan menjadi lumbung suara bagi partai-partai politik untuk bekal di Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang.

Pulau Jawa menjadi arena pertarungan yang keras bagi calon kepala daerah, partai-partai politik, dan juga para capres dan cawapres. Karena memenangkan pertarungan di Jawa dianggap sudah memenangi separuh pertarungan. Dan Jawa Barat menjadi andalan dalam perebutan suara pemilih se-Nusantara. Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Sejarah mencatat partai politik yang menang di Jawa Barat akan menang pula dalam Pemilu nasional (Pileg). Tahun 2004 Partai Golkar menang di Jawa Barat dan menang pula secara nasional. Tahun 2009 giliran Demokrat yang menang di Jawa Barat dan menang pula secara nasional. Dan pada tahun 2014, PDIP menang di Jawa Barat, menang pula secara nasional.

Karena begitu pentingnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maka wajar jika di ketiga wilayah tersebut, partai-partai akan mati-matian berjuang untuk menang sampai darah penghabisan. Menang di Pulau Jawa paling tidak akan memuluskan langkah partai-partai politik dan capresnya untuk menang di Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Namun jangan lupakan luar Jawa. Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi faktor penentu dari luar Jawa. Memenangkan di kedua daerah ini sama pentingnya dengan memenangkan pertarungan di pulau Jawa. Dan harus diingat juga, daerah lain juga penting untuk kemenangan bagi siapapun yang akan menjadi capres dan cawapres.

Pilkada memang bukan Pileg atau Pilpres. Namun dengan Pilkada, kita sudah bisa melihat peta kekuatan dan kelemahan partai-partai, capres dan cawapres dalam pertarungan di 2019 nanti. Menang di Pilkada memang belum tentu menang di Pileg dan Pilpres. Tapi menang di Pilkada akan menjadi penting untuk memuluskan langkah menjadi pemenang dalam Pileg dan Pilpres.

Ada beberapa faktor yang menjadi mengapa Pilkada menjadi serasa Pilpres. Jumlah pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2018 yang terjadi di 171 wilayah lebih dari 50% jumlah pemilih sementara pada Pilpres 2019 nanti. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada tahun ini sekitar 152 juta orang. Sementara Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 (Pileg dan Pilpres) sekitar 186 juta orang. Artinya meraih kemenangan di Pilkada kemarin menjadi penting dan akan menentukan masa depan partai-partai, Capres dan Cawapres.

Tiga Provinsi di Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah akan menjadi penentu kemenangan di Pilpres 2019. Karena seperti yang kita tahu. Jawa Barat menjadi lumbung suara terbesar di Indonesia dengan jumlah pemilih 31 juta orang, disusul dengan Jawa Timur dengan jumlah pemilih sebanyak 30 juta, dan Jawa Tengah dengan jumlah pemilih sekitar 27 juta orang. Wajar jika tokoh-tokoh politik nasional termasuk para Capres dan Cawapres ikut berkampanye langsung di wilayah ini.

Dari ketiga Provinsi di Jawa tersebut yang mengikuti Pilkada 2018 jika ditotalkan jumlah pemilihnya mencapai 88 juta orang, artinya lebih dari 50% DPT pada Pilkada serentak tahun 2018 kali ini. Oleh karena itu, Pilkada serentak 2018 di Jawa menjadi arena pertarungan politik atau the last battle menjelang pertarungan di Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

Namun kemenangan di Jawa saja belum cukup. Harus ditambah dengan dua kemenangan di dua provinsi lain. Yaitu kemenangan di provinsi non-Jawa yang memiliki jumlah suara pemilih terbesar yaitu Sumut, dengan jumlah pemilih sekitar 9 juta orang. Dan provinsi di Indonesia bagian Timur yaitu Sulsel dengan jumlah pemilih sebesar 6 juta orang. Namun jangan lupakan juga provinsi-provinsi lain. Karena provinsi yang memiliki jumlah pemilih sedikit juga akan memberikan andil dalam kemenangan.

Di tiga provinsi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) dan Provinsi non-Jawa, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar dari 171 Pilkada yang diselenggarakan tahun ini. Kelima provinsi tersebut akan menjadi penentu kemenangan di Pilpres yang akan datang. Menang di wilayah-wilayah ini

sudah lebih cukup untuk para petinggi partai yang calon kepala daerahnya menang untuk tidur nyenyak sementara. Karena hari esok sudah harus mempersiapkan pertarungan di Pileg dan Pilpres.

Tidak mengherankan jika di kelima provinsi tersebut perhatian calon kepala daerah, calon presiden dan calon wakil presiden, begitu juga partai-partai politik sangat besar karena akan juga menentukan nasib mereka di Pemilu 2019 yang akan datang. Tahun 2019 adalah pertarungan terakhir bagi partai-partai, calon presiden dan pasangannya. Jika menang akan berkuasa. Dan jika kalah akan tersingkir dan juga tersungkur. Menang berarti jaya. Kalah berarti mati. Mati dalam karir politik. Karena politik di kita cenderung menerapkan the winner takes all. Yang menang ambil semua jabatan dan posisi. Dan yang kalah diinjak dan disingkirkan.

Kemenangan partai-partai dalam mendukung calon kepala daerah juga menjadi faktor penentu kemenangan partai di Pileg nanti. Dan siapa yang terpilih menjadi kepala daerah juga akan menentukan siapa pemenang Pileg dan Pilpres nanti. Partai-partai politik yang calon kepala daerahnya menang akan memiliki sumberdaya kekuatan yang cukup untuk bertarung di Pileg karena didukung oleh kepala daerah yang menang yang memiliki banyak sumber daya.

Begitu juga dengan capres dan cawapres yang mendukung kepala daerah tertentu. Dengan kepala daerah tersebut sukses memenangkan Pilkada, maka akan berdampak positif untuk kemenangan Capres dan Cawapres yang mendukungnya. Capres dan Cawapres sangat membutuhkan kepala daerah, karena

kepala daerah sangat berperan besar untuk kemenangan bagi siapapun yang bertarung di Pilpres nanti.

Pilkada serentak kemarin sangat menguntungkan Jokowi sang incumbent. Karena partai-partai koalisi pendukung Jokowi banyak menang di lima provinsi strategis dengan pemilih gemuk. Kepala daerah terpilih di Jabar dan Jateng sudah pasti akan mendukung Jokowi. Karena didukung oleh partai koalisi Jokowi. Begitu juga dengan Khofifah di Jawa Timur, walaupun didukung Demokrat, Khofifah dengan jelas kepada media mengatakan bahwa dia akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 nanti.

Sulsel juga yang dimenangkan oleh pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudarman Sulaiman kemungkinan juga akan lari dan mendukung Jokowi. Karena pasangan ini didukung oleh PDIP, PKS, dan PAN. Dan yang terakhir adalah Sumut, mungkin hanya Sumut yang bisa mendukung Prabowo, namun itu pun akan terpolarisasi, mengingat pasangan Edy Ramayadi-Musa Rajekshah didukung oleh Gerindra, PKS, Golkar, PAN, Nasdem, dan Hanura.

Namun harus diingat, melejitnya suara Sudrajat-Ahmad Syaikhul yang didukung oleh Gerindra, PKS, dan PAN yang menempel Ridwan Kamil-UU. Juga mengalahkan Dua Dedi merupakan prestasi yang luar biasa. Melejitnya suara Sudrajat-Ahmad Syaikhul karena peran besar Prabowo yang turun langsung menyapa warga Jawa Barat untuk memenangkan pasangan tersebut. Karena bagaimanapun masyarakat Jawa Barat masih mencintai sosok Prabowo.

Begitu juga di Jawa Tengah, walaupun pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah kalah oleh Ganjar Pranowo dan Taj Yasin,

namun meningkat suara Sudirman Said-Ida Fauziah yang menempel incumbent harus diwaspadai. Karena bisa saja suara Sudirman Said-Ida Fauziah yang tinggi tersebut disumbangkan untuk Prabowo di Pilpres nanti.

Pilkada serentak tahun 2018 telah usai. Mari kita berjabat tangan. Dan mari kita menyongsong Pileg dan Pilpres 2019 dengan hati bersih dan pikiran jernih. Jokowi atau Prabowo. Atau tokoh lainnya itu terserah Anda.

Jangan sampai Pilkada serentak menghasilkan dan memunculkan kesetiaan dan identitas lokal. Yang perlu dijaga adalah kesetiaan nasional dan kesetiaan terhadap NKRI. Jangan mengelola primordialisme, yang akhirnya bisa memicu konflik dan memunculkan etnosentrisme (Isbodroini, 2002: 230). Pilkada serentak sejatinya harus menjadi jalan bagi perbaikan daerah dan bangsa kedepan. Jangan gontok-gontongan. Namun Pilkada harus menjadi ajang kompetisi yang sehat dalam menghasilkan pemimpin daerah yang habat.

Mencari Cawapres Ideal

PENDAFTARAN capres dan cawapres tinggal sebulan lagi. Tanggal 4-10 Agustus 2018 merupakan hari penentuan dan tanggal di mana kita akan mengetahui siapakah pasangan capres dan cawapres yang akan bersaing dan bertarung dalam Pilpres 17 April 2019 tahun depan. Apakah ada dua, tiga pasangan capres dan cawapres. Ataukah satu pasangan calon yang akan melawan kotak kosong.

Namun jika melihat konfigurasi kekuatan politik yang ada dan dinamika politik yang berkembang. Kemungkinan Pilpres 2019 akan diisi oleh pertarungan dua pasangan calon. Bisa tiga pasang calon jika muncul kekuatan alternatif. Namun kubu alternatif yang akan memasangkan JK-AHY sepertinya layu sebelum berkembang. Karena JK memilih untuk istirahat dan akan bekerja untuk kemanusiaan.

Dua pasangan calon yang akan bertarung tersebut adalah Jokowi sang petahana dengan pasangannya dan Prabowo dengan pasangannya. Atau bisa juga tokoh lain yang didukung dan di-endorse oleh Prabowo untuk menjadi capres menggantikan dirinya. Politik memang dinamis, setiap saat berubah dan

apapun bisa terjadi. Jika Jokowi dan Prabowo maju menjadi capres, otomatis keduanya membutuhkan cawapres yang ideal yang mampu mengisi kekurangan dan menambah electoral kedua tokoh tersebut.

Cawapres ideal Jokowi memang JK. Dari sisi manapun JK merupakan cawapres unggulan Jokowi. Namun seperti kita tahu, JK terganjal oleh aturan dalam UUD NRI 1945 dan UU Pemilu, yang tidak membolehkan JK untuk maju kembali jadi cawapres, karena sudah menjabat Wapres dua kali. Secara otomatis, peluang JK untuk mendampingi Jokowi lagi di 2019 sudah tertutup.

Mencari figur ideal cawapres sekelas JK memang agak sulit. JK merupakan sosok yang komplit, pengusaha, mewakili Indonesia Timur, dekat dengan umat Islam, dan memiliki jaringan yang luas. Namun kita harus yakin, walaupun nama-nama cawapres yang beredar di masyarakat levelnya masih di bawah JK. Namun masih banyak tokoh-tokoh nasional dan putra-putri terbaik bangsa ini yang layak menjadi cawapres.

Cawapres Jokowi akan menjadi penentu dan memiliki nilai strategis. Karena jika Jokowi memenangkan pesta demokrasi lima tahunan Pilpres 2019, maka cawapresnyalah yang akan memiliki kesempatan dan peluang untuk menjadi next president of Indonesia di 2024. Wajar jika para ketua umum partai politik koalisi pendukung Jokowi bermanuver untuk menjadi cawapresnya Jokowi.

Posisi cawapres bukan posisi ecek-ecek, bukan pula posisi sembarangan, dia akan mendampingi RI-1 dan akan menjadi RI-2. Sebuah jabatan tertinggi kedua di republik ini. Dengan posisinya yang mentereng tersebut, melekat tanggung jawab yang besar untuk dapat menjaga Nusantara tetap jaya dan harus

mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicari figur cawapres yang ideal. Jika tidak ada yang ideal, paling tidak mendekati ideal. Jika masih tidak ada, maka bisa dicari cawapres yang terbaik diantara yang terburuk.

Mencari sosok figur cawapres yang ideal memang tidak mudah. Banyak cawapres yang pintar secara intelektual, namun populeritas dan elektabilitasnya rendah. Ada yang populer dan elektabilitasnya tinggi, namun berkasus dan terkait-kait kasus korupsi. Ada yang sudah malang melintang di pemerintahan, namun tersandera masalah hukum. Ada elit-elit partai yang kesana-kemari mencari dukungan, namun kasusnya banyak, walaupun kasus itu masih terpendam dan belum dibuka.

Banyak nama-nama yang beredar untuk menjadi cawapres Jokowi atau Prabowo. Jokowi dan Prabowo tentu memiliki perhitungan yang matang untuk memilih pasangannya. Kehati-hatian dalam memilih cawapres memang sangat penting, karena cawapres yang dipilih harus cocok dan tidak mengganggu kinerja RI ketika menang nanti. Karena jika capres dan cawapresnya tidak cocok, maka ketika sudah dilantik nanti akan berbahaya bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Yang paling berbahaya lagi adalah jika cawapresnya berkeinginan menjadi presiden di tengah jalan. Bisa-bisa ketika sudah berjanji dan dilantik untuk bersama-sama mengurus NKRI, wapresnya berfikir untuk mengkudeta presidennya, sehingga wapresnya menjadi presiden. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di Indonesia dan tidak akan terjadi sampai kapanpun. Oleh karena itu, mencari sosok figur cawapres yang loyal terhadap capresnya menjadi keniscayaan.

Idealisme dalam mencari cawapres ideal juga harus ditumbuhkan. Pencarian cawapres bukan hanya karena tingkat popularitas dan elektabilitasnya yang tinggi. Tapi harus mampu menjaga dan mendukung capresnya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, agar kapal induk bernama Indonesia ini tidak oleng dan terpecah-pecah. Kekompakan dan kenyamanan akan menjadi sinergi yang dahsyat antara capres dan cawapresnya dalam memenangkan pertarungan dalam pilpres dan dalam mengawal dan menjaga republik ini.

Kita merindukan sosok Bung Hatta, wakil presiden RI yang pertama tersebut terkenal dengan kesederhanaannya, intelektualitasnya, kesetiakawanannya, perjuangannya untuk kaum marginal, dan kesholehannya. Ketika meninggal dunia pun, sosoknya diabadikan oleh Iwan Fals dalam salah satu lirik lagunya “Terbayang baktimu, terbayang jasamu. Bernisan bangga, berkapan doa. Dari kami yang merindukan orang sepertimu”. Dan lagu ini bisa kita nikmati hingga kini untuk mengenang jasa Bung Hatta yang sederhana, namun luar biasa.

Bung Hatta (2015: 3) sangat mementingkan persoalan ekonomi dan kemakmuran. Baginya persoalan mencari cawapres ideal itu penting. Namun yang lebih penting bagaimana Pilpres bisa mendorong manusia berjuang buat hidup dan untuk mencapai penghidupan yang sempurna atau ideal.

Akankah Jokowi dan Prabowo menemukan cawapres idealnya. Ataukah penentuan cawapres hanya berdasar kompromi dan deal-deal politik semata. Bukan berdasarkan idealisme dalam bernegara. Atau perjodohan cawapres ditentukan karena kepentingan politik pragmatis jangka pendek yang hanya akan

menguntungkan kelompok dan partai politik tertentu. Bukan untuk kepentingan jangka panjang kejayaan Indonesia. Idealnya memang harus mencari cawapres yang mampu menjaga keseimbangan, mampu menopang Capresnya.

Siapun yang akan dipilih menjadi cawapres oleh Jokowi atau Prabowo. Si A, B, atau C. Yang pasti merekalah yang terbaik. Kepada merekalah negeri ini dititipkan untuk lima tahun kedepan. Salah memilih cawapres, sama saja salah memilih jodoh. Jika salah memilih, maka akan besar pertaruhan nya. Selamat memilih cawapres. Jangan lupa cari cawapres yang ideal. Ideal menurut Anda dan ideal menurut kita semua.

Menanti Cawapres Jokowi

PENDAFTARAN capres dan cawapres tinggal 23 hari lagi. Elit-elit partai politik dan tokoh non-Parpol sibuk menjalin silaturahmi politik untuk mencari pasangan terbaik dan ideal guna dipasangkan menjadi capres dan cawapres yang akan didaftarkan pada 4-10 Agustus 2018. Mencari pasangan, jodoh, atau cawapres memang tidak mudah. Namun bukan juga sesuatu yang sulit. Jika cocok, sesuai hati nurani, diterima partai koalisi, dan berpotensi menang, maka ambil saja. Ya, ambil saja cawapresnya.

Jokowi memang sedang mencari cawapres ideal dan terbaik. Nama-nama tokoh partai dan non-partai sudah bermunculan, seperti Cak Imin, Zulhas, Romi, Airlangga, AHY, Puan Maharani, Mahfid MD, Sri Mulyani, Moeldoko, Anies Baswedan, TGB, Budi Gunawan, dan Dien Syamsudin pun disebut-sebut. Ataupun bisa saja Jokowi memilih tokoh lain. Di luar nama-nama tersebut. Siapapun memiliki kans yang sama untuk menjadi cawapres Jokowi. Lalu siapakah yang akan dipilih Jokowi untuk bersanding dengannya. Ini lah yang sedang dinanti dan ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita semua. Menunggu cawapres pilihan Jokowi.

Menjadi cawapres Jokowi memang idaman semua orang. Selain karena Jokowi sang petahana, dia juga memiliki peluang untuk menang kembali di Pilpres 2019. Jadi siapapun cawapres Jokowi yang dipilih akan menentukan siapa presiden di pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan, cawapres Jokowi now diberi karpet merah untuk bisa menjadi RI-1 di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, elit-elit politik berebut agar bisa menjadi pujaan hati Jokowi. Dan agar bisa menjadi pasangan yang serasi dan kompak demi memenangkan pertarungan politik dan pesta demokrasi terbesar di Indonesia dan dunia, yaitu Pilpres 2019.

Siapun yang akan dipilih oleh Jokowi dan partai koalisinya sebagai cawapres, tokoh tersebut merupakan orang yang beruntung. Ya, merupakan cawapres yang beruntung. Karena selain berjodoh dengan seorang incumbent, memiliki kans besar untuk menang, dan memiliki peluang sangat besar untuk menahkodai Indonesia di tahun 2024 yang akan datang. Karena cawapres Jokowi now akan menentukan bagaimana dan siapa yang berpeluang menggantikan Jokowi di 2024 nanti. Itu pun jika Jokowi terpilih kembali di Pilpres 2019. Jika tidak terpilih, ya sudah menjadi suratan takdir. Tak perlu ditangisi dan disesali. Roda dunia memang berputar, ada akalnya di atas dan ada kalanya di bawah. Semua harus dinikmati dengan senang hati.

Apakah Jokowi akan memilih elit partai atau tokoh non-partai. Semua tergantung Jokowi. Dan tentu nama-nama calon pendampingnya tersebut sudah ada di saku bajunya. Ya, di saku bajunya. Jangan sampai Jokowi salah pilih. Dan jangan sampai Jokowi memilih cawapres seperti memilih kucing dalam karung.

Atau memilih itik dalam kardus. Jangan sampai memilih orang yang salah. Karena jika salah pilih, Jokowi juga bisa kalah. Ya, bisa kalah. Salah memilih cawapres bisa menyesal kemudian.

Jika melihat dinamika politik yang ada. Bisa saja Jokowi memilih figur dan tokoh dari non-partai. Pemilihan cawapres dari tokoh non-partai lebih aman bagi Jokowi. Dan jika Jokowi terpilih kembali akan lebih nyaman dan aman dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. Tanpa harus diganggu oleh cawapres yang berhasrat dan memiliki sahwat politik yang tinggi untuk menjadi presiden di tengah jalan. Artinya bisa saja Jokowi tidak aman dan bisa turun di tengah jalan. Karena Wapresnya ngebet jadi presiden. Ini yang bahaya dan membahayakan.

Belajar dari SBY pada Pilpres 2009 yang lalu. Di mana SBY selaku petahan kala itu. Dan akan maju sebagai capres untuk periode yang kedua. SBY lebih memilih Boediono, seorang dosen, ekonom, profesional, dan berlatar belakang tokoh non-partai. Perjalanan SBY untuk menang kembali di Pilpres 2009 menjadi mudah dan lancar-lancar saja. Tidak ada gejolak penolakan dari partai-partai koalisi pendukung SBY. Karena semuanya sudah deal. Ya, semuanya sudah deal. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana seperti yang dikemukakan Harold Laswell ketika saya kuliah Ilmu Politik dulu di Universitas Indonesia.

Dan bisa saja Jokowi juga melakukan pola yang sama dengan apa yang dilakukan oleh SBY di masa lalu. Ini zaman now, meniru pola lama yang baik dan menang adalah lebih baik. Dari pada meniru yang baru yang belum tentu menang dan akan menimbulkan gejolak suatu saat nanti. Jokowi memilih elit partai sebagai pendampingnya itu adalah haknya. Dan haknya

pula untuk memilih cawapres dari kalangan tokoh nasional non-partai. Pilihan semuanya ada pada Jokowi.

Soal ancaman dari elit-elit partai-partai koalisi pendukung Jokowi. Yang jika tidak dipilih menjadi cawapres akan henggang dari koalisi. Itu ancaman basa-basi dan gertak sambal. Dan elit-elit partai tersebut tidak akan berani. Karena kasus-kasus lama elit-elit partai tersebut sudah ada dalam genggamannya penegak hukum. Jika macam-macam dan lari dari koalisi, maka kasus-kasus tersebut akan terbuka dan muncul kepermukaan. Jadi, menyandera tokoh politik via kasus-kasus hukum sudah menjadi hal biasa di republik ini. Dan sudah terjadi sejak lama.

Yang bisa dilakukan oleh para elit partai pendukung Jokowi adalah menjaga kekompakan. Walaupun saling tusuk dari belakang. Walaupun di dalam koalisi acak-acakan dan saling bersaing. Tapi jika di luar harus nampak kompak dan bersatu. Itu lah realita politik nusantara, wajah politik kita masih diselimuti oleh kemunafikan. Apa yang di belakang dengan apa yang di depan selalu berbeda. Politik di republik ini juga masih menampilkan seribu wajah. Wajah manis, berseri-seri, dan bercahaya. Dan di saat yang sama juga menampilkan wajah yang muram, hitam, bengis, angkuh, jahat, dan seribu wajah lainnya yang penuh kepura-puraan.

Pemimpin politik (cawapres), pemimpin negara dan organisasi lainnya yang ingin mendapat dukungan dari bawahan atau rakyat luas, harus memiliki pencitraan yang kuat terhadap diri pribadinya (Bungin, 2018: 118). Jadi cawapres yang dibutuhkan Jokowi juga haruslah pribadi yang kuat dalam pencitraan positif dalam dirinya.

Siapapun yang dipilih Jokowi untuk menjadi cawapresnya itu hak prerogatif Jokowi. Kita tidak bisa ikut mencampuri. Dan siapapun pilihan Jokowi merupakan tokoh terbaik di republik ini. Yang jika terpilih nanti harus bekerja yang terbaik juga untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Rame-rame Jadi Caleg

MENJADI Caleg (Calon Anggota Legislatif) DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan dambaan seluruh rakyat Indonesia. Walaupun masih menjadi calon, belum tentu terpilih. Hati sudah berbunga-bunga dan berharap-harap cemas, karena memiliki harapan menjadi wakil rakyat yang terhormat yang berkantor di Senayan yang nyaman.

Fenomena pencalegan zaman now dihiasi oleh dinamika politik yang gegap gempita, betapa tidak, karena pencalegan kali ini ditandai oleh banyaknya selebritis yang mencoba keberuntungan bertarung di Dapil (Daerah Pemilihan) untuk memperebutkan kursi di DPR RI. Ditambah lagi dengan para Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK yang juga maju menjadi calon anggota DPR RI. Tak ketinggalan, sosok pengacara Habieb Rizieq Shihab, Kapitra Ampera yang menjadi Caleg dari PDIP.

Artis menjadi calon anggota legislatif memang bukan sesuatu yang aneh. Fenomena artis-artis yang populer menjadi Caleg sudah terjadi pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Ada yang beruntung dan terpilih, dan ada juga yang terhempas. Ada yang

menikmati menjadi pejabat negara, dan ada juga yang masuk penjara. Ada yang amanah dalam bekerja, ada juga yang sibuk sambil menjadi host, bintang iklan, dan main sinetron.

Popularitas artis memang sangat dibutuhkan oleh partai politik. Bahkan partai politik berebut artis hanya untuk sekedar menjadikannya sebagai Caleg. Bukan hanya itu saja, partai politik tertentu juga sampai membajak artis yang sudah menjadi anggota DPR RI dari partai lain. Dengan mengiming-imingi akan diberi dana untuk sosialisasi dan kampanye untuk pencalegan, beberapa artis rela untuk pindah perahu.

Bajak membajak dalam politik merupakan hal yang lumrah dan biasa. Termasuk bajak membajak terhadap artis yang memiliki popularitas tinggi dan teruji pernah lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI. Popularitas saja tidak cukup. Perlu didukung dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang tinggi pula. Jadi, artis yang sangat populer belum tentu menang dan terpilih menjadi anggota DPR RI.

Namun popularitas dalam politik Indonesia sudah menjadi modal dan bekal politik. Ya, menjadi modal dan bekal politik. Popularitas merupakan langkah awal menuju keterpilihan dan mendekati kemenangan. Karena kita tahu, untuk menjadi populer saja seseorang harus berjuang siang-malam dan banyak mengeluarkan uang. Yang harus diingat, popularitas memang penting, namun popularitas tanpa didukung dengan usaha dan kerja keras mendatangi dan menyapa rakyat, maka akan sia-sia belaka.

Populer tidak dilarang. Terkenal boleh saja. Namun jika popularitas tidak dibarengi dengan elektabilitas akan mati tak

berarti. Akan kalah tak berbekas. Dan akan malu bak bunga putri malu yang tumbuh di pinggir sungai. Popularitas memang yang teratas, namun belum tentu teruji dan dicintai. Popularitas memang harus disyukuri dan dinikmati. Popularitas juga harus dijaga jangan sampai menjadi celaka dan berbahaya. Popularitas yes, elektabilitas juga yes.

Menurut Yusuf Zainal Abidin, untuk membangun popularitas dan elektabilitas diperlukan pendekatan kepada media yang lebih cerdas dan tepat. Caranya adalah berbicara langsung dengan wartawan atau editornya dengan menampilkan data dan fakta sebenarnya (2016:12) dan dengan konsep yang jelas. Membangun popularitas dan elektabilitas tidaklah mudah. Butuh strategi pemberitaan yang tepat.

Karena pentingnya popularitas yang dimiliki selebritis Indonesia. Partai-partai politik seolah berlomba untuk rame-rame mengusung para artis untuk menjadi Caleg. PAN (Partai Amanat Nasional) bahkan sejak lama pernah dijuluki sebagai Partai Artis Nasional. Seolah mengikuti jejak PAN, Partai Nasdem, PDIP, Partai Golkar, dan partai lainnya rame-rame menjadikan artis menjadi Caleg di Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019 nanti.

Partai politik memang membutuhkan para artis. Dan para artis pun membutuhkan partai politik. Jadi kedua belah pihak saling membutuhkan. Ditambah lagi dengan sistem Pemilu terbuka dengan perhitungan suara menggunakan Metode Sainte Lague Murni, maka mengarah kepada “the winner takes all”, pemenang akan meraih banyak kursi. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang populer dalam hal ini artis untuk menjadi vote getter (pendulang suara).

Tidak sampai hanya pada artis-artis yang populer. Partai-partai politik juga menjadikan Menteri-menterinya untuk dijadikan Caleg. Seperti kita tahu, Menteri juga merupakan tokoh yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sebut saja ada Imam Nahrawi, Eko Putro Sandjoyo, Hanif Dhakiri dari PKB, Puan Maharani dan Yasonna Laoly dari PDIP, Lukman Hakim Saifuddin dari PPP, dan Asman Abnur dari PAN. Para Menteri tersebut juga menjadi pendulang suara bagi partainya masing-masing.

Di luar kedua figur artis dan menteri. Partai politik juga mengajukan para pengusaha untuk bertarung menjadi caleg. Pengusaha merupakan orang yang memiliki basis finansial yang kuat. Oleh karena itu, tidak heran, jika perpolitikan di republik ini juga diisi dan dipenuhi oleh para pemilik modal. Dengan politik liberal ala Indonesia seperti saat ini, para pengusaha terkadang menjadi rebutan partai-partai politik. Karena dari para pengusaha tersebut, partai politik mendapatkan sumbangan dana untuk menjalankan roda organisasi yang mahal dan mengurus pundi-pundi kas partai.

Bagaimana dengan masyarakat biasa seperti kita, para aktivis, intelektual, nelayan, petani, kepala desa, sales, pedagang, asisten rumah tangga, dan profesi lainnya bisakah menjadi caleg. Tentu bisa, asalkan didukung partai politik dan siap menang dan juga siap kalah. Kontestasi demokrasi yang terlalu liberal seperti saat ini mengharuskan para caleg memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, juga harus berkantong tebal. Jika tidak, maka kekalahan akan menghadang di depan mata.

Pada pileg-pileg sebelumnya, banyak caleg yang gagal dan menyisakan banyak hutang, bahkan sampai gila. Jangan

sampai Anda menjadi gila karena kalah dalam Pileg. Menjadi caleg adalah merupakan suatu kehormatan. Kehormatan karena diberi kesempatan untuk berjuang sekuat tenaga untuk merebut hati rakyat demi berkantor di Senayan. Kehormatan karena jika terpilih nanti menjadi wakil rakyat yang mudah-mudahan bisa mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sudah memilihnya.

Pileg memang bukan sekedar popularitas dan uang. Pileg sejatinya merupakan pesta demokrasi yang bertujuan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap konstituennya.

Jokowi versus Prabowo

SEMBILAN hari lagi pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019 akan dibuka. Elit-elit politik semakin intensif berkomunikasi, bertemu, dan bermanuver untuk mendapatkan sepasang capres dan cawapres terbaik. Pertemuan demi pertemuan dilakukan oleh para tokoh memunculkan dinamika politik tersendiri. Layaknya lobi-lobi politik, ada yang sepakat, kecewa, marah, mengancam keluar barisan, dan menjanjikan kompensasi jabatan dan kedudukan.

Jika mencermati dinamika politik yang terjadi. Tidak akan banyak pasangan capres dan cawapres yang akan mendaftar. Bukan hanya karena tingginya Presidensial Threshold di angka 20% kursi di DPR RI atau 25% perolehan suara sah nasional Pemilu 2014. Tetapi juga karena tidak banyak tokoh yang muncul menjadi capres untuk menantang sang incumbent Joko Widodo.

Tokoh-tokoh nasional banyak yang muncul, namun masih sebatas di level cawapres. Ini menandakan kepemimpinan nasional masih statis, belum bergerak, dan loyo, sehingga yang muncul kepermukaan itu-itu saja. Jokowi dan Prabowo.

Ya, Jokowi dan Prabowo lagi. Jika pada Pilpres 2019 mempertemukan Jokowi dengan Prabowo, maka hanya akan mengulang Pilpres tahun 2014 yang lalu. Yang berubah dan berganti hanya cawapresnya saja.

Reborn pertarungan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 nanti hanya akan memutar lagu lama, basi, dan kurang enak didengar. Sejatinya kepemimpinan nasional harus diisi oleh tokoh-tokoh, yang bukan hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga yang terbaik secara kualitas. Namun jika kepemimpinan hanya terjadi dikedua tokoh saja, maka sirkulasi elit tidak akan terjadi. Sirkulasi elit tidak terjadi pada level RI-1 (Presiden), tetapi hanya terjadi di RI-2 (Wakil Presiden).

Anehnya lagi, ketum-ketum partai politik dan tokoh-tokoh lainnya juga bertarung dan berebut hanya untuk menjadi cawapres. Baik bersaing untuk menjadi cawapresnya Jokowi atau Prabowo. Tidak memiliki keinginan untuk menjadi capres untuk menantang Jokowi dan Prabowo. Tak ada mental petarung dan pejuang dalam karakter tokoh-tokoh partai dan non-partai di republik ini, sehingga hanya sekedar untuk menjadi capres saja tidak berani.

Jokowi dan Prabowo juga manusia. Jika Jokowi dan Prabowo berani untuk menjadi capres, kenapa yang lain tidak. Kenapa tokoh-tokoh partai politik takut kalah, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pendapatan, takut kehilangan pengaruh, dan yang lebih parah lagi takut masuk penjara. Karena jika para elit partai tersebut berani menantang sang petahana, bisa saja kasus-kasus hukum dimasa lalunya bermunculan dan akan mengantarkannya ke jeruji besi.

Tak menarik memang jika Pilpres nanti hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres. Jika yang muncul Jokowi dengan cawapresnya dan Prabowo dengan cawapresnya. Tidak ada tokoh alternatif yang muncul. Sejatinya stok kepemimpinan nasional di republik ini sangat banyak. Dan Indonesia tidak pernah kekurangan calon pemimpin bangsa, namun calon-calon pemimpin bangsa tersebut masih diam, tidak muncul dan dimunculkan, dan lebih banyak mengurus dirinya sendiri.

Jika di banyak negara, ketua umum partai dan elit-elit politik berusaha berebut dan bersaing untuk bertarung menjadi RI-1, dan hanya di Indonesia elit-elit politiknya berebut untuk posisi RI-2. Sungguh kasihan bangsa ini. Bangsa besar ini harus tetap berkibar. Oleh karena itu, elit-elit politik harus memiliki jiwa kesatria, berani menantang Jokowi sang petahana atau Prabowo sang oposan, jangan menjadi elit partai yang hanya mencari kekuasaan, jabatan, dan hanya mencari aman.

Jokowi dan Prabowo bisa jadi putra terbaik di negeri ini. Namun apakah tidak ada yang lain di antara 260 juta lebih penduduk Indonesia, putra-putri terbaik yang bercita-cita untuk menjadi presiden atau bercita-cita untuk melawan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 nanti. Jika ada, maka proses regenerasi kepemimpinan di republik ini masih jalan, bergerak, dan tidak mati. Namun jika tidak ada, maka sesungguhnya kitalah yang bersalah karena tidak mampu memunculkan banyak pemimpin nasional yang berkualitas dan dicintai rakyatnya.

Kepemimpinan di partai politik memang harus diperkuat. Namun bukan kepemimpinan oligarki yang dilanggengkan dan dirawat. Tetapi kepemimpinan yang bersahabat, bermental petarung dan pemenang, bukan kepemimpinan yang bermental

bejat, laknat, dan penakut. Kepemimpinan yang mencerahkan, menginspirasi, menggerakkan, membawa kebaikan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia membutuhkan elit-elit partai yang bersahaja, tidak elitis, mau dan mampu bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara.

Kesempatan tidak datang begitu saja. Ia harus diciptakan. Ia harus direbut. Jangan menunggu, apalagi menunggu bantuan dan pertolongan dari siapapun, termasuk dari pemerintah. (Bakrie, 2012: 50). Kepemimpinan yang tak diperjuangkan tak akan dihasilkan. Ketua umum-ketua umum partai jangan hanya hanya menunggu jadi menteri. Tapi harus memiliki karakter petarung. Karakter pemenang. Walaupun yang dilawan incumbent.

Kepemimpinan tidak boleh berhenti hanya di Jokowi dan Prabowo. Kepemimpinan nasional harus dipersiapkan dengan seksama. Kepemimpinan nasional tidak boleh dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu. Karena menurut sabda Rasulullah SAW, “bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya”. Kepemimpinan nasional harus memberi ruang kepada siapapun yang mampu untuk diberi kesempatan menduduki jabatan-jabatan publik.

Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi mungkin. Jangan pernah merasa loyo dan tidak mampu untuk menantang Jokowi dan Prabowo. Jokowi bisa dikalahkan. Prabowo belum pernah jadi presiden. Jadi peluang tokoh lain untuk menjadi RI-1 itu ada dan terbuka. Namun sekali lagi, kita masih terfokus dan berketat pada Jokowi dan Prabowo. Jokowi sang petahana dan Prabowo sang penantang. Tokoh lainnya hanya menjadi sang penonton. Ya, hanya menjadi penonton yang kerjanya tepuk tangan.

Ketidakberanian membentuk poros alternatif dan ketakutan elit-elit politik menantang Jokowi dan Prabowo bisa saja elit-elit partai ingin aman. Bermain dua kaki. Atau bermental ISIS (Ikut Sana Ikut Sini) dan juga berkarakter SUSU (Sana Untung Sini Untung). Mudah-mudahan saya tidak salah menilai. Jokowi dan Prabowo penting. Namun kita juga lebih penting. Karena kitalah pemilik suara yang akan menentukan siapa presiden Indonesia di 2019 nanti. Jokowi, Prabowo, atau yang lainnya terserah Anda.

BAB 2

PILPRES DAN PERSOALAN PEMILU DI INDONESIA

Siapa Cawapres Prabowo?

SELASA, 31 Juli 2018 kemarin saya diundang menjadi narasumber oleh iNews TV dalam program iNews sore yang membahas diskusi tentang ‘Siapa Cawapres Prabowo?’. Hadir pula narasumber lain seperti Suhud Aliyudin dari PKS, Ferdinand Hutapea dari Partai Demokrat, dan Anggawira dari Partai Gerindra, acara dipandu oleh Mas Zacky Hussein yang smart dan charming.

Membahas siapa sosok cawapres Prabowo memang menarik. Bukan hanya karena Prabowo menjadi sang penantang serius Jokowi. Tetapi karena posisi cawapres Prabowo yang jauh-jauh hari diperebutkan oleh PKS dan PAN. Dan siapa cawapres Prabowo, akan menentukan juga siapa yang akan menjadi cawapres Jokowi. PAN dan PKS sempat mengancam untuk keluar dari bangunan koalisi Prabowo jika kadernya tidak diakomodir menjadi cawapres Prabowo.

Yang menarik lagi adalah posisi Partai Demokrat yang menyalip di tikungan secara tiba-tiba mendukung pencapresan Prabowo, dukungan Partai Demokrat tentu tidak gratis, sudah tentu menginginkan sang golden boy Partai Demokrat AHY

dipilih untuk menjadi cawapres Prabowo. Hal yang wajar jika SBY dan Partai Demokrat menyorongkan nama AHY, karena AHY merupakan Ketua Kogasma (Komandan Satuan Tugas Utama) dan anak pemilik saham Partai Demokrat SBY.

Munculnya Partai Demokrat dalam mendukung Prabowo tentu membawa berkah bagi Prabowo. Dan kehadiran Partai Demokrat berada dalam barisan Prabowo membawa semangat tersendiri bagi Prabowo dan Partai Gerindra. Seperti kita ketahui bersama, Partai Demokrat berlabuh ke Prabowo karena Partai Demokrat tidak nyaman masuk koalisi Jokowi yang disebabkan ada komunikasi dan hubungan yang tidak baik dengan Megawati sang Ketum PDIP.

Namun dukungan Partai Demokrat ke Prabowo juga bisa menjadi musibah jika tidak dikelola dengan baik. Dengan masuknya Partai Demokrat artinya akan menggeser keberadaan PKS yang selama ini sudah bersama-sama menjalin persahabatan dalam menjadi partai oposisi pemerintah dan bersama-sama berjuang di Pilkada untuk memenangkan dan menggolkan kader-kadernya menjadi kepala daerah. Bukan hanya PKS yang akan tergeser, PAN juga akan mengalami nasib yang sama.

PKS dan PAN sedang harap-harap cemas dan galau. Karena bisa saja Prabowo meminang AHY dari Partai Demokrat untuk mendampinginya menjadi cawapres. Dan jika itu terjadi, maka pupuslah harapan PKS dan PAN yang ingin menempatkan kader dan ketua umumnya untuk menjadi cawapres Prabowo. Prabowo sedang membutuhkan sosok cawapres yang mampu mengangkat elektoralnya, jika tidak, maka Prabowo akan sulit menyaingi elektabilitas Jokowi yang lebih tinggi di atasnya.

PKS dan PAN juga harus realistis dalam menyodorkan nama-nama kader dan ketumnya untuk dijadikan cawapres Prabowo. Jika PKS menyodorkan nama Salim Segaf Al Jufri, sang Ketua Majelis Syuronya dan PAN mengajukan nama Zulkifli Hasan, sang ketua umumnya, maka kedua nama tersebut masih kalah populer dan kalah elektabilitas jika dibanding dengan AHY, sang golden boy dan Ketua Kogasma Partai Demokrat.

Keputusan ada di tangan Prabowo, memilih satu nama dari ketiga nama (Salim Segaf Al Jufri, Zulkifli Hasan, dan AHY) atau memilih nama lain di luar ketiga nama tersebut semuanya berisiko dan semua ada untung dan ruginya. Pilihan Prabowo akan menentukan bangunan kesolidan koalisi yang sedang disiapkan. Siapapun yang terpilih menjadi cawapres Prabowo tidak usah jumawa, karena belum tentu menang. Dan bagi yang tidak terpilih tak perlu marah dan merintih, karena pasti akan mendapat kompensasi politik yang menggiurkan dan menguntungkan.

Pencapresan Prabowo oleh Partai Demokrat memunculkan asa baru dalam perpolitikan Indonesia. Perpolitikan nasional butuh keseimbangan. Layaknya alam semesta ada siang ada malam, ada hitam ada putih, ada langit dan juga ada bumi. Begitu juga Indonesia butuh balancing of power. Jangan biarkan Jokowi dan partai koalisinya dominan. Jangan biarkan Jokowi melenggang sendirian. Jangan biarkan Jokowi merasa menang sebelum pertandingan dimulai. Jangan sampai koalisi pendukung Jokowi merasa hebat. Dan jangan sampai Jokowi juga melawan kotak kosong.

Melawan incumbent menjadi sangat penting. Agar proses demokratisasi berjalan dinamis dan hidup. Proses demokratisasi

akan mati, jika pasangan capres dan cawapres hanya satu pasang. Iklim demokrasi harus ditumbuhkan dan dikembangkan, jika tidak, maka demokrasi akan layu dan mati. Mengawal proses demokratisasi dalam kompetisi Pilpres merupakan suatu keniscayaan. Demokrasi tak boleh padam. Oleh karena itu, demokrasi harus dihidupkan, salah satunya jangan biarkan Jokowi tanpa lawan. Jangan sampai demokrasi dibajak dan dikuasai oleh kaum penjahat (Komarudin, 2018: 198) untuk kepentingan mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.

Kehadiran Demokrat di tengah-tengah Prabowo, dan juga dukungan PKS dan PAN dalam barisan Prabowo merupakan bagian dari membangun dan membentuk keseimbangan politik yang patut diapresiasi. Sejatinya bangsa ini harus berterima kasih kepada Partai Demokrat, PKS, dan PAN —jika memang bergabung ke Prabowo— karena telah membangun demokrasi yang sehat. Menantang dan melawan sang petahana Jokowi memang tidak mudah, namun juga bukan merupakan sesuatu yang sulit. Selalu ada celah dan peluang untuk menumbangkan sang incumbent Jokowi.

Tak ada manusia yang sempurna, termasuk Jokowi. Menantang dan melawan Jokowi merupakan keniscayaan bagi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Peluang incumbent untuk menang kembali cukup besar. Namun pihak Prabowo dan barisan oposisi juga berpeluang untuk menang. Tak ada incumbent yang tak bisa dikalahkan. Jika incumbent sampai tumbang dan kalah oleh koalisi yang dibangun Prabowo cs, maka ada yang salah dari sang incumbent tersebut.

Butuh kerja keras dan kesolidan untuk dapat mengalahkan dan menumbangkan sang petahana. Nothing is impossible in this

world. Dan impossible is nothing. Akankah koalisi yang digalang Prabowo dan SBY akan mampu mengalahkan Jokowi? Hanya waktu yang akan menjawab. Tak perlu takut berkompetisi. Kalah dan menang dalam politik merupakan hal biasa. Tak mungkin menang terus, dan tak mungkin juga kalah terus. Akankah 2019 ganti presiden? Hanya Tuhan dan rakyat yang tahu. Tuhan sang pencipta alam semesta. Dan rakyat Indonesia sang pemilik suara dan kedaulatan.

Tak penting memilih AHY, Salim Segaf Al Jufri, Zulkifli Hasan, atau yang lainnya. Yang terpenting adalah siapapun yang terpilih menjadi cawapres Prabowo harus mampu menambah dan menaikkan elektabilitas Prabowo dan juga mampu mengalahkan dan menumbangkan sang petahana Jokowi. Siapa yang akan menang. Prabowo atau Jokowi. Kita tunggu hingga waktunya tiba.

Prabowo tak memilih AHY, Salim Segaf Al Jufri, Zulkifli Hasan. Namun Prabowo memilih Sandiaga Uno. Mungkin Sandiaga lebih siap dan sudah siap untuk menggelontorkan pundi-pundi finansialnya untuk kepentingan Pilpres. Prabowo sangat realistis. Memilih anak muda yang punya uang. Walaupun nanti akhirnya kalah. Tapi sudah berusaha maksimal.

Menebak Isi Kantong Jokowi dan Prabowo

MASA pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2019 sudah berjalan enam hari. Dan besok akan ditutup. Sepi dan belum mendaftarnya para capres karena masih mengutak-atik cawapres dan saling mengintip isi kantong masing-masing. Ya, saling mengintip siapakah yang akan dijadikan cawapres di kubu Prabowo ataupun Jokowi. Masa pendaftaran pun terancam diperpanjang hingga empat belas hari ke depan.

Ibarat permainan sepak bola, Pilpres kali ini seperti pertemuan “Derby” – pertarungan antara dua tim besar—yang ketika menentukan dan menyusun formasi timnya, biasanya mengintip dan melihat strategi yang dilakukan tim lawannya. Formasi tim lawan akan menentukan formasi dan strategi yang dipakai oleh kesebelasan tim lainnya. Dan agar formasi dan strategi tidak terbaca oleh tim lawan, maka pelatih biasanya mengumunkan formasi di the last minute atau injury time.

Nah fenomena politik seperti itulah yang sedang terjadi dalam dinamika politik pencapresan di Indonesia. Di mana para capres masih merahasiakan siapa cawapresnya. Jokowi sang incumbent pun masih belum mendaftar sambil mengintip dan

melihat siapa yang akan dijadikan cawapres oleh Prabowo. Jadi, siapa yang menjadi cawapres Prabowo, akan menentukan pula siapa yang akan dipilih menjadi cawapres Jokowi.

Jika Prabowo menggandeng Salim Segaf Al Jufri menjadi cawapres, maka bisa saja di kubu sebelah akan memasang Jokowi dengan Ma'ruf Amin. Hal tersebut dilakukan untuk mengimbangi kekuatan kelompok Islam yang ada di belakang Salim Segaf Al Jufri. Untuk membendung kekuatan tersebut, maka dimunculkanlah nama Ma'ruf Amin. Jika ini yang terjadi, maka politik identitas akan mewarnai kontestasi Pilpres 2019 nanti.

Namun jika yang dipilih oleh Prabowo itu AHY, maka Jokowi bisa saja memilih Mahfud MD atau Moeldoko sebagai pendampingnya. Jadi, siapa cawapres Prabowo akan juga menentukan siapa yang menjadi cawapres Jokowi. Isi kantong Prabowo akan terus diintip Jokowi. Dan isi kantong Prabowo hingga detik ini belum terisi, karena masih terjadi tarik ulur siapa yang akan disandingkan dengan Prabowo untuk menjadi cawapresnya.

Dan jika Prabowo menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapres, maka kubu Jokowi pun sudah mempersiapkan Mahfud MD. Namun politik selalu dinamis dan menampilkan banyak kejutan, selama belum deal dan selama itu pula masih bisa berubah. Berubah setiap saat dan berubah setiap detik. Siapapun yang akan menjadi pendamping Prabowo atau Jokowi untuk menjadi cawapres yang jelas pertarungan Pilpres akan tetap menarik dan seru. Semenarik dan seseru menonton dan menyaksikan duel “Derby” dua team besar dalam sepak bola. Jokowi versus Prabowo.

Utak-atik cawapres memang tidak salah. Karena bisa menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemenangan dalam Pilpres. Namun jika utak-atik cawapres dilakukan dengan melupakan pemilu legislatif (Pileg), di mana partai politik juga ikut berkontestasi, maka partai-partai politik di kubu Prabowo dan Jokowi juga terancam tidak lolos ke Senayan karena terganjal Parliamentary Threshold (PT) yang 4% dari suara sah nasional. Konsentrasi di pilpres dan tidak fokus di pileg membuat partai-partai yang sudah ada di parlemen pun terancam gagal lolos PT.

Seperti kita ketahui di kubu koalisi Jokowi hanya PDIP dan PKB yang menikmati nilai elektoral Jokowi. Itupun karena Jokowi kader dan identik dengan PDIP. Dan PKB mati-matian mem-branding dan berkampanye melakukan sosialisasi agar ketumnya dipilih menjadi cawapres Jokowi. Sedangkan partai-partai koalisi lainnya cenderung turun elektabilitasnya bahkan terancam gagal masuk Senayan.

Pilpres memang penting, namun pileg jauh lebih penting. Karena akan menentukan nasib partai politik ke depan. Partai yang tidak lolos PT akan terkubur dengan sendirinya. Dan akan dilupakan sejarah. Sejarah hanya akan dimiliki oleh mereka yang menang. Bukan mereka yang kalah. Jadi, jika partainya kalah dan tidak lolos PT, maka selesai dan tamatlah riwayat partai-partai tersebut.

Mumpung belum terlambat. Dan mumpung masih ada waktu. Bergerak untuk memenangkan capres dan mengutak-atik cawapres memang tidak salah. Namun jika semua itu melupakan kemenangan dan bertahan di pileg, maka tunggulah kehancurannya. Ya, tunggulah kehancuran partai-partai tersebut. Bergeraklah agar dapat menang di pileg atau paling tidak bertahan

agar bisa lolos ke Senayan. Karena itulah esensi partai politik dibentuk, untuk merebut kekuasaan dengan cara konstitusional dengan cara memenangkan pemilu.

Menang itu menggembirakan, menyenangkan, dan menyehatkan. Jadi, memenangkan kompetisi dan pertarungan dalam pemilu adalah keniscayaan. Karena bagaimanapun kalah itu menyakitkan, menderita, dan sakitnya pun di sini (di hati). Dalam kontestasi politik, menang dan kalah merupakan hal biasa. Dan di politik bisa menang berkali-kali dan bisa kalah juga berkali-kali. Yang terpenting adalah konsentrasi di pilpres, sambil jangan melupakan pileg. Karena dalam sejarah republik ini, di tahun 2019 nanti pileg dan pilpres dilakukan secara serentak.

Kemenangan di pilpres harus paralel dengan kemenangan di pileg. Tak ada gunanya partai-partai tersebut memenangkan kontestasi pilpres, jika dalam pilegnya kalah, hancur, dan tak lolos PT. Jadi, bergerak di pilpres dan pileg harus bersamaan. Egois hanya perhatian ke salah satu pesta demokrasi tersebut hanya akan membuat partai-partai tersebut hilang dari percaturan politik nasional dimasa yang akan datang. Say good bye to partai-partai yang tidak siap dan belum siap bertarung.

Menang di pilpres yes, dan menang di pileg juga harus yes. Kedua kontestasi tersebut harus dimenangkan, dan paling tidak bisa mempertahankan agar bisa lolos ke Senayan. Jangan sampai sudah tau mau kalah, tapi diam saja. Sudah tau tidak akan lolos ke Senayan, tapi tak mau bergerak. Semua bergantung pada pimpinan partai-partai politik. Apakah hanya ingin menang di pilpres ataupun kalah di pileg. Atau bisa juga menang kedua-duanya. Atau yang lebih parah lagi kalah kedua-duanya. Itu

semua bergantung usaha dan kerja keras Anda dan caleg-caleg yang bergerak di lapangan.

Kalah dan menang soal biasa. Tak mungkin dua-duanya menang. Dan tak mungkin juga dua-duanya kalah. Jadi, kalah dan menang adalah sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada. Yang menang jangan bangga dan jumawa, dan yang kalah juga jangan menyerah, coba, dan coba lagi. Karena hari esok pasti akan lebih baik. Selamat bertarung kawan. Dan semoga beruntung.

Menebak isi kantong keduanya, merupakan bagaimana kita melihat, kekuatan yang dimiliki kedua tokoh tersebut. Tak jarang kekuatan-kekuatan politik, yang dimiliki Jokowi maupun Prabowo, sering bertabrakan, saling serang, dan menjatuhkan, sehingga munculah konflik di kedua belah pihak (Komarudin, 2016: 240). Terkadang konflik tak terhindarkan terjadi karena beda kepentingan dan pandangan. Namun bagaimanapun, konflik akan bisa diselesaikan dengan konsensus. Pasca Pilpres semua persoalan akan bisa diselesaikan dengan konsensus.

Merdeka atau Mati

BESOK (17/8) kita akan memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-73. Milad kemerdekaan yang diperingati setiap tahun, jangan hanya menjadi rutinitas upacara bendera tahunan dan selebrasi agustusan yang tanpa makna dan arti. Namun harus menjadi kekuatan yang mencerahkan seluruh komponen bangsa. Kemerdekaan RI memang harus diperingati dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Dan kemerdekaan sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri dan dinikmati.

Merdeka artinya bebas. Ya, bebas. Bebas dari segala bentuk penjajahan. Bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Bebas dari kejumudan berfikir dan bertindak. Bebas dari melakukan kreatifitas, produktifitas, dan inovasi. Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bebas dari ketidakadilan dan kedzoliman. Bebas dari segala keserakahan. Dan bebas dari segala kemunafikan.

Bung Tomo (2006: 134) dalam siaran radio menyongsong serangan Sekutu ke Surabaya, 9 November 1945, dengan berapi-api dan sangat heroik mengatakan “Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita

hancur lebur daripada kita tidak merdeka”. Pekikan kemerdekaan di tahun 1945 itu kini telah kita nikmati. Kita sudah menikmati kemerdekaan itu. Namun kita belum bisa mengisi kemerdekaan dengan baik.

Kemerdekaan RI yang ke-73 memberi ruang kepada seluruh anak bangsa untuk mengisinya dengan karya-karya dan hal-hal positif. Kebebasan harus dimaknai dengan bebas melakukan karya-karya besar yang mencerahkan dan dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan negara, sehingga bangsa ini dihargai oleh bangsa lain di dunia. Kemerdekaan dan kebebasan yang kita miliki harus menjadi jalan bagi kemajuan masyarakat dan bangsa di segala bidang kehidupan.

Kebebasan yang kita nikmati jangan diarahkan untuk hal-hal negatif yang merugikan diri dan bangsa ini. Kebebasan jangan dimaknai bebas untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang bertentangan dengan moralitas, agama, dan cita-cita bangsa. Kebebasan bukanlah bebas mengumbar kebencian dan fitnah di media sosial. Kebebasan bukan juga seenaknya terlibat dalam pergaulan bebas yang tanpa batas. Kebebasan juga bukan bebas terlibat dalam sindikat mafia pengedar narkoba. Dan kebebasan jangan sampai disalahartikan.

Kemerdekaan yang telah melahirkan kebebasan adalah anugerah. Ya, anugerah dari Allah SWT agar kita menjaganya dan menggunakannya untuk kemajuan bangsa ini. Orang yang merdeka akan bebas melakukan hal-hal yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa ini ke depan. Tanpa kemerdekaan dan kebebasan tak akan ada kemajuan. Tanpa kemerdekaan dan kebebasan tak akan ditemukan karya-karya besar yang dapat menginspirasi banyak orang. Tanpa kemerdekaan dan kebebasan

tak akan ada kesejahteraan. Dan tanpa kemerdekaan tak akan ada kemuliaan.

Jika merdeka sekedar merdeka, maka burung-burung terbang di langit pun merdeka. Jika merdeka sekedar merdeka, cacing-cacing di tanah pun merdeka. Merdeka bukan sekedar merdeka. Tapi merdeka lahir dan batin. Merdeka jiwa, raga, dan pikiran. Merdeka dari kejumudan dan keterbelungguan fikiran dan tindakan. Merdeka dari ketakutan dan kekhawatiran. Merdeka dari janji-janji kampanye yang tanpa realisasi. Merdeka dari segala bentuk kesulitan hidup. Dan merdeka dari fitnah dan nyinyiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Merdeka haruslah berkorelasi positif dengan keamanan dan kesejahteraan. Buat apa merdeka jika masih hidup miskin. Buat apa merdeka jika masih menunggak banyak hutang. Buat apa merdeka jika otak dan pikiran masih terbelenggu. Buat apa merdeka jika masih terikat dengan pekerjaan atau atasan. Buat apa merdeka jika masih berjiwa kerdil. Buat apa merdeka jika masih hidup bergantung pada orang lain. Dan buat apa merdeka jika kita masih hidup dalam ketidakpastian. Merdeka adalah kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dan berbuat yang terbaik untuk republik ini.

Kemerdekaan sejatinya membebaskan, mencerahkan, memuliakan, membangkitkan, membesarkan, menciptakan kehidupan yang membahagiakan dan mensejahterakan, menjaga kesetiakawanan, menghormati karya nyata yang lahir dari masyarakat pinggiran, membongkar pikiran picik, kerdil, dan sempit menjadi berpikir dan berjiwa besar, mengagungkan Tuhan sebagai pemberi kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan

dengan cara menjaga dan melakukan hal-hal yang positif. Dan berkarya terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara.

Kemerdekaan yang tidak membebaskan bagaikan burung yang berada dalam sangkarnya. Bagaikan ikan yang berada di aquarium. Bagaikan raja hutan (macan) di kebun binatang. Bagaikan itik dalam kardus. Bagaikan kambing dalam kandangnya. Bagaikan kupu-kupu dalam rumahnya. Dan bagaikan kerbau yang ditindik hidungnya. Bebas tapi terbatas. Bebas tapi tidak merdeka. Bebas tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemerdekaan haruslah membebaskan. Membebaskan dari segala hal yang membelenggu hidup dan kehidupan.

Merdeka atau mati itu adalah pilihan. Ya, pilihan anda dan kita semua. Jika kita sudah merdeka dan memilih untuk tetap merdeka, maka kemerdekaan harus juga mencerahkan kehidupan kita dan orang lain. Jangan sampai kita merdeka, bebas secara finansial, memiliki jabatan dan karir yang bagus dalam pekerjaan, tetapi tetangga dan teman kita masih banyak yang kesulitan, namun kita tidak membantu dan membebaskan dari kesulitannya. Artinya kita merdeka tetapi belum bisa memerdekakan dan mencerahkan orang lain.

Kemerdekaan bukan hanya milik pribadi atau individu. Tetapi kemerdekaan harus dinikmati bersama. Bersama seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan ada rakyat yang miskin, tetapi dibiarkan. Bodoh, tetapi tidak dibeasiswa dan sekolahkan. Pengangguran, tetapi tidak diberi pekerjaan. Jumawa, tetapi tidak diingatkan. KKN, tetapi dibiarkan. Kemerdekaan harus mencerahkan, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Bangsa ini membutuhkan rakyat dan pemimpin yang berjiwa merdeka. Merdeka dari tekanan dan campur tangan pihak asing. Merdeka dari impor barang-barang dari luar negeri. Merdeka dari penghisapan Sumber Daya Alam (SDA) oleh pihak luar. Merdeka dari hutang negara donor. Merdeka dari penjajahan ekonomi dan politik yang sedang menimpa bangsa ini. Buktikan bahwa kita adalah orang yang merdeka. Dan buktikan juga bahwa negara kita adalah negara yang merdeka.

Kemerdekaan harus membawa optimisme bagi rakyat, bangsa, dan negara. Bahwa kita masih memiliki kesempatan dan peluang menjadi negara besar. Menjadi negara yang disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Namun itu semua bergantung pada kita. Bergantung pada seluruh rakyat Indonesia. Bergantung pada kita dalam mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif, produktif, kreatif, dan inovatif sehingga menghasilkan karya-karya yang dapat dibanggakan. Bukan hanya di dalam negeri. Tetapi juga di tingkat internasional.

Pilihannya ada pada kita. Ya, ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita akan memilih hidup merdeka dengan berbuat yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Atau pilihannya sebaliknya, bermuram durja, berduka, dan berleha-leha. Jika itu yang menjadi pilihan anda, maka siap-siaplah untuk mati. Mati terbelenggu oleh rasa pesimis, kejumudan yang tanpa pergerakan, dan mati karena bermalas-malasan. Merdeka atau mati itu menjadi hak dan pilihan Anda. Pilihlah menjadi orang yang merdeka, agar hidup kita bahagia.

Ulama Juga Manusia

AKHIR-akhir ini ulama menjadi rebutan para capres untuk digandeng menjadi cawapres pada kontestasi Pilpres 2019. Ulama memiliki peran besar dari zaman pra kemerdekaan hingga saat ini dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Peran besar ulama yang begitu besar terhadap bangsa ini, ditambah lagi dengan memiliki banyak pengikut membuat ulama memiliki daya tawar yang tinggi di politik.

Apalagi sejak gerakan 212 mampu menghadirkan jutaan umat Islam dalam aksi damai yang dapat menjatuhkan Ahok dari tampuk kekuasaan dan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Dan bahkan dapat mengantarkan Ahok ke penjara. Peran ulama yang begitu besar menjadikan ulama tidak lagi dipandang sebelah mata. Apalagi sampai dinafikan dan dinihilkan dalam konteks politik Indonesia.

Peran ulama yang begitu penting dan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dengan sendirinya para ulama tersebut menikmati buah perjuangan dan kerja kerasnya. Banyak para ulama yang merasa “dikriminalisasi” oleh kekuatan negara untuk melemahkan gerakan-gerakan mereka yang selama ini

berani kritis dan tampil berhadap-hadapan dengan pemerintah. Banyak ulama yang “terluka” dan jika tidak segera diobati, maka luka itu bisa semakin dalam dan dapat merugikan pemerintah.

Kepemimpinan ulama dalam masyarakat dan bernegara sudah tidak diragukan lagi. Ulama dapat menjadi penyambung lidah rakyat, menyuarakan amar ma’ruf dan nahi munkar, memberi teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, mengangkat harkat dan martabat umat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, dan berorientasi akhirat, sambil tidak melupakan urusan dunia dan politik.

Bagi ulama, urusan politik adalah urusan dunia yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan akhirat. Urusan politik tidak bisa dipisahkan dengan agama. Dan agama harus menjadi pijakan dan panduan dalam berpolitik. Politik tanpa agama, hanya akan melahirkan politisi yang berpolitik tanpa nilai dan moralitas. Melahirkan kekuasaan yang pongah dan menindas. Dan akan melahirkan dan menghadirkan politik yang cenderung menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Politik tanpa agama akan rusak, sesat, dan menyesatkan. Namun jangan jadikan agama sebagai alat politik.

Dalam demokrasi yang seleksi kepemimpinannya dipilih langsung oleh rakyat (direct democracy) ulama menjadi rebutan para capres untuk dijadikan cawapres. Pada Pilpres 2004, dua ulama yaitu Hasyim Muzadi dan Solahudin Wahid menjadi cawapres yang mendampingi Megawati dan Wiranto. Walaupun tidak menang, namun sudah membuktikan bahwa ulama dibutuhkan bukan hanya sebagai vote getter tetapi juga sebagai representasi tokoh agama yang diperhitungkan dalam konteks politik Indonesia.

Tidak jauh berbeda dengan Pilpres 2004 yang sudah lama berlalu. Pilpres 2019 juga menghadirkan figur ulama yang dipilih untuk menjadi cawapres. Seperti kita tahu, Ma'ruf Amin seorang Ketua MUI dan Rais 'Am PBNU dipilih Jokowi menjadi cawapres di detik-detik akhir, setelah menyingkirkan Mahfud MD yang sudah digadang-gadang Jokowi untuk menjadi cawapresnya.

Dan sebelumnya Ustadz Abdul Somad (UAS) juga sempat santer digadang-gadang untuk mendampingi Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Namun karena kerendahan hati UAS yang ingin bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, UAS pun tidak jadi mendampingi Prabowo. Dan dengan drama politik di the last minute, akhirnya Prabowo pun memilih Sandiaga Uno menjadi cawapresnya.

Dukungan deras kepada UAS untuk menjadi cawapres Prabowo sangat terasa di jagat media. Itu pun masih terasa ketika saya diundang menjadi narasumber di iNews TV (31/7) dan diminta untuk mengomentari ramainya dukungan UAS untuk menjadi cawapres. Dan saya pun dengan tegas menjelaskan, bahwa UAS sebagai ulama yang dicintai umat harus fokus berdakwah demi kebangkitan umat dan kejayaan bangsa. Tidak harus menjadi cawapres jika ingin membangun umat, bangsa, dan negara.

Banyak yang tidak setuju dengan komentar saya karena saya dianggap menghalangi UAS untuk jadi cawapres Prabowo dan saya dianggap mendukung kubu sebelah. Alhamdulillah komentar saya pun terbukti. UAS tidak bersedia menjadi cawapres Prabowo dan memilih untuk fokus di bidang pendidikan dan dakwah. Saya tidak menghalangi UAS atau

ulama yang lain berpolitik. Silakan berpolitik dan itu sebuah panggilan dan merupakan keniscayaan. Namun ulama juga manusia. Jika tidak hati-hati dalam berpolitik bisa jadi korban. Atau bahkan dikorbankan.

Ulama juga manusia. Ya, ulama juga manusia. Punya hasrat untuk berkuasa. Dan itu tidak salah. Kekuasaan di tangan ulama yang baik bisa memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun yang harus ditampilkan adalah ulama yang ahli agama dan juga ahli pemerintahan. Jangan ulama sekedar ulama yang tidak mengerti politik dan tata kelola pemerintahan. Karena sesuai sabda Rasulullah SAW, jika suatu urusan tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya, tunggulah kehancurannya.

Ulama juga manusia. Punya salah dan dosa. Kita tidak pernah meragukan keahlian ulama dalam bidang agama. Kita juga tidak pernah mempermasalahkan ulama untuk berpartisipasi dalam politik. Kita juga tidak pernah berprasangka negatif kepada ulama-ulama yang berpolitik dengan menggadaikan agama untuk kepentingan politik sesaat. Kita juga tidak menuduh ulama berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Kita hormat dan ta'zim pada ulama yang masih berjuang dan bergerak dengan ikhlas dalam membela agama Allah SWT dan menjaga NKRI agar tetap utuh.

Ulama juga manusia punya rasa dan punya hati. Menurut Imam Ghazali (2016), ulama itu ada dua. Ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia merupakan ulama yang berjuang untuk kepentingan dunia. Dan ulama seperti ini tidak harus diikuti perkataan dan perilakunya. Ada juga ulama akhirat yang berjuang dan bergerak untuk kepentingan akhirat, namun juga

tidak meninggalkan urusan dunia. Urusan dunia termasuk urusan politik digunakan sebagai alat untuk kebaikan sesama sehingga menghasilkan nilai kebaikan di akhirat kelak.

Ulama dunia bisa saja cinta dunia dan cinta kekuasaan. Dan itu tidak bisa disalahkan. Karena ulama juga manusia. Butuh dunia dan kekuasaan. Butuh panggung, butuh penghormatan, butuh rupiah, butuh penghargaan, butuh dicintai, butuh eksistensi, butuh atribut-atribut dunia yang lainnya. Namun sebaik-baik ulama. Ya ulama akhirat. Ulama yang dapat menuntun kita kejalan yang lurus. Ulama yang dapat membimbing umat dan kita semua untuk kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.

Berkorban untuk Bangsa dan Negara

RABU (22/8) kemarin kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1439 H atau dikenal juga dengan Hari Raya Idul Qurban. Gema takbir menggema di seluruh pelosok nusantara. Hari Raya Idul Qurban memantik harapan agar setiap orang bisa berkorban sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Idul Qurban bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah SWT. Tetapi juga harus mampu merefleksikan sikap berbagi kepada sesama manusia. Terlebih-lebih kepada kaum papa.

Idul Qurban yang kita laksanakan setiap tahun jangan hanya dijadikan ritual keagamaan yang tanpa makna dan arti. Namun harus merefleksikan dan menggerakkan spirit berkorban kepada sesama. Idul Qurban sejatinya menjadikan kita semua mampu dan rela berkorban jiwa, raga, dan harta untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berqurban bukan hanya berqurban dengan hewan ternak yang terbaik yang dagingnya dibagikan untuk masyarakat miskin. Berqurban harus berdimensi luas. Bukan hanya berqurban kambing atau sapi lalu beres. Namun sejauh mana pengorbanan kita untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Apakah

kita sudah benar-benar berkorban untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Spirit berkorban harus menemukan momen terbaiknya. Saat inilah momentum terbaik agar kita bisa berkorban untuk membantu kaum dhuafa dan miskin. Membantu negara yang sedang dirundung banyak hutang. Berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan berkarya terbaik untuk kemaslahatan umat, masyarakat, bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini, spirit berkorban pejabat dan rakyat terhadap negaranya semakin hari-semakin menipis. Banyak pejabat di negeri ini yang hanya mementingkan jabatan demi kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sehingga yang terjadi adalah merajalelanya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang salah satunya disebabkan politik dinasti. Perputaran kekuasaan dan uang hanya terjadi di sekitar orang-orang tertentu. Tidak terdistribusi kepada masyarakat luas.

Masyarakat cenderung hanya menjadi korban. Dan bahkan dikorbankan karena ambisi kekuasaan para pejabat yang sering menggasak uang rakyat. Uang rakyat dikorupsi sehingga masyarakat tidak merasakan nikmatnya kue pembangunan dan kesejahteraan. Yang diterima rakyat hanya janji-janji politik. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat tetap miskin dan bodoh. Masyarakat hanya menjadi korban dari keserakahan dan keangkuhan pejabat-pejabat korup.

Kita ingin menyaksikan bagaimana para pejabat di republik ini bahu membahu berkorban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa dan negara. Jika para pejabatnya memiliki mental melayani dan bermental rela berkorban, maka

bangsa ini tidak akan terbelakang lagi. Republik ini pasti sudah maju dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa ini tak akan miskin lagi. Bangsa ini kaya, sudah sepatutnya dan selayaknya rakyat menikmati kekayaan yang ada di perut bumi nusantara tercinta ini.

Sepertinya kita abai atau kurang peduli terhadap jiwa berkorban. Padahal sejatinya dengan jiwa berkorban yang ikhlas akan ditemukan sebuah kemajuan-kemajuan yang gemilang. Seandainya para pejabat sedikit saja memiliki kepedulian untuk sama-sama menyelesaikan hutang negara yang sudah membumbung dengan cara memotong gaji dan iuran. Seperti yang terjadi di negara tetangga. Paling tidak bangsa ini akan mampu melunasi hutang secara perlahan. Dan jika beban hutang sudah susut dan sedikit, maka bangsa ini bisa membangun untuk menatap masa depan yang cerah dan gemilang.

Berkorban memang mudah diucapkan. Tapi sulit direalisasikan. Mudah digosipkan. Tapi sulit diimplementasikan. Mudah diumumkan. Tapi sulit untuk dilakukan. Berkorban memang membanggakan. Namun sedikit sekali yang melakukan. Berkorban harusnya menyenangkan. Tapi terkadang dilupakan. Berkorban sejatinya menjadi keharusan. Tapi faktanya dilupakan. Dan berkorban sejatinya menjadi kewajiban. Bukan keterpaksaan.

Jika Bung Hatta sang proklamator saja mampu berkorban untuk bangsa dan negaranya dengan tidak mau melakukan korupsi. Walau sebuah amplop. Ya, sebuah amplop. Dan pengorbanan Bung Hatta dikenang hingga kini. Pengorbanan Hatta seharusnya melahirkan spirit anti korupsi dalam diri

pejabat dan birokrasi. Bukan malah sebaiknya menggasak uang rakyat tanpa kendali dan peduli.

Berkorban untuk bangsa dan negara tidak harus dilakukan dengan cara-cara besar, gemilang, dan membahana seantero negeri. Berkorban demi bangsa dan negara bisa dilakukan dengan cara melakukan hal-hal kecil. Membela orang yang tertindas dan terdzolimi adalah berkorban. Memberi makan orang miskin adalah berkorban. Membantu orang lain menyebrang jalan adalah berkorban. Menaiki tiang dan memperbaiki tali bendera sehingga sang Saka Merah Putih tetap berkibar ala Joni adalah berkorban. Dan masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengorbanan terhadap bangsa dan negara.

John F Kennedy (2006), terkenal dengan pidatonya, ketika ia dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, diusia 43 tahun, pada 20 Januari 1961. Kutipan pidato tersebut berbunyi, “Jangan tanya apa yang bisa dilakukan negara untukmu, tanyalah apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu”. Sebuah pernyataan yang keren dahsyat. Sehingga kata-kata tersebut masih menjadi rujukan hingga kini. Rujukan dalam membangun kesadaran agar bisa berkontribusi terbaik untuk negara.

Di zaman now, berkorban bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan. Tapi berkorban sudah dibalut dengan kepentingan. Banyak yang mau berkorban. Namun diiringi rasa riya dan berkelindan kepentingan politik. Ada yang mau berkorban. Tapi bersyarat. Ada yang mau berkorban. Namun butuh suara pemilih. Ada yang mau berkorban dan berbagi. Tapi bermotif politik. Ada yang berkorban. Tapi hanya untuk dilihat agar dianggap dermawan, baik hati, dan mempesona orang lain.

Berkorbanlah dengan segenap jiwa raga. Berkorbanlah dengan ikhlas dan hati yang bersih. Berkorbanlah untuk bangsa dan negara. Berkorbanlah untuk republik tercinta. Berkorbanlah demi rakyat yang masih banyak yang menderita. Berkorbanlah demi kebaikan. Berkorbanlah demi sang saka merah putih. Berkorbanlah demi persatuan dan kesatuan. Dan berkorbanlah untuk membawa Indonesia dan dunia menuju kedamaian.

Rasa berkorban harus terus ditumbuhkan. Bahkan harus tetap dijaga dan direalisasikan. Bangsa ini bisa merdeka pada 17 Agustus 1945, sekitar tujuh puluh tiga (73) tahun yang lalu karena founding father dan para pahlawan berkorban dengan segenap jiwa, raga, harta, dan benda demi berdirinya Indonesia tercinta. Pengorbanan mereka jangan sampai sia-sia. Pengorbanan mereka jangan sampai dibalas dengan air tuba. Dan pengorbanan mereka jangan sampai kita khianati.

Berkorban demi bangsa dan negara merupakan keniscayaan. Ya, keniscayaan bagi kita semua. Buktikan bahwa kita adalah warga negara yang taat atas perintah Allah SWT. Dan juga berani berkorban untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jika tidak sekarang kapan lagi. Jika bukan kita kita yang berkorban siapa lagi. Berkorbanlah selagi bisa. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan.

Untung-Rugi #2019GantiPresiden

ISU #2019GantiPresiden tidak pernah sepi. Menjadi isu seksi dan panas menjelang perhelatan akbar pesta demokrasi Pilpres 2019. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, isu #2019GantiPresiden di Indonesia merupakan isu biasa. Isu yang akan selalu muncul pada setiap Pemilu. Namun isu #2019GantiPresiden akan menjadi isu dan gerakan yang luar biasa, meluas, dan besar jika dapat menuai simpati rakyat.

Hal yang wajar jika terjadi pro dan kontra atas deklarasi dan sosialisasi gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah di Nusantara. Entah karena akan merugikan sang petahana Jokowi atau menguntungkan kubu Prabowo, gerakan #2019GantiPresiden menjadi kontroversi. Dukungan dan penolakan masyarakat atas deklarasi #2019GantiPresiden harus dilihat secara objektif dan dalam rangka membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

Ketika kita sudah memilih jalan berdemokrasi sebagai sebuah pilihan. Ya, sebagai sebuah pilihan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka aspirasi masyarakat apapun bentuknya, termasuk gerakan #2019GantiPresiden harus

diberi ruang dan gerak untuk menyampaikan aspirasi di seluruh pelosok negeri. Asalkan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden dilakukan dengan tidak memfitnah, menjelakan kubu lawan, mencaci, dan melakukan tindakan anarkis.

Siapa pun yang melakukan aktivitas #2019Ganti Presiden asalkan kegiatan tersebut berjalan dengan aman, nyaman, damai, dan tanpa caci-maki, maka meski diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Negara harus menjamin kepada setiap individu atau kelompok untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Tidak boleh disumbat, dihalang-halangi, dibatalkan, dan bahkan dibubarkan. Aspirasi warga negara dijamin dalam konstitusi selama tidak merugikan pihak lain.

Deklarasi #2019GantiPresiden tentu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Jika dilihat dari kaca mata politik, sangat jelas terlihat bahwa gerakan #2019GantiPresiden akan menguntungkan Prabowo. Karena seperti kita tahu, inisiator, deklarator, dan aktivis-aktivis gerakan sosialisasi #2019GantiPresiden banyak berada di barisan Prabowo. Dan jika gerakan tersebut membesar, maka sudah barang tentu Prabowo lah yang akan menikmati manisnya perjuangan mereka.

Dalam setiap permainan politik selalu ada untung dan rugi. Dan pihak yang dirugikan jelas sangat mengarah kepada Jokowi. Ya, Jokowi sang incumbent yang sedang mengamankan kursinya di 2019 nanti. Gerakan #2019GantiPresiden dilarang, tidak diberi izin, distop, ditolak, dan bahkan dibubarkan dengan alasan keamanan. Walaupun kita sama-sama tahu, gerakan deklarasi #2019GantiPresiden jika terus menggelinding akan seperti bola salju yang dari hari ke hari akan semakin besar, jika

sudah besar tentu akan mengancam tahta dan singgasananya. Dan tentu keinginan untuk menjadi presiden dua periode bisa pupus.

Mempersempit dan menolak via masyarakat atas #2019GantiPresiden merupakan keniscayaan. Polisi dalam dilema. Bagai makan buah simalakama. Diizinkan akan membesar dan ada yang marah. Dan jika tidak diizinkan, polisi sedang mempertaruhkan profesionalitas dan netralitasnya. Bekerja demi kepentingan bangsa dan negara adalah lebih utama. Polisi adalah alat negara. Bukan alat kekuasaan. Bekerja dan bertindak profesional demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara adalah keniscayaan.

Menarik mencermati #2019GantiPresiden. Bukan saja dilihat dari siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Menurut big data, gerakan #2019GantiPresiden merupakan salah satu gerakan yang disukai masyarakat dan menjadi viral berbulan-bulan. Artinya ada indikasi sebagian masyarakat kecewa atas kenaikan listrik yang berlipat-lipat, tetapi tidak diakui pemerintah, harga-harga naik, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat melemah, dan utang negara yang membengkak.

Kekecewaan sebagian masyarakat atas kondisi negara seperti di atas menjadikan gerakan #2019GantiPresiden menjadi isu yang laku dan menarik simpati masyarakat yang memang hidupnya makin hari makin susah. Para elit memang tidak akan merasakan penderitaan rakyat kelas bawah, karena mereka sibuk dengan jabatan dan kekuasaan. Dan rakyat miskinlah yang sangat terdampak dan merasakan kesulitan hidup. Oleh karena itu, isu #2019GantiPresiden menjadi isu yang diminati masyarakat kelas bawah.

Pilkada Jawa Barat yang lalu telah sedikit memberi gambaran, bahwa gerakan #2019GantiPresiden yang dikampanyekan oleh Sudrajat-Ahmad Syaikhun menjadi isu yang menarik simpati masyarakat Jawa Barat dan melambungkan perolehan suara mereka menjadi di urutan kedua. Walaupun tidak menang dan berada di bawah Ridwan Kamil-UU. Namun yang jelas sebagian masyarakat Jawa Barat menyambut gerakan #2019GantiPresiden.

Deklarasi, sosialisasi, gerakan #2019GantiPresiden tidak akan laku dan tidak akan membesar jika saja pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi sukses mensosialisasikan keberhasilan-keberhasilan atau capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Jokowi. Gerakan #2019GantiPresiden juga tidak akan menarik simpati rakyat jika rakyat perutnya sudah kenyang. Masyarakat di negeri ini masih banyak yang miskin, masih banyak yang perutnya kosong, jangan heran jika mereka simpati dan mendukung alternatif lain yang bisa menawarkan kebijakan-kebijakan yang pro mereka. Walaupun belum terbukti.

Jangan juga menuduh kelompok dan para aktivis #2019GantiPresiden merupakan gerakan makar. Dan kita jangan asal tuduh melabeli orang lain dengan kata-kata makar. Mereka sekelompok anak bangsa yang berbeda pendapat dengan pemerintah yang ingin menyuarakan aspirasinya untuk mensosialisasikan #2019GantiPresiden. Sah dan dilindungi UU. Mereka bebas melakukan deklarasi #2019GantiPresiden asalkan dilakukan dengan cara-cara elegan, tertib, tidak merusak, dan tentu tidak bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila.

Yang dilarang dan tidak boleh itu mengkhudeta presiden. Ya, tidak boleh mengkhudeta presiden. Haram hukumnya

mengukudeta presiden. Jadi, jika sosialisasi #2019GantiPresiden dan dilakukan secara demokratis melalui Pemilu di 2019 ya sah-sah saja. Sosialisasi #2019GantiPresiden jangan dan bukan untuk mengganti presiden di tengah jalan. Tetapi mereka ingin mengganti presiden dalam rivalitas persaingan melalui Pemilu. Deklarasi dan gerakan #2019GantiPresiden sah-sah saja jika mereka menang melawan Jokowi di 17 April 2019 nanti.

Berbeda pendapat merupakan hal yang wajar. Berbeda dukungan dan pilihan juga sesuatu yang dibolehkan. Namun perbedaan pendapat, dukungan, dan pilihan jangan sampai membuat bangsa ini terpecah. Jangan sampai republik ini bercerai-berai. Perbedaan itu adalah sunatullah. Dan perbedaan juga merupakan rahmat. Jangan korbakan bangsa ini hanya untuk kepentingan pragmatisme dan kepentingan politik sesaat. Hormati masyarakat yang akan melakukan deklarasi #2019GantiPresiden. Dan hormati pula sekelompok masyarakat yang menolak mereka. Kita bersaudara. Sampai kapanpun kita tetap bersaudara.

Dalam demokrasi kebebasan dan perbedaan pendapat itu biasa. Demokrasi juga menganut faham bahwa kebebasan individu adalah suatu hal yang amat penting. Tanpa adanya kebebasan, demokrasi tidaklah perlu dan tidak dapat diselenggarakan. Dengan demikian, demokrasi menginginkan terselenggaranya pengaturan terhadap masyarakat dimana kebebasan individu dapat berkembang demi mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan (Carter, 1985: xv).

Yang mau dan menginginkan #2019GantiPresiden jangan dilarang, silakan, selama tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak merugikan orang lain. Dan yang menolak ganti presiden

juga silahkan asalkan tidak anarkis dan masih dalam koridor berdemokrasi yang sehat. Jangan mau dan jangan sampai sesama anak bangsa diadu domba. Pilpres damai menjadi dambaan kita semua. Mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Urusan #2019GantiPresiden atau tidak itu urusan rakyat. Karena rakyatlah yang menentukan. Ya, rakyatlah yang menentukan. Dan rakyat yang berdaulat. Bravo rakyat Indonesia.

BAB 3

DUKUNG-MENDUKUNG DALAM PEMILU

Gubernur Dukung Jokowi

SEMBILAN Gubernur dan Wakil Gubernur baru hasil Pilkada serentak 2018 telah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara kemarin. Tak ada yang aneh dalam prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur tersebut. Namun yang unik dan menarik, para gubernur tersebut sebelum dan sesudah dilantik sudah menyatakan diri akan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden dua periode.

Hak para gubernur, begitu juga hak para wakil gubernur untuk dukung mendukung pada Pilpres 2019 yang akan datang. Para gubernur mendukung Jokowi sah-sah saja dan tidak dilarang. Yang dilarang adalah ketika para gubernur tersebut mendukung petahana menggunakan kekuasaan, jabatan, dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye sang incumbent. Yang paling penting, rakyat tidak terpecah karena gubernurnya mendukung calon tertentu. Dan rakyatnya mendukung calon yang lain.

Banjir dan mengalirnya dukungan para gubernur, baik yang sedang menjabat maupun yang baru dilantik kemarin, merupakan fenomena politik yang wajar. Dan bukan perbuatan

kurang ajar. Bisa menjadi kurang ajar, jika para gubernur tersebut mendukung Prabowo, karena akan dianggap berbeda pilihan dan melawan petahana. Gerbong dukungan para gubernur tersebut tentu menguntungkan Jokowi sang petahana dan merugikan Prabowo sang penantang.

Dukungan para gubernur ke Jokowi bisa saja karena kecocokan visi dan misi para Gubernur tersebut dengan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, bisa dilanjutkan untuk dua periode. Atau bisa juga karena kedekatan emosional para gubernur dan partai-partai pendukungnya dengan Jokowi. Atau biasa juga karena ketika pilkada kemarin para gubernur tersebut mendapat dukungan dan sokongan dari pemerintah.

Dalam negara demokrasi, sah-sah saja para gubernur dukung-mendukung. Demokrasi memberi ruang kepada siapapun, untuk bisa memilih pemimpinnya dengan bebas. Demokrasi adalah pemilihan pemimpin-pemimpin lewat pemilihan umum yang kompetitif. Atau dengan kata lain, sistem demokratis adalah sistem yang mempraktekkan pemilihan umum yang bebas dan adil (Chee, 1994: 2). Jadi demokrasi sejatinya, diberikan kepada rakyat atau pun pejabat, untuk bisa memilih presiden dan wakil presidennya dengan jujur dan adil melalui Pemilu.

Namun yang paling berbahaya dan mengerikan, jika dukungan para gubernur tersebut disebabkan tekanan hukum dari oknum tertentu kepada mereka agar mendukung calon tertentu. Karena kita sama-sama mafhum, di Republik ini, hukum masih bisa dijadikan alat untuk menekan mereka yang berkasus “korupsi” untuk “disandera” secara politik guna kepentingan dukungan dalam pemilu. Para pejabat dan para gubernur sangat

takut akan hal ini. Dan demi keamanan dan keselamatan diri terpaksa atau dipaksa untuk mendukung calon tertentu.

Para gubernur yang memiliki kasus “korupsi” memang dalam dilema, galau, dan was-was. Bagaikan makan buah simalakama, dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu meninggal. Dua-duanya pilihan yang membingungkan. Ditekan via jalur hukum memang menyiksa. Seolah tidak ada apa-apa. Padahal was-was, suatu saat bisa masuk penjara. Jadi mendukung petahana bagi para gubernur merupakan pilihan dan tindakan rasional demi mengamankan dirinya dan tentu menyenangkan sang incumbent.

Hanya ada dua pilihan bagi para gubernur yang bermasalah secara hukum, mendukung sang incumbent atau terkena kasus hukum lalu masuk penjara. Oleh karena itu, tidak heran jika ada gubernur yang tadinya vokal, ingin jadi capres atau cawapres, tetapi setelah diperiksa KPK, dia diam seribu bahasa dan berbalik arah mendukung yang sedang berkuasa. Dan kita juga menemukan banyak gubernur yang berasal dari partai barisan koalisi Prabowo yang menyebrang dan mendukung Jokowi.

Atau bisa juga karena kebaikan petahana membantu para gubernur sehingga para gubernur merasa memiliki hutang budi, lalu balik mendukung sang petahana. Pilihan wajar dan rasional yang saling menguntungkan. Setidaknya saya teringat dengan pidato Sir Winston Churchill di Majelis Rendah, London, 20 Agustus 1940 yang mengatakan “Dalam sejarah perjuangan manusia belum pernah ada begitu banyak hutang budi yang begitu besar kepada begitu sedikit orang”. Dan hati-hati dengan hutang budi, jangan sampai dibawa mati. Mendukung kembali

orang yang telah berjasa merupakan langkah yang tepat dan penuh perhitungan.

Pilpres 2019 bukan hanya pertarungan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno semata. Namun juga menjadi ajang pengamanan dan penyelamatan bagi mereka-mereka yang memiliki jabatan di kementerian, Kejaksaan, kepolisian, TNI dan lembaga negara lainnya. Paling tidak, jika Jokowi terpilih kembali mereka akan aman dan nyaman serta kokoh dalam singgasana jabatannya. Namun jika rezim berganti dan yang terpilih Prabowo, maka otomatis mereka banyak yang akan terlempar dan akan diganti oleh pejabat yang lain. Secara teori para pejabat tersebut harus netral, namun dalam kenyataannya mereka memihak diam-diam.

Bagaimana dengan rakyat sang pemilik suara dan sang pemilik kedaulatan. Bagi rakyat siapapun yang terpilih, entah Jokowi-MA atau Prabowo-Sandi yang terpenting rakyat kenyang, tidak lapar, sembako murah, lapangan kerja terbuka, hukum ditegakkan dengan tidak tebang pilih, dan syukur-syukur rakyat bisa sejahtera dan makmur. Namun sepertinya kesejahteraan dan kemakmuran masih jauh dari angan-angan rakyat Indonesia. Tetapi kita tidak boleh pesimis dan harus tetap optimis. Walaupun aset-aset banyak dikuasai pihak swasta dan hutang negara membumbung tinggi. Namun kita tidak boleh putus asa dan kehilangan harapan. Indonesia masih bisa bangkit. Pilpres 2019 harus menjadi momentum kebangkitan bangsa.

Rakyat harus rasional dalam memilih capres dan cawapresnya. Jangan atas dasar pertimbangan siapa yang memberi “uang cendol” di hari H, lalu menggadaikan nasib selama lima tahun. Rakyat harus rasional serasional para

gubernur dalam memilih capres dan cawapres. Pilih sesuai hati nurani, pilih yang mengerti, pilih yang bisa melayani, pilih yang tidak korupsi, dan pilih yang mencintai Anda sehidup semati. Jika hanya mengumbar janji-janji, hindari dan pergi, karena yang pasti rakyat akan rugi. Bahkan bisa mati karena termakan janji-janji para capres dan cawapres.

Tak masalah dan tak apa para gubernur mendukung Jokowi dan berlawanan dengan Prabowo. Itu hak politik mereka. Justru menjadi aneh jika para gubernur tersebut tidak mendukung Jokowi. Ya, aneh jika para gubernur mendukung Prabowo. Pepatah mengatakan, ada gula ada semut. Incumbent adalah gula yang akan selalu dikerubuti semut. Petahana punya kuasa dan wibawa, jika para gubernur mbalelo dan tak mendukungnya, bisa saja mereka akan menerima akibat dari yang dilakukannya tersebut.

Gubernur dukung Jokowi merupakan urusan dan perkara kecil. Hal besar adalah bagaimana rakyat dapat menentukan sesuai hati nurani dan pilihannya. Dan tentu tidak dipaksa oleh para gubernur yang sudah memiliki pilihan sendiri. Rakyat berdaulat negara akan hebat dan kuat. Rakyat berkhidmat republik akan dahsyat. Rakyat dikhianati negara akan mati. Rakyat diberi janji tanpa realisasi, bangsa akan mati suri. Rakyat dibodohi, maka negara akan kwalat, berdosa, lalu merana. Dan rakyat punya pilihannya sendiri.

Tak penting para gubernur tersebut mendukung siapa. Yang terpenting adalah para gubernur menjaga keteladanan. Dukung mendukung dalam pilpres tidak menjadikan masyarakat bercerai berai dan terpecah. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Biarkan

para gubernur tersebut memilih dan mendukung Jokowi. Kita pun punya hak untuk memilih siapapun yang kita kehendaki. Mendukung dan memilih Jokowi-MA atau Prabowo-Sandi itu hak Anda. Namun yang pasti, Anda dan kita semua berdagang, berkerja, bertani, berlayar, bernyanyi, dan berkarya sendiri, bukan dibantu oleh capres dan cawapres itu.

Tak perlu saling mencaci. Tak perlu saling menyakiti. Tak perlu saling memfitnah. Tak perlu saling mengkhinati. Tak perlu saling beradu fisik. Tak perlu saling menolak. Dan tak perlu saling membenci. Karena seperti kata Clarence Darrow, seorang penulis, pembicara, dosen hebat dan juga pengacara kenamaan Amerika, “Saya percaya Anda tidak dapat melakukan apapun dengan kebencian”. Ya, kita tak akan bisa melakukan apapun dengan kebencian.

Politik Dua Kaki Demokrat

PARTAI Demokrat sedang galau. Bukan hanya karena tidak jadinya AHY menjadi Cawapres Prabowo. Tetapi karena khawatir Partai Demokrat yang dikomandoi oleh SBY suaranya hancur di Pileg yang pelaksanaannya berbaringan dengan Pilpres 2019. Kegalauan itulah yang membuat Partai Demokrat berbagi hati. Satu hati di Prabowo-Sandi dan hati yang lain di Jokowi-Ma'ruf.

Wajar jika Partai Demokrat membagi hati dan main dua kaki. Tidak ada yang aneh dalam politik. Permainan cinta segitiga –Demokrat, Prabowo-Sandi, dan Jokowi-Ma'ruf— dan permainan dua kaki Partai Demokrat merupakan langkah taktis, strategis, dan rasional. Taktis karena dilakukan secara cepat dalam menghadapi dinamika politik internal kader. Strategis karena memang itulah pilihan yang terbaik dalam menghadapi Pemilu serentak Pileg dan Pilpres di 2019 nanti.

Dan juga rasional karena tentu Partai Demokrat sudah memikirkannya dengan matang dan mendalam demi mengamankan dan menaikkan suara Demokrat dalam Pileg 2019 mendatang. Juga agar Partai Demokrat menjadi partai yang

masih diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Pasca AHY tidak menjadi cawapres Prabowo, Demokrat akan all out dalam pileg. Urusan pilpres itu urusan lain. Itu urusan kemudian.

Permainan berbagi cinta dan dua kaki Partai Demokrat tentu merugikan Prabowo-Sandi. Membuat kubu Prabowo-Sandi meradang. Permainan politik Demokrat yang cantik untuk melakukan bargaining politik dengan Prabowo-Sandi. Sekaligus untuk menyerang balik with soft attack atas kegagalan AHY menjadi cawapresnya Prabowo. Kegagalan tersebut telah membuat luka di hati Partai Demokrat. Oleh karena itu, wajar jika Demokrat mendua. Demokrat berbagi hati. Dan Demokrat main dua kaki.

Seperti dikatakan Khoirudin (2004), jika dilihat dari asas dan orientasi Demokrat, maka Demokrat masuk kategori partai pragmatis. Karena Demokrat tidak terikat kaku pada doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu dan situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai tersebut.

Dalam pepatah orang Barat, berlaku istilah “Do not put eggs in the same basket”. Dan itu juga sepertinya berlaku bagi Partai Demokrat. Jangan simpan telur dalam satu keranjang atau di keranjang yang sama. Jika keranjang tersebut jatuh, maka telurnya akan hancur semua. Dan jika menyimpan telur di keranjang yang berbeda, maka jika satu keranjang rusak atau jatuh, tentu telur di keranjang yang lain akan aman.

Begitu juga berlaku di dunia politik. Jangan mendukung satu pasangan calon presiden. Jika bisa dukunglah keduanya. Karena jika mendukung pasangan calon presiden tertentu lalu pasangan tersebut kalah, maka nasib politik dalam lima tahun ke depan akan

terkatung-katung, tidak jelas, bahkan akan cenderung dikerjai oleh pihak yang menang. Namun jika mendukung keduanya, siapapun yang menang dari kedua capres dan cawapres tersebut tentu akan aman.

Andai harus memilih dua kaki atau satu kaki. Tentu para politisi akan menjawab sambil tersenyum manis. Mereka pasti akan menjawab bermain satu kaki, penuh loyalitas, dan siap memenangkan calon yang sudah disepakati. Namun dalam fakta dan realitanya terkadang berbeda. Terkadang panggang jauh dari api. Ya, panggang jauh dari api. Para politisi akan main satu kaki jika sudah firm betul calon yang didukungnya akan menang. Karena sejatinya politik adalah pilihan untuk menang, berkuasa, lalu berderma untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Atau apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat merupakan tafsiran dan pengejewantahan dalam ushul fiqh yang berbunyi “Maa laa yudroku kulluhu, laa yutroku kulluhu”. Jika tidak mendapatkan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Artinya jika capres dan cawapres yang didukungnya kalah dalam Pilpres 2019 nanti, maka jangan sampai Partai Demokrat dalam pileg pun kalah dan hancur. Jadi pilihan untuk berkonsentrasi di pileg, bukan di pilpres merupakan pilihan dan strategi yang oke dari Partai Demokrat.

Demokrat tentu tidak mau bunuh diri, hancur, dan karam di Pemilu 2019 nanti. Memenangkan Prabowo-Sandi boleh setengah hati. Namun memenangkan Partai Demokrat dalam Pileg 2019 adalah harga mati. Oleh karena itu, tidak heran jika ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di beberapa provinsi dibiarkan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin,

dibiarkan tanpa disanksi. Bahkan dapat dispensasi. Sungguh enak menjadi kader Partai Demokrat. Diberi kebebasan untuk mendukung Jokowi-MA, sambil memenangkan partainya dalam pileg. Tugas berat, tapi aman dari perpecahan dan pemecatan.

Untung di Demokrat, rugi di Prabowo-Sandi. Untung karena Demokrat bisa berkreasi berbagi hati dan berbagi kaki. Dan Demokrat tidak akan mati. Sambil menyusun skema dan strategi Demokrat akan terus membuat kejutan. SBY dan Demokrat tentu tidak mau direndahkan. Demokrat punya harga diri. Bermain dua kaki dan membagi hati sudah cukup untuk mengangkat pemberitaan Demokrat di media massa. Dan sudah cukup membuat Prabowo-Sandi dalam kebimbangan.

Rugi bagi Prabowo-Sandi karena dengan Demokrat berbagi hati, maka terlihat kubu Prabowo-Sandi belum bahkan tidak sehati, tidak sejalan, dan tidak kompak. Jika hal ini terus berlanjut, maka tentu akan berbahaya bagi Prabowo-Sandi. Bahaya bisa tidak menang. Tidak ada kemenangan yang dihasilkan dari ketidakkompakan. Bersatu, merapatkan barisan, dan bergandengan tangan adalah keniscayaan bagi kubu Prabowo-Sandi. Kekompakan adalah hal utama. Jika tidak kompak bagaimana mau bicara kemenangan. Kompak dulu baru menang. Bukan menang dulu baru kompak.

Apapun pilihan Partai Demokrat tentu harus dihargai. Jangan menuduh, menghakimi, apalagi memvonis Demokrat tidak loyal. Politik adalah pilihan. Memilih mengamankan dan memenangkan Demokrat di pileg lebih penting dari apapun. Termasuk lebih penting dari kemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres. Luka Demokrat masih berbekas pasca tidak dipilihnya

AHY menjadi cawapres Prabowo. Oleh karena itu, luka tersebut harus dihapus dan disembuhkan oleh Prabowo-Sandi.

Menyembuhkan luka Demokrat sangat penting bagi kubu Prabowo-Sandi. Agar hati Demokrat bercahaya kembali dan tidak membagi. Pilihan mendua adalah pilihan terbaik bagi Demokrat saat ini. Walaupun memang Demokrat akan dianggap tidak setia. Tak ada loyalitas dalam politik yang ada kepentingan. Jika kepentingan sama, maka akan bersatu. Namun jika kepentingannya berbeda, maka akan berhadap-hadapan. Bagai Dewa Janus yang berwajah dua dalam mitologi Romawi, politik pun bisa berwajah dua. Wajah yang satu bisa di Prabowo-Sandi dan wajah yang lain bisa di Jokowi-MA.

Tak perlu risau dengan pilihan Demokrat. Itu hak mereka. Main satu kaki atau dua kaki adalah pilihan mereka. Tak ada yang salah dalam politik. Yang salah adalah ketika kita terlalu baper (bawa perasaan) atas sikap Demokrat tersebut. Selama tidak melanggar UU dan hukum apapun bisa dilakukan. Biarlah rakyat yang akan menentukan. Dan biarlah rakyat yang akan menilai sikap Demokrat tersebut. Apakah akan mendukung Demokrat ataukah akan meninggalkannya. Hanya waktu yang akan menjawab.

Taktik Demokrat Bermain Dua Kaki

TAK ada yang salah dengan taktik atau game yang dimainkan oleh Partai Demokrat. Demokrat tentu ingin menang atau paling tidak suaranya naik pada Pileg 2019 nanti. Walaupun secara institusi kepartaian, Demokrat mendukung Prabowo-Sandi. Namun para kadernya, banyak yang loncat pagar dan bermanuver mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 yang akan datang.

Pileg bagi Demokrat sama pentingnya dengan Pilpres. Karena seperti kita tahu, Pileg 2019 dan Pilpres 2019 untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini akan dilakukan bersamaan/serentak. Menang di pileg sama dengan pentingnya menang di pilpres. Pilihan Demokrat dalam mendukung Prabowo-Sandi di pilpres dan pilihan kadernya untuk mendukung Jokowi-MA, sambil all out dalam memenangkan Demokrat di pileg sudah membuat pimpinan Demokrat lega. Dan membuat kubu Prabowo-Sandi ketar-ketir.

Pasca tidak dipilihnya AHY menjadi cawapresnya Prabowo, menjadikan Demokrat tak semangat dan setengah hati dalam mendukung Prabowo-Sandi. Karena bagi Demokrat, gagalnya

AHY menjadi cawapres merupakan pembelajaran penting agar Demokrat bangkit dan tidak disepelkan. SBY dan Demokrat dianggap tak hebat lagi karena gagal mempertahankan AHY menjadi cawapres. Dan kalah oleh Sandiaga Uno. Demokrat tahu betul apa yang harus dilakukan.

Demokrat tentu tidak tinggal diam. Demokrat bergerak dalam diam. Sambil mengobati luka hati kekecewaan terhadap Prabowo yang tidak memilih AHY sebagai cawapresnya, Demokrat sedang mengatur taktik dan strategi agar Demokrat dihargai, diperhitungkan, dan berharga jual mahal. Paling tidak memiliki bargaining posisi yang tinggi di hadapan Prabowo-Sandi ataupun Jokowi-MA.

Berbagi peran antarkader adalah keniscayaan dan merupakan pilihan. Karena pencapresan Prabowo-Sandi tidak menguntungkan Demokrat, tidak ada efek elektoral bagi Demokrat. Oleh karena itu, bermain di dua kaki merupakan langkah yang tepat dan tentu menguntungkan Demokrat. Untung karena Partai Demokrat tidak pecah. Untung ada yang bermain di kubu Jokowi-MA. Dan untung karena para kader di daerah all out untuk memenangkan Demokrat di pileg. Pileg dulu urusan pilpres kemudian. Menang di pileg dulu, urusan pilpres dibicarakan kemudian.

Manuver Demokrat tentu memberatkan dan merugikan kubu Prabowo-Sandi. Pasalnya Prabowo-Sandi akan dinilai tidak mampu menjaga kekompakan, kesatuan, dan kesolidan. Kekompakan tim merupakan hal yang pertama dan utama. Jika timnya sudah tidak bersatu dan bercerai berai, maka peluang untuk bertarung melawan incumbent menjadi lemah. Dengan kesolidan akan dibangun kebersamaan. Dan dengan

kebersamaan akan tercipta kemenangan. Tak ada kemenangan yang dihasilkan dari tim yang acak kadut dan tidak kompak.

Wajah politik Indonesia selalu dihiasi dengan wajah politik dua kaki, untung-rugi, hidup-mati, kalah menang, konflik, permusuhan, pengkhianatan. Wajah politik dua kaki dalam politik Indonesia merupakan sesuatu yang biasa dan tidak aneh. Asalkan saling menguntungkan, apapun bisa dilakukan. Politik tak mengenal ada orang lain yang dirugikan, politik hanya mengenal bagaimana bisa bertahan dan menang walaupun harus main dua kaki. Dan ujung semua itu kompromi. Ya, kompromi untuk saling menguntungkan.

Dewa Janus dalam mitologi Romawi memiliki dua wajah. Dan begitu juga realita politik nasional kita menggambarkan dua wajah. Bahkan bisa menjadi banyak wajah. Wajah baik dan wajah buruk. Satu wajah bisa ada di kubu Jokowi-MA. Dan wajah yang lain bisa mendukung Prabowo-Sandi. Dan itu sudah berlaku umum dan sudah biasa dilakukan oleh para politisi. Jika pun ada politisi yang setia, itu merupakan cerminan wajah kebaikan dalam politik.

Bahkan politik di Indonesia sering menggambarkan banyak wajah. Terkadang para aktor politik berwajah banyak untuk eksis di dunia politik yang masih kotor dan penuh tipu daya. Permainan banyak wajah menjadikan politik masih diisi dan diwarnai oleh kemunafikan. Seolah-olah mendukung, padahal menikam. Seolah-olah baik, padahal menusuk. Seolah-olah setia, padahal berbagi hati dan main dua kaki. Seolah-olah cinta, padahal mengkhianati. Dan seolah-olah bersama, padahal mendua.

Jika Demokrat main di tengah, maka tak akan terlihat fungsi checks and balances dalam konstruksi jalannya pemerintahan. Sejatinya, jika tidak bergabung dengan koalisi pemerintah, maka Demokrat harus jelas menjadi oposisi. Dan jangan pernah ragu untuk berada di luar pemerintahan. Walaupun presiden sebagai pemilik kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan, namun dalam praktiknya, kekuasaan presiden tersebut diawasi oleh parlemen dalam mekanisme checks and balances (Ismatullah, 2009: 49).

Politik dua kaki atau kaki banyak merupakan realita politik yang tidak bisa terhindarkan. Siapapun para aktor politik akan terpaksa dan dipaksa untuk melakukan. Karena yang dikejar hanya kemenangan untuk mendapatkan kekuasaan, jabatan, dan uang. Karena bagi para politisi atau bagi partai politik, kekalahan adalah aib dan menyakitkan. Oleh karena itu, harus dihindari. Dan sejarah tidak pernah berpihak kepada orang-orang yang kalah. Sejarah hanya akan berpihak pada orang-orang yang menang. Menang adalah keniscayaan dan kalah adalah pilihan.

Menang adalah keniscayaan. Partai politik dibentuk dan didirikan memang untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara konstitusional dan melalui Pemilu. Kemenangan bisa saja diraih dengan cara melakukan politik dua kaki atau berbagi hati. Yang terpenting adalah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selama tidak ada yang mengharamkan, politik dua kaki sah-sah saja. Ya, walaupun memang ada yang dirugikan dan secara etika memang kurang baik.

Dalam usul fiqih dikenal dengan istilah *“Alaslu fill Asyai al Ibahah”*. Asal segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh. *“Hatta an yakuna dalillan ala tahriim”*. Bisa menjadi haram

jika ada dalil yang mengharamkannya. Taktik dan strategi dua kaki Demokrat tidak bisa disalahkan karena tidak ada aturan yang melarang. Tak diatur dalam konstitusi, UU, atau peraturan yang lainnya. Jadi berselancar dalam politik dua kaki, biasa jadi menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi para politisi dan partai politik. Walaupun terkadang menabrak etika.

Taktik dua kaki bisa menguntungkan Demokrat. Dan merugikan Prabowo-Sandi. Demokrat bisa mendapatkan SUSU (Sana Untung Sini Untung) dan juga merupakan barisan ISIS (Ikut Sana Ikut Sini). Dan permainan dua kaki wajar dan bukan sesuatu yang kurang ajar. Karena jika Demokrat tidak mendua, maka Demokrat bisa merugi. Bisa kalah di pilpres dan bisa kalah juga di pileg. Sebuah keputusan yang rasional untuk menjaga harkat, martabat, dan kemenangan partai.

Taktik dan pilihan terbaik untuk saat ini. Berdiri di dua kaki. Berbagi hati. Sambil memantapkan strategi. Taktik dua kaki terkadang harus diterapkan demi menghilangkan kegalauan kader dan menyelamatkan partai. Dua kaki why not. Yang terpenting kader Demokrat happy. Bisa bebas bermanuver untuk Jokowi-MA, memenangkan Demokrat di pileg. Walaupun memang mengecewakan Prabowo-Sandi. Dan Demokrat pun pernah kecewa pada Prabowo karena AHY tidak dipilih menjadi cawapres.

Apapun pilihan Demokrat itu hak mereka. Hak untuk bermain di kubu manapun. Jika ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan itu soal biasa. Di politik selalu ada yang untung dan juga ada yang rugi. Yang terpenting adalah bagaimana kubu Prabowo dan Sandi dalam menjaga soliditas tim. Termasuk dalam menjaga kebersamaan dengan Demokrat. Demokrat

punya pilihan. Pilihan yang tentu ujungnya untuk memenangkan Demokrat di pileg. Walaupun sedikit harus mengorbankan pilpres. Atau bisa dua-duanya, menang di pileg dan juga menang di pilpres.

Terbukti dengan manuver dua kaki Demokrat. Demokrat menjadi partai yang banyak diberitakan media dan mendapat bargaining posisi yang tinggi di mata Prabowo-Sandi. Begitu juga mendapat simpati dari kubu Jokowi-MA, karena banyak kadernya yang merapat ke sana. Soal rakyat, biar rakyat yang menentukan dan memilih. Rakyat akan menentukan apakah Demokrat naik perolehan suaranya. Atau karam karena politik dua kakinya. Hanya Tuhan dan rakyat yang tahu. Dan hanya waktu yang akan menjawab. Cobalah tanya pada rumput yang bergoyang.

KPU Kena Palu

NIAT KPU untuk melarang eks nabi koruptor menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR, DPD, dan DPRD terhalang tembok tebal. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mendapat perlawanan dari mantan nabi korupsi di sejumlah daerah. Niat KPU untuk memperbaiki kondisi bangsa dari korupsi patut dihormati, dihargai, dan didukung. Bukan hanya karena ingin menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil. Tetapi juga demi menghilangkan atau paling tidak meminimalisir korupsi di negeri ini.

Menjadi caleg memang menjadi hak bagi setiap warga negara. Termasuk hak bagi mantan nabi korupsi. Namun bangsa ini juga perlu dipagari, dijaga, dan diperbaiki dari korupsi. Korupsi merusak negeri. Korupsi musuh bangsa. Jangan lagi bermain-main dengan korupsi. Dan partai politik jangan melanggengkan korupsi. Say no to korupsi, harus menjadi gerakan moral yang menasional. Bukan basa-basi. Jangan dikotori dan diintervensi oleh siapapun.

Partai politik harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Ya, menjadi benteng terakhir dalam

membereskan korupsi. Namun saat ini, partai politik masih berkelindan dengan korupsi. Banyak kader partai yang ditangkap KPK karena korupsi. Partai yang membiarkan korupsi merajalela, tanpa berkeinginan mencegahnya, maka partai tersebut tidak layak untuk dipilih.

Memilih partai politik yang kader-kadernya banyak terlibat korupsi, sama halnya dengan melanggengkan korupsi itu sendiri. Pimpinan partai politik tidak boleh berdiam diri. Harus bergerak untuk menghindari eks nabi korupsi untuk menjadi caleg di semua tingkatan. Namun di saat yang bersamaan, mantan nabi korupsi yang masih aktif di partai, harus tetap diberi hak untuk menempati jabatan politik lainnya.

Mesti Mahkamah Agung (MA) membolehkan eks nabi korupsi untuk menjadi caleg. Dan sebelumnya juga Bawaslu meloloskan eks nabi korupsi boleh untuk menjadi caleg. Bahkan KPU juga sudah merevisi PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun KPU tetap konsisten menagih janji kepada partai politik untuk mentaati pakta integritas yang sudah disepakati antara KPU dengan partai politik peserta Pemilu 2019, untuk tidak menjadikan mantan nabi korupsi menjadi caleg.

Kegigihan dan kengototan KPU memang bagus dan patut didukung. Namun memang jika dilihat dari sistem hukum di Indonesia, sikap KPU tersebut akan mudah dipatahkan karena pelarangan tersebut hanya diatur dalam PKPU. Bukan dalam Undang-undang. Wajar jika PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut digugat oleh para eks nabi korupsi. Mereka menang bukan hanya di Bawaslu, tetapi juga menang di MA. KPU dua kali kena palu. Palu dari Bawaslu dan MA.

Menangnya eks napi korupsi berjuang menuntut haknya untuk menjadi caleg menjadi pelajaran penting dalam berdemokrasi. Demokrasi memang membuka ruang bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Termasuk kepada mantan napi korupsi untuk dipilih menjadi caleg. Apalagi MA sudah mengeluarkan putusannya. Putusan yang menguntungkan eks napi korupsi, namun menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi KPU.

Paling tidak, KPU sudah berniat menata bangsa ini ke arah yang lebih baik dengan melarang eks napi korupsi menjadi caleg. Namun memang aturan dalam PKPU tersebut lemah dan bisa dikalahkan. Keinginan KPU tidak melarang caleg eks napi juga tidak dapat restu dari Bawaslu. Termasuk restu dari MA. Bawaslu dan MA merupakan dua lembaga yang sama-sama meloloskan mantan napi korupsi untuk menjadi caleg. Dan itu hak kedua lembaga tersebut. Tentu sudah melalui kajian yang matang dan mendalam sebelum diputuskan. Bukan berdasarkan orderan.

Robert A. Dahl (1985), dalam bukunya dilema demokrasi pluralis antara otonomi dan kontrol, dengan jelas menyatakan bahwa, ada dilema yang terjadi antara persamaan antar individu versus persamaan antar organisasi. KPU sebagai sebuah institusi berhak untuk mengatur jalannya pelaksanaan Pemilu. Dan disaat yang sama, para caleg eks koruptor juga memiliki hak untuk menjadi anggota DPR RI. Dilema demokrasi yang terjadi antara KPU dengan para caleg eks koruptor, bisa selesai jika ada Undang-undang yang mengatur dan melarang para eks koruptor tersebut menjadi caleg.

Mereka mantan napi korupsi pun merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Namun demi bangsa dan negara. Demi kepentingan republik ini yang lebih besar. Demi agar korupsi dapat diberangus di negara ini. Demi untuk Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi, maka sejatinya mereka yang pernah terlibat dalam korupsi untuk tidak menjadi caleg. Walaupun mereka diperbolehkan untuk menjadi caleg oleh hukum.

Sebagian masyarakat pun menolak para mantan napi korupsi untuk menjadi caleg. Aspirasi masyarakat harus didengar dan diperhatikan oleh partai politik. Parpol harusnya tidak mencalonkan para eks napi untuk menjadi caleg. Partai tidak boleh bersembunyi dibalik hukum, lalu mencalonkan kembali kadernya yang pernah menjadi napi korupsi dengan alasan MA membolehkannya.

Membangun Pemilu yang berintegritas memang butuh perjuangan, kerja keras, dan siap untuk diperkarakan. Kita salut kepada KPU yang tetap ingin eks napi korupsi untuk tidak dicalegkan oleh partai politik. Beberapa partai politik mengikuti keinginan KPU tersebut. Namun di saat yang sama, partai-partai politik lainnya masih ngotot untuk men-callegkan eks napi korupsi.

KPU bukan hanya tak dapat restu, tetapi juga KPU kena palu Bawaslu dan MA. Bawaslu yang sesama penyelenggara Pemilu pun berbeda pendapat dan penafsiran dengan KPU. Tak sejalan, namun perbedaan tersebut harus dihargai. Sama-sama ingin membangun demokrasi yang berkeadilan. Namun dengan cara yang berbeda. Yang satu menolak dan yang satu lagi meloloskan. Tafsir Bawaslu yang meloloskan dan membolehkan

eks nabi korupsi menjadi caleg dikuatkan oleh MA. Kena palu dua kali, tidak membuat KPU lemah, tetap semangat sambil menagih partai politik untuk tidak mencalonkan eks nabi menjadi caleg.

Kita harus hormati putusan MA. Namun sepatutnya MA juga harusnya memperhatikan aspirasi rakyat yang menginginkan eks nabi korupsi untuk tidak dijadikan caleg. Namun MA memiliki pertimbangan sendiri. Walaupun pertimbangan tersebut bisa jadi tidak memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan hanya memutus berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku.

Tak dapat restu dan dapat palu dari Bawaslu dan MA menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. KPU tetap melobi dan menghimbau kepada partai politik untuk tidak menjadikan dan mencabut eks nabi korupsi dari daftar caleg. Dari awal memang PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sangat lemah untuk melarang eks nabi untuk menjadi caleg. Namun dari pada tidak sama sekali, paling tidak KPU sudah berbuat. Berbuat untuk memperbaiki bangsa, Walaupun mendapat perlawanan. Ya, perlawanan. Perlawanan itu bukan hanya datang dari eks nabi korupsi. Tetapi juga datang dari Bawaslu dan MA.

Berebut Dukungan Ulama

MENJELANG Pilpres 2019, ulama jadi rebutan. Ulama merupakan sosok alim, berpengetahuan luas, memiliki banyak pengikut, dan disegani masyarakat. Ulama terkadang menjadi tempat curhat, berkeluh-kesah, rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan dalam Islam, ulama ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Ya, pewaris para Nabi.

Karena posisinya yang mulia, tinggi, strategis dan memiliki banyak massa, ulama disapa, didekati, dirindukan, diteladani, didengar dan diikuti ucapan-ucapannya, dirangkul, dan tentu diajak dalam dukung mendukung dalam Pilpres 2019 nanti. Bukan hanya diajak, didekati, dan dirangkul, tetapi ulama juga dijadikan “pengantin” dalam pilpres dengan menjadi cawapres. Tak hanya berhenti menggaet ulama untuk menjadi cawapres. Para kandidat capres juga berebut hati dan dukungan dari ulama-ulama lainnya.

Yang lucu, aneh, dan menggelikan adalah ketika ada pendiri dan tokoh partai politik mengatakan bahwa Sandiaga

S. Uno sang cawapresnya Prabowo adalah ulama. Bisa saja karena Sandi dianggap memiliki pengetahuan luas atau sosok yang sukses sehingga bisa dianggap ulama. Sebelumnya juga ketika deklarasi pasangan Prabowo-Sandi, sang presiden PKS menyebut Sandi sebagai santri.

Begitu dengan mudahnya para tokoh partai tersebut menyebut seseorang dengan sebutan ulama dan santri. Padahal kita tahu, Sandi tidak pernah nyantri di pondok pesantren, tidak belajar ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, fiqih, ushul fiqih, mantiq, balagoh, nahwu, shorof, dan ilmu lainnya yang dipelajari oleh santri sebagai bekal hidup di masyarakat. Dan sebagai bekal untuk menjadi ulama di kemudian hari.

Menyebut Sandi sebagai ulama juga terlalu berlebihan. Walaupun Sandi berilmu pengetahuan luas, namun tidak memiliki ilmu pengetahuan agama yang mumpuni. Karena bagaimanapun dalam sosiologi masyarakat Indonesia. Ulama merupakan orang yang berwawasan luas dalam ilmu pengetahuan agama dan umum. Jika hanya karena berwawasan luas dan berilmu pengetahuan luas seseorang disebut ulama, nanti semua orang yang tidak pernah nyantri, tidak memiliki pesantren, dan tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni akan disebut sebagai ulama.

Jangan karena politik, Sandi disebut santri dan ulama. Dudukkan seseorang pada tempatnya. Jika seseorang itu santri lalu menjadi ulama. Ya, sebut orang tersebut sebagai ulama. Jika dia seorang pedagang atau pengusaha seperti Sandi, Ya, sebut saja dia sebagai pebisnis sukses. Bukan mengubah label, apalagi mengganti label dengan sebutan yang kurang tepat. Dan terkesan sebutan ulama ke Sandi dipaksakan karena kepentingan

Pilpres 2019. Jangan-jangan besok, lusa dan seterusnya muncul sebutan ulama jadi-jadian yang dilabelkan kepada seseorang karena kepentingan politik tertentu.

Tidak heran jika Sandi disebut ulama. Karena Sandi cawapresnya Prabowo. Hal ini dilakukan untuk meng-counter sang petahana yang memilih Ma'ruf Amin seorang ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama menjadi cawapresnya. Ulama bukan sebutan sesaat. Ulama bukan dibentuk dengan pragmatisme dan kepentingan politik sesaat. Ulama bukan label yang diberikan tokoh partai kepada seseorang. Ulama merupakan figur tempat bertanya dan tempat dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan masyarakat. Masyarakatlah yang menyebut seseorang dengan sebutan ulama. Bukan tokoh atau elit partai politik yang partainya mendukung orang tersebut menjadi cawapres.

Tidak heran juga jika ulama menjadi rebutan. Selain karena pemahaman ilmu agama dan umumnya yang luas dan mumpuni. Ulama juga memiliki ribuan bahkan jutaan pengikut. Oleh karena itu, almarhum KH. Zainuddin MZ disebut sebagai kiyai sejuta umat. Walaupun beliau tidak sukses dipolitik. Namun beliau sukses di dunia dakwah. Ulama zaman now seperti Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Abdul Somad juga tidak kalah hebat, mereka memiliki jutaan follower di dunia maya dan tentu jutaan pengikut di dunia nyata.

Hamka (2018), merupakan ulama serba bisa, disegani kawan dan lawan. Dicintai rakyat, umat, dan pejabat. Hamka telah menggabungkan kehebatan dalam berpolitik dan juga ketulusan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, nama dan karyanya abadi terpatrit dalam sejarah bangsa Indonesia dan dunia. Ulama hebat

seperti Hamka, harus diteladani, agar republik ini tak salah dalam mengidolakan seseorang.

Ulama ucapannya ditaati, perilakunya diikuti, nasehatnya berarti, pikirannya menembus langit dan bumi, hatinya suci – tanpa caci maki, iri dan dengki--, tulisan dan karyanya bernas, objektif, dan orisinal menembus batas, tutur katanya santun, enak didengar, dan menyejukan, terkadang keras namun tegas, mencerdaskan dan memperbaiki umat adalah kerjaannya, menata dan memperbaiki masyarakat, bangsa, dan negara adalah keinginan dan harapannya. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah motto perjuangannya.

Ulama diperebutkan merupakan hal yang biasa. Karena pada Pilpres 2004 yang lalu juga sosok ulama seperti Hasyim Muzadi dan Solahuddin Wahid menjadi cawapres. Jadi tidak aneh dan tidak heran jika pada Pilpres 2019 ulama juga jadi rebutan. Yang aneh justru jika ulama dicampakkan, dihindari, dan dikerjai. Yang aneh juga jika ulama yang mendekat dan merapat kepada sang penguasa. Ulama itu didekati, bukan mendekati, menasehati, bukan dinasehati, disegani, bukan di-bully, dinanti, bukan dikhianati, dan dicintai, bukan dibenci.

Hak para ulama untuk berpolitik. Berpolitik adalah kewajiban dan panggilan jiwa, agama, dan negara. Hak para ulama untuk dukung mendukung capres dan cawapres. Dan hak ulama juga untuk mendapatkan kekuasaan dan berkuasa. Asalkan kekuasaan yang diperoleh digunakan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Tidak untuk kepentingan pribadi, kelompok, apalagi keluarga. Silahkan ulama jadi presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR RI, dan jabatan-jabatan lainnya di Republik ini. Dengan kehadiran ulama dalam jabatan-jabatan

politik, diharapkan dapat mewarnai perpolitikan Nusantara yang sudah terlajur kotor, agar baik dan bermoral.

Selain banyak massa dan jadi rebutan kandidat capres dan cawapres, ulama juga merupakan penjaga moral. Penjaga moralitas masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, jika ulamanya rusak, maka rakyat, bangsa, dan negara juga akan rusak. Dan begitu juga sebaliknya, jika ulamanya baik, ikhlas mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, maka bangsa ini akan tetap kokoh berdiri. Bahkan menjadi bangsa yang disegani. Bukan hanya di Asia. Tetapi juga di seluruh belahan dunia.

Kesempatan para ulama untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pilpres 2019 merupakan jalannya. Jalan perjuangan, pengabdian, keikhlasan dalam memperbaiki bangsa ke depan. Saatnya ulama berbenah, rapatkan barisan, jaga persatuan dan kesatuan. Bangsa ini membutuhkan ulama yang arif dan bijaksana untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang kian hari kian kompleks. Dan harus dicarikan jalan penyelesaiannya.

Bravo ulama. Ulama beneran, bukan ulama sebutan atau jadi-jadian. Ulama baik, bukan ulama yang rusak. Ulama yang berjuang bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Ulama yang alim, namun juga tidak sombong. Baik dan rendah hati. Ulama panutan yang jadi tuntunan. Bukan ulama yang hanya sekedar menjadi tontonan. Ulama yang menggerakkan kebaikan. Bukan ulama yang membawa virus kebatilan. Ulama yang mencerahkan. Bukan ulama yang menipu apalagi mengelabui.

Kampanye Tanpa Hoaks dan SARA

MASA kampanye Pilpres 2019 dan Pileg 2019 sudah dimulai. Hampir tujuh bulan, dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019 para capres, cawapres, dan caleg akan berkampanye mengumbar janji-janji, tentu juga visi, misi, dan program-program demi meraih dan mendapat simpati rakyat. Rakyat akan diberi janji, walaupun nanti belum terbukti ketika jadi atau terpilih. Rakyat akan diberi visi, misi, walaupun nanti terkadang diingkari dan dijauhi.

Kampanye politik sangat penting bagi pasangan capres, cawapres, dan caleg. Dengan berkampanye para kontestan Pilpres 2019 dan Pileg 2019 tersebut akan menawarkan dan memberikan visi, misi, dan program-program terbaiknya. Dan masyarakat akan menilai apa yang telah dilakukannya jika dia incumbent, dan akan melihat janji-janjinya jika dia new comer (pendatang baru). Baik petahana maupun pendatang baru harus mampu menghadirkan kampanye yang berkualitas dan elegan.

Kualitas kampanye akan ditentukan oleh substansi atau isi dan cara menyampaikannya. Kampanye yang berkualitas akan menjunjung nilai-nilai kebaikan, kebersamaan, keadilan,

kejujuran, persatuan, dan kesatuan. Dan menjauhkan diri dari kampanye yang berbau hoaks dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kampanye yang berkualitas akan menghilangkan stigma dan pandangan negatif masyarakat terhadap para kontestan Pemilu yang sering melakukan kecurangan. Dan kampanye berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Bukan pemimpin abal-abal dan karbitan hasil dari kampanye hitam.

Kualitas kampanye juga akan ditentukan oleh seberapa besar mereka yang terlibat dalam kampanye tidak memproduksi isu-isu negatif. Ya, tidak memproduksi isu-isu negatif. Seperti hoaks dan SARA. Hoaks adalah musuh bangsa dan musuh kita semua. Dan isu SARA harus dihindari dan di jauhi, karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Isu-isu negatif tersebut harus dihindari demi tercipta kampanye yang aman, damai, berkualitas, elegan, dan mencerahkan. Bahkan kampanye yang baik dan berkualitas dapat menjadi hiburan bagi masyarakat.

Stop kampanye yang memprovokasi, mengolok-olok, membenci, mencaci, dan memaki. Hadirkan kampanye yang menenangkan, menyejukan, mendamaikan, mencerdaskan, dan menginspirasi agar masyarakat simpati, menyayangi, dan peduli. Lalu memilih sesuai hati nurani. Masyarakat sudah cukup cerdas melihat dan menilai mana capres dan cawapres, juga caleg yang penuh ide dan gagasan segar dan melakukan kampanye yang berkualitas dan mana yang tidak.

Era teknologi informasi yang begitu booming dan massive seperti saat ini, memberikan kesempatan dan peluang kepada para kontestan Pilpres 2019 dan Pileg 2019 untuk berkampanye

melalui udara. Salah satunya melalui media sosial. Dan jika kita amati, media sosial di republik ini banyak diisi oleh konten-konten yang negatif, provokatif, saling menyerang, mem-bully, memfitnah, mengolok-olok tanpa sensor. Dan jika ini dibiarkan, maka ruang udara di negara tercinta ini akan diisi dan dipenuhi dengan ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks.

Momentum kampanye merupakan momentum terbaik bagi para kontestan Pemilu untuk mengimbangi dan melawan berita-berita negatif dan provokatif yang sudah terlanjur mengisi ruang media sosial Indonesia. Berkampanye yang baik dan positif merupakan bagian dari perjuangan untuk kampanye melawan hoaks dan SARA. Hoaks dan SARA tidak mungkin dan jangan dibalas dengan hal yang serupa. Tetapi harus dibalas dengan menghadirkan kampanye yang berkualitas, menyehatkan, menyenangkan, dan mendamaikan.

Menurut Arnold Steinberg (1981), kampanye politik modern adalah strategi atau cara yang digunakan masyarakat dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan menang dan memerintah mereka. Sedangkan politik adalah praktik atau pekerjaan menjalankan urusan politik, yaitu mencari atau melaksanakan kekuasaan dalam urusan pemerintahan. Jadi kampanye politik dilakukan untuk menarik simpati publik dan agar partai politik mendapatkan kekuasaan.

Pesta demokrasi terbesar lima tahunan pilpres dan pileg harus menyenangkan, membahagiakan, dan menghibur. Bukan menjadi Pemilu yang menakutkan. Jangan hanya gara-gara pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan anggota DPR/DPD/DPRD, persatuan dan kesatuan dikorbankan.

Kebersamaan dinafikan. Kejujuran diperjualbelikan. Kemunafikan dikelola dan dipertahankan. Hoaks dan SARA diproduksi. Dan kebencian dan fitnah dikembangkan.

Tak ada pilihan. Berkampanyelah dengan cara-cara elegan dan mencerahkan. Bukan kampanye yang mengadu-domba, memprovokasi, dan memutar balikan fakta. Kampanye yang sederhana tapi mengena, tidak harus mahal dan gombal. Kampanye dengan program-program yang pasti, bisa diukur, dan dapat direalisasikan. Bukan kampanye yang berbusa-busa, membual, penuh kebohongan, dan tipu daya.

Rakyat sudah lelah dan capek dengan janji-janji kampanye. Dari pemilu ke pemilu rakyat selalu disuguhi dan dijejali janji-janji. Rakyat ingin bukti dan realisasi. Pemimpin yang berjanji lalu menepati. Dia merupakan sebaik-baik pemimpin. Dan pemimpin yang ingkar janji, dia termasuk seburuk-buruk pemimpin. Siapapun pemimpin itu. Dan dari manapun asal pemimpin itu. Tak penting calon nomor 01 atau 02, yang terpenting mereka bisa membuat rakyat kenyang dan senang. Tak penting nomor 01 atau 02, yang penting mereka bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.

Bagi calon pemimpin atau pemimpin yang ingkar janji. Berjanji muluk-muluk dalam kampanye. Namun ketika sudah jadi atau terpilih lupa akan janji-janjinya, maka pemimpin tersebut dapat digolongkan menjadi pemimpin munafik. Rasulullah bersabda, "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara, dia selalu berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia khianat". Dan bangsa ini tidak banyak berubah, karena banyak pemimpin-pemimpin kita bersikap munafik.

Berbeda antara kata dan perbuatan. Tidak padu padan antara ucapan dan perilaku. Apa yang di depan berbeda dengan apa yang di belakang. Apa yang dijanjikan dalam kampanye diabaikan ketika sudah terpilih. Berapi-api dalam berjanji, namun nir-realisis. Mendekat rakyat ketika kampanye dan menjauh ketika sudah terpilih. Berjanji layaknya orator terbaik di republik ini, namun kosong dalam implementasi. Bagai Dewa Janus yang dalam mitologi Romawi memiliki dua wajah. Para politisi sering menampilkan dua wajah baik dan buruk secara bersamaan. Bisa saja ketika berkampanye di atas panggung penuh kebaikan. Namun setelah turun panggung bisa menampilkan wajah kejahatan.

Tak perlu membodohi rakyat dengan janji-janji kampanye yang muluk-muluk, bombastis, cetar membahana, dan seolah-olah menjadi janji kampanye terbaik di Indonesia dan dunia. Rakyat Indonesia sungguh-sungguh sangat sederhana dalam berfikir, mereka butuh nasi dan roti bukan korupsi, butuh bukti, bukan janji, butuh kasih sayang bukan belas kasihan, butuh sembako murah, bukan harga mahal dan impor beras, butuh lapangan pekerjaan, bukan impor tenaga kerja dari luar, butuh recehan, bukan dolar, dan butuh kearifan pemimpinnya, bukan kemunafikan.

Kampanye ya kampanye saja. Jangan membodohi, membual, menjelek-jelekan, mengolok-olok, memfitnah, membenci, menebar isu SARA, mengadu-domba, memproduksi hoaks, menyinggung, menyingkirkan, membolak-balikan keadaan, memprovokasi, mencari-cari kesalahan, membusuk-busuki, mengkhianati, menggelorakan permusuhan, menolak pencerahan, berkonflik dan beradu fisik, dan jangan meman-

manasi situasi dan keadaan yang sudah kondusif menjadi chaos. Dan berkampanyelah dengan penuh kecerdasan dan kejeniusan.

Capres, cawapres, dan caleg yang cerdas tentu akan berkampanye dengan cerdas pula. Dan tak usah khawatir, masyarakat akan memilih berdasarkan visi, misi, dan program yang dikampanyekan. Bukan berdasarkan “uang cendol” atau pemberian di hari hari pencoblosan. Jika pun masih ada rakyat, yang masih menerima pemberian dari para kontestan pilpres dan pileg, itu karena rakyat perutnya masih kosong, lapar, dan belum tercerahkan. Rakyat tidak mau dan tidak akan menggadaikan idealisme hanya gara-gara “uang cendol”. Karena rakyat paham, jika salah pilih, dalam lima tahun kedepan rakyat akan sengsara dan nestapa.

Rakyat sudah cukup cerdas dalam memilih. Jadi kampanye ya kampanye saja. Jangan berteriak-teriak, berbohong, dan membual. Kampanyelah dengan kejujuran. Bukan dengan tipuan. Dengan kesederhanaan, Bukan dengan kemewahan. Dengan kesantunan. Bukan dengan makian. Dengan kelembutan. Bukan dengan kekerasan. Dengan niat baik. Bukan dengan hati busuk. Dan dengan kecintaan. Bukan dengan kebencian.

Bangsa ini dibangun dengan perjuangan air mata dan darah para pahlawan. Jangan dihancurkan dengan kampanye-kampanye dan janji-janji yang tidak bermutu, penuh fitnah, kebencian, dan hoaks. Kampanye damai adalah keniscayaan. Karena rakyat di republik ini cinta akan kedamaian. Jangan penuhi kampanye dengan kebohongan dan kemunafikan. Karena rakyat pasti tahu siapa yang berjuang sungguh-sungguh untuk rakyat dan mana yang hanya berpura-pura memperjuangkan nasib rakyat.

BAB 4

DINAMIKA DEMOKRASI DALAM PILPRES

Demokrasi Up and Down

MENJADI negara demokrasi tak semudah membalik telapak tangan. Perlu perjuangan sesama anak bangsa agar demokrasi di Indonesia berjalan on the track. Perjalanan demokrasi berjalan fluktuatif, up and down, maju mundur, pasang surut, dan penuh dinamika. Demokrasi sejatinya segar dan senafas dengan kebebasan. Kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, mengkritik siapapun, dimanapun, dan kapanpun, termasuk dalam mengkritik penguasa. Demokrasi juga meniscayakan perbedaan pendapat. Berbeda pendapat dalam alam demokrasi merupakan kewajaran.

Perbedaan pendapat dalam menyikapi kasus Ratna Sarumpaet menjadi ujian bagi demokrasi. Karena sejatinya demokrasi tidak dikotori dan lumuri oleh hoaks dari kaum oposan. Mengkritik dan menuduh pemerintah dengan berita yang kebenarannya diragukan, apalagi berlandaskan berita bohong, tentu sangat merugikan bagi sang pengkritik. Bukan menjadi amunisi yang mematikan, sekali tembak langsung mati, namun seperti menembak dengan peluru kosong, bahkan seperti senjata makan tuan. Mengkritik lalu berbalik.

Kebohongan yang sudah diakui Ratna Sarumpaet merupakan pernak-pernik, dinamika, up and down dalam berdemokrasi. Demokrasi jangan diisi dengan cara-cara kotor, manipulasi, dan kebohongan. Demokrasi yang berlandaskan dan mengacu pada hoaks akan menjadikan demokrasi kehilangan jadi diri dan terkebiri. Demokrasi jangan dikacaukan dengan berita hoaks. Sengaja atau tidak sengaja, berita bohong Ratna Sarumpaet bukan hanya merugikan dirinya, tetapi merugikan Prabowo sebagai calon presiden dan rakyat Indonesia yang menerima hoaks tersebut.

Siapa pun boleh kritis. Siapa pun boleh keras dalam mengkritik. Namun jika narasi yang dikembangkan adalah hoaks, maka demokrasi dalam pertaruhan. Kualitas demokrasi bisa menurun, karena bukan narasi objektivitas yang dikembangkan. Kasus Ratna Sarumpaet harus menjadi kasus pertama dan terakhir dimana para tokoh atau aktivis jangan seenaknya bicara. Jangan seenaknya berbohong. Jangan seenaknya menebar hoaks. Dan jangan seenaknya mengumbar pernyataan yang tak berdasar. Demokrasi harus dibangun dengan nilai-nilai kebenaran.

Dalam demokrasi, siapa pun boleh mengkritik orang lain. Termasuk dibolehkan untuk mengkritik pemerintah. Demokrasi sifatnya interpretatif, sehingga setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai negara demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip nilai dasar demokrasi (Suhelmi, 2001: 297). Walaupun sifatnya interpretatif, namun demokrasi masih dianggap sebagai sistem politik terbaik. Karena dapat memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk bisa mengkritik siapa pun.

Namun kritik tersebut dibatasi oleh norma-norma hukum. Agar kritik tidak kebablasan.

Kita tahu Ratna Sarumpaet merupakan bagian dari tim nasional Prabowo-Sandi. Jadi tindakan Ratna Sarumpaet pasti akan berdampak pada citra baik Prabowo-Sandi. Apalagi kubu Prabowo-Sandi bersuara lantang menuduh penguasa melakukan cara-cara kotor untuk membungkam para aktivis yang keras mengkritik pemerintah. Bukan simpati yang didapat Prabowo-Sandi, tetapi empati, karena dianggap ikut serta menyebarkan berita hoaks. Walaupun Prabowo dan Ratna Sarumpaet sudah meminta maaf. Namun publik sudah terlanjur muak dengan berita hoaks tersebut.

Menuduh rezim berkuasa harus dengan data dan fakta. Jika tidak, maka akan sia-sia dan percuma. Jangan mengkritik berdasarkan pada asumsi dan kebohongan hasil laporan orang. Perlu klarifikasi dan verifikasi. Bagaimanapun penguasa yang dikritik punya instrumen untuk membungkam kritik. Demokrasi mengajarkan kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas tapi bertanggung jawab. Bebas tapi penuh kreativitas. Bebas tapi waras. Bebas tapi sesuai koridor hukum. Bebas untuk menjadi apapun yang kita inginkan. Dan bebas untuk mengkritisi siapapun di muka bumi ini.

Membangun dan menjaga demokrasi memang sangat mahal harganya. Kebebasan bersuara, berpendapat, dan mengkritik sangat mahal harganya. Dan dalam negara demokrasi yang stabil, semua itu dijamin dan dilindungi untuk saling mengingatkan bahwa dalam pengelolaan bernegara dibutuhkan kontrol dari masyarakat. Ketika lembaga legislatif mandul untuk menyuarakan aspirasi rakyat, maka rakyatlah secara individu

ataupun secara kelompok bergerak dan bersuara keras dalam mengkritik penguasa.

Demokrasi di Indonesia kadang naik kadang turun. Demokrasi menjadi terjaga dan naik, jika kasus-kasus dan permasalahan-permasalahan yang mencederai demokrasi dapat diselesaikan oleh pemerintah. Namun demokrasi akan menjadi turun kualitasnya, jika ada hal-hal yang mengancam demokrasi dibiarkan. Pura-pura tidak tahu, diabaikan, ditinggalkan, bahkan sampai dimainkan. Naik turunnya kualitas demokrasi, bergantung pada pemerintah dan rakyatnya dalam mengawal dan menjaga demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang tidak dipertahankan akan mengarah ke otoritarian.

Kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah untuk mengungkap siapa pelakunya. Dalam negara demokrasi yang menjunjung nilai keadilan dan transparansi, maka seharusnya Polisi sudah mampu untuk menangkap pelakunya. Jika kasus tersebut dibiarkan tanpa perkembangan dan kejelasan, maka rakyat bisa marah dan bisa menuduh pemerintah tidak mau mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. Tidak tuntasnya kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan, menjadikan demokrasi kehilangan jalan dan kendali.

Membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas adalah dambaan kita semua. Mencederai demokrasi sama saja merusak bangunan besar peradaban bangsa. Merubah arah ombak perubahan dan kebebasan. Demokrasi yang sehat dan berkualitas akan terjadi jika kita yang berbeda pendapat saling menghargai, menghormati, mencintai, berbagi, bersilaturahmi, tidak menyakiti, dan saling menjaga. Demokrasi yang sehat

dikembangkan dengan narasi dan perdebatan yang sehat pula. Bukan saling serang dan kritik dengan berita hoaks.

Demokrasi yang tidak dikelola dan dijaga akan mati. Kematian demokrasi akan menandai kembalinya zaman kegelapan yang otoritarian. Hidup di alam demokrasi jauh lebih baik dari hidup yang penuh kekangan, ketakutan, dan kejumudan. Demokrasi menghendaki kebebasan, bebas berfikir, bebas berkarya, bebas berpendapat, bebas mengkritik tanpa harus dihantu oleh ketakutan-ketakutan. Dengan kebebasan diharapkan tercipta kemajuan, kreatifitas, inovasi, dan keterbukaan.

Bebas yang terbatas. Bebas yang tetap harus mengikuti norma-norma hukum. Bukan bebas sebebaskan-bebasnya, bukan bebas tanpa sensor, bukan bebas total, bukan bebas yang seenaknya, bukan bebas yang kebablasan, bukan bebas yang menafikan penghormatan, bukan bebas yang menenggelamkan kepribadian, bukan bebas yang menjerumuskan, bukan bebas yang menghancurkan. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab, yang patuh pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, tidak ada negara demokrasi di dunia ini yang penegakan hukumnya tidak jalan. Demokrasi dengan penegakan hukum harus jalan beriringan dan seirama.

Demokrasi juga terkadang mengalami kualitas penurunan, jika para pengkritik atau para oposan dibungkam. Atau suara-suara yang berbeda dan bertentangan diredam. Pelarangan tayangan di televisi yang temanya bersebrangan dengan pemerintah, membubarkan gerakan ganti presiden, mengkondisikan media-media agar tidak bersuara keras mengkritik pemerintah adalah bagian dari penurunan kualitas demokrasi yang sesungguhnya. Media sebagai pilar demokrasi,

harusnya menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas demokrasi, agar demokrasi tetap stabil dan terjaga.

Bangsa ini sudah terlanjur memilih demokrasi. Jadi harus dijaga dan diperbaiki. Dijunjung jangan digantung. Dijalankan bukan dinafikan. Dikembangkan bukan dimatikan. Disyukuri dan dinikmati bukan dikhianati. Dicintai bukan dibenci. Ditinggikan bukan direndahkan. Dilindungi bukan dipentungi. Dirawat bukan disikat. Dimengerti dan ditaati bukan dikebiri. Dipupuk dan dirawat bukan dibuat gawat.

Menjaga demokrasi agar tetap bersemi adalah tugas kita semua. Tidak boleh ada seorangpun yang tidak merawat demokrasi sebagai sebuah pilihan politik. Walaupun demokrasi di Indonesia masih up and down, namun kita patut berbangga dan bersyukur kita masih bisa menghirup udara segar kebebasan. Air jernih keindahan. Batukarang kekokohan. Air Terjun kegagahan. Ombak kearifan. Pegunungan kecukupan. Dan pantai kehidupan.

Demokrasi akan menjadi indah jika kita secara bersama-sama saling menjaga, menghormati, menyayangi, mengasihi, memberi, berbagi, dan mencintai. Demokrasi tak akan ada jika kita tak menjaga. Jangan biarkan demokrasi lenyap dari muka bumi Indonesia. Oleh karena itu, mengadili para penebar berita hoaks adalah keniscayaan. Siapapun pelakunya. Karena hoaks merupakan musuh demokrasi, negara, dan kita semua.

Membidik Amien Rais

SEBAGAI tokoh oposan, Amien Rais kerap mengkritik keras kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Kritikan Amien Rais tentu membuat pemerintah geram, marah, dan bisa saja meng-kick balik serangan dari Amien Rais tersebut. Karena keras dan seringnya Amien Rais mengkritik pemerintah, dengan segala cara pemerintah dengan semua instrumen yang dimilikinya bisa saja memukul balik Amien Rais.

Terlebih-lebih Amien Rais juga merupakan tokoh sentral dibalik gerakan damai 212 yang fenomenal dan berada dalam gerbong Prabowo-Sandi. Menjadi pihak yang berlawanan dengan pemerintah tentu memiliki banyak risiko. Risiko dikerjai dan di-bully merupakan makanan sehari-hari bagi para kritikus seperti Amien Rais.

Amien Rais mungkin sudah siap dengan semua risiko yang akan dihadapinya. Berhadap-hadapan dengan pemerintah menjadi keniscayaan baginya. Mungkin juga Amien Rais sudah merasa akan dibidik sejak lama. Mulai dari tuduhan menerima aliran uang haram yang dikait-kaitkan dengan dirinya. Padahal

tidak terbukti. Sampai kasus kebohongan Ratna Sarumpaet yang diulik polisi.

Kita tentu masih percaya dengan institusi kepolisian. Institusi kepolisian harus bekerja profesional dan bekerja berdasarkan norma-norma keadilan. Siapapun di Republik ini bisa diperiksa oleh penegak hukum tanpa kecuali. Termasuk Amien Rais. Namun pemeriksaan tersebut haruslah benar-benar untuk mengakkan keadilan. Bukan yang lainnya. Apalagi atas dasar pesanan atasan. Bekerja demi bangsa dan negara lebih membanggakan, daripada bekerja hanya untuk kepentingan atasan.

Keadilan harus ditegakkan bagi siapapun. Dan polisi jangan main dan masuk wilayah politik. Fokus pada penegakkan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Karena jika polisi sampai main mata apalagi bekerja berdasarkan pesanan, maka pertaruhanannya sangat besar. Kita mendukung polisi yang jujur dan bekerja untuk bangsa dan negara. Bukan bekerja demi penguasa dan kekuasaan.

Secara formal budaya profesional perlu diawali di kalangan supra struktur politik. Jabatan-jabatan birokrasi pada dasarnya merupakan jabatan profesional (Ibrahim, 2019:108). Kepolisian juga adalah jabatan profesional. Jadi dalam segala tindakannya harus berdasarkan nilai-nilai profesionalisme. Bukan bekerja berdasarkan pesanan atasan. Dan tidak bekerja berdasarkan like and dislike.

Karena jika sampai kepolisian dalam menangani suatu perkara berbuat tidak adil, tebang pilih, dan bekerja atas dasar tekanan dari atasan, maka kasihan bangsa ini. Negara ini butuh polisi yang kuat dan independen dalam menjalankan tugasnya.

Bangsa ini akan rusak, jika polisinya rusak dan bangsa ini akan jaya, jika polisinya baik. Kita masih percaya dan akan selalu percaya bahwa polisi akan bekerja secara profesional.

Tokoh oposisi seperti Amien Rais dibidik itu soal biasa. Kesalahannya dicari-cari juga soal biasa. Namun yang luar biasa dan berbahaya jika institusi penegak hukum dijadikan alat untuk membidik seseorang. Kita percayakan kasus kebohongan Ratna Sarumpaet yang menyeret-nyeret nama Amien Rais hingga diperiksa sebagai saksi ke pihak Polda Metro Jaya. Kita semua yakin dan percaya pihak kepolisian bekerja dengan baik dan profesional.

Pihak kepolisian memeriksa Amien Rais tentu sudah diperhitungkan dengan matang dan berdasarkan laporan masyarakat. Bola panas pemeriksaan Amien Rais jangan sampai menjadi liar. Sebagai warga negara yang baik Amien Rais sudah datang untuk memenuhi pemeriksaan polisi. Dan sebagai penegak hukum, polisi juga harus adil kepada siapapun termasuk kepada Amien Rais. Dengan hadirnya Amien Rais memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi kasus Ratna Sarumpaet, menjadikan Amien Rais sebagai negarawan. Dan dengan enjoynya Amien Rais saat diperiksa oleh penyidik, menandakan polisi bekerja dengan profesional.

Begitu cepatnya pihak kepolisian dalam memanggil dan memeriksa Amien Rais. Dan itu menjadi hak dan kuasa dari pihak penyidik. Di kasus yang lain. Mengapa pihak kepolisian, lama dan tidak pernah memeriksa Megawati yang telah dilaporkan masyarakat dalam hal penodaan agama. Mungkin karena Amien Rais sedang menjadi oposan sehingga harus

dibidik dan dijinakan. Sementara Megawati sedang berkuasa. Sehingga sulit dan tidak tersentuh hukum. Tapi apapun itu, kita harus husnudzon kepada pihak kepolisian.

Keadilan harus ditegakkan. Ya, keadilan harus ditegakkan. Tak peduli kepada siapapun. Entah kepada mantan Ketua MPR RI, mantan Presiden RI, anggota DPR RI, atau siapapun yang bermasalah di negeri ini. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, maka tunggulah kehancuran sebuah negara. Dan jangan sekali-kali kita mempermainkan hukum. Hukum harus tegak siapapun penguasanya. Penguasa boleh silih berganti. Namun penegakkan hukum di republik ini jangan sampai mati.

Sangat banyak anggota Bhayangkara di negeri ini yang berhati jernih, berpikiran positif, dan bertindak untuk kebaikan. Jadi kita berharap kasus kebohongan Ratna Sarumpaet tersebut diselesaikan dengan tuntas dan seadil-adilnya. Indonesia akan baik dan maju jika pihak kepolisian menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Lupakan pesanan dan tekanan atasan. Walaupun jabatan taruhannya. Dan Lupakan sogokan. Walaupun harus hidup penuh kesederhanaan.

Pemeriksaan Amien Rais tentu berdampak politik. Bukan hanya kepada Amien Rais secara pribadi. Tetapi juga kepada pasangan Prabowo-Sandi. Karena bagaimanapun Amien Rais merupakan tokoh sentral dalam kubu Prabowo-Sandi. Ratna Sarumpaet memang hebat, sekali berbohong banyak orang terserempet dan banyak tokoh terkibuli. Kebohongannya menjadi isu seksi dalam menjatuhkan kredibilitas dan elektabilitas Prabowo-Sandi. Cukup hanya dengan Ratna Sarumpaet, kubu Prabowo-Sandi terpepet.

Suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Tahun politik telah diwarnai oleh aneka warna hoaks. Hoaks sangat berbahaya dan membahaya bagi siapapun. Termasuk bisa menghancurkan suatu negara. Anehnya jagat media sosial kita diwarnai dan dipenuhi dengan pertentangan, nyinyiran, dan hoaks yang merusak. Hoaks masih merajalela. Agar bangsa tetap terjaga, solusinya adili para penyebar hoaks, siapapun dan apapun latar belakangnya.

Jangan-jangan hoaks diproduksi dan dikelola dalam rangka untuk menjatuhkan lawan politik. Hoaks disebarkan untuk memfitnah dan menghantam kubu lawan. Hoaks disengaja untuk dikembangkan menjadi sebuah industri di dunia politik kita. Jika bangsa ini mau besar dan jaya, maka stop-lah hoaks. Seorang warga negara yang baik dan seorang politisi yang berjiwa negarawan tidak akan dan tidak mau untuk menebar hoaks.

Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet telah membawa-bawa Amien Rais keranah hukum. Walaupun diperiksa hanya sebagai saksi. Namun sudah cukup bagi lawan politik Amien Rais untuk bisa tersenyum sumringah dan penuh keceriaan. Amien Rais adalah target. Membidiknya adalah keniscayaan. Target untuk dibungkam agar diam. Dan hanya dengan melalui instrumen hukum seorang tokoh bisa ditaklukan dan dikendalikan. Hukum dan penegak hukum jangan menjadi alat kekuasaan. Biarkan hukum menemukan jalannya. Seperti cinta akan menemukan jalannya.

Magnet Politik Pesantren

JANGAN aneh dan jangan heran jika pondok pesantren menjadi magnet dan menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh para capres dan cawapres. Sebagai institusi pendidikan yang bertugas membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia, pesantren juga memiliki santri, guru, dan alumni yang jumlahnya jutaan. Pada saat yang sama, para santri sangat hormat dan taat kepada sang kiyai, sehingga apa yang dikatakan kiyai akan didengar dan ditaati.

Ketaatan total santri kepada kiyai merupakan ciri khas yang hanya ada di pondok pesantren. Jadi jika kiyai mendukung capres dan cawapres tertentu, maka sudah pasti akan diikuti oleh para santri-santrinya. Apa yang menjadi titah kiyai akan ditaati secara total lahir dan batin. Di kalangan pesantren dikenal istilah “sami’na wa athona”, kami dengar dan kami juga taat. Menghormati dan mentaati kiyai adalah suatu kehormatan. Dan juga merupakan suatu kebanggaan yang akan membawa keberkahan.

Pondok pesantren jangan pernah dan jangan sampai alergi terhadap politik. Hadirnya para kontestan Pilpres 2019 ke pondok pesantren harus dimaknai positif, selama para capres

dan cawapres tersebut tidak berpolitik praktis. Politik pesantren adalah politik yang mengedepankan etika, politik kebangsaan, politik kenegaraan, politik keteladanan, politik untuk memuliakan sesama, politik yang mengedepankan kesederhanaan, kejujuran, dan keadilan. Bukan politik yang menjungkir balikan keadaan.

Selama para kandidat capres dan cawapres Pilpres 2019 tidak mengajak kepada politik praktis. Tidak berkampanye untuk menawarkan visi, misi, dan program-programnya, kehadiran mereka sejatinya harus dapat menjadi teladan bagi para santri dan guru-gurunya, bahwa kedua pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, merupakan anak bangsa terbaik yang sedang memperebutkan simpati dan dukungan kaum sarungan dan seluruh rakyat Indonesia.

Enam tahun saya merasakan nikmatnya hidup di pondok pesantren, tiga tahun di Cirebon dan tiga tahun di Jakarta. Dalam rentang tahun 1993-1999, selama enam tahun tersebut saya banyak bertemu para tokoh nasional termasuk para politisi hilir mudik, keluar-masuk pondok pesantren. Ada yang meminta doa dan ada juga yang meminta dukungan politik. Sejak itu pula saya sudah membayangkan betapa hebatnya pondok pesantren dan betapa strategisnya para santri bisa dikunjungi dan didatangi oleh para pejabat negara.

Begitu strategisnya pondok pesantren dengan jutaan santri menjadi magnet politik tersendiri. Dan mendekati pesantren merupakan syarat mutlak dan suatu keniscayaan bagi para kontestan pilpres tersebut. Menghindarinya adalah kesalahan. Menjauhinya adalah kesombongan. Memperalat adalah kebiadaban. Memanfaatkannya adalah kemunafikan. Mengabaikannya adalah keteledoran. Membencinya adalah

keangkuhan. Dan membusuki dan memfitnahnya adalah kejahatan.

Pesantren, kiyai, guru, dan santrinya, bukan hanya tempat untuk sekedar mencari simpati dan dukungan semata. Namun keluarga besar pondok pesantren harus dihormati, dimuliakan, diayomi, dilindungi, dimengerti, didengarkan, dan ditempatkan di tempat yang tinggi. Jangan sampai para capres dan cawapres tersebut datang ke pesantren, ketika butuh dan ketika masa kampanye. Namun setelah pilpres, menghindar dan menjauh. Setelah terpilih melupakan dan melarikan diri dari pesantren.

Menjaga pesantren agar tetap netral dan tidak dimasuki politik praktis itu penting. Menjaga independensi juga penting. Dan di saat bersamaan pesantren juga harus melek politik. Dengan harapan, ke depan akan lahir negarawan-negarawan dari kalangan pesantren. Jadi perpolitikan nasional tidak hanya diisi oleh politisi pragmatis yang tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semua diembat dan semua disikat.

Politik pesantren adalah politik moralitas. Ya, politik untuk menjaga moralitas. Hilangnya politik yang berlandaskan dan berbasis moral inilah menjadikan perpolitian Indonesia berwajah bopeng, kotor, dan diwarnai politik yang mengandalkan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sehingga apapun dilakukan demi untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Potret inilah yang sedang terjadi pada bangsa ini. Oleh karena itu, menghadirkan politik yang bermoral ala pesantren di tengah-tengah politik yang rusak adalah keniscayaan.

Politik pesantren adalah politik agama, yang digerakan oleh kesadaran akan betapa majemuknya keadaan bangsa Indonesia

(Haryono, 2005: 69). Politik pesantren adalah politik yang menghargai perbedaan-perbedaan dengan ketulusan. Politik pesantren adalah politik yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang romatan lil ‘alamin. Oleh karena itu, wajar jika pesantren menjadi magnet bagi para pejabat dan masyarakat untuk bersilaturahmi atau menimba ilmu.

Politik yang tidak berlandaskan moral hanya akan menjadikan bangsa ini rusak. Politik tanpa nilai juga akan menjadikan republik ini tanpa arah dan hancur. Yang berkembang akhirnya politik berbasis dan berlandaskan hawa nafsu, menjadi bandit politik yang menghalalkan segala cara, apapun disikat dan diembat, korupsi dilakukan, dipenjara tak merasa takut, penegak hukum dikondisikan dan disuap, dan masyarakat pun dibodohi. Akhirnya yang muncul adalah politik tanpa moralitas dan tanpa keteladanan.

Yang hilang dari bangsa ini adalah keteladanan. Keteladanan hilang karena tidak adanya politik yang menjaga moralitas. Moralitas hilang dan keteladanan juga hilang. Lantas siapa yang akan menjadi panutan. Hilir mudiknya capres dan cawapres haruslah menjadi pembelajaran berharga bagi para pengelola pondok pesantren di seluruh Indonesia, untuk mempersiapkan kader-kader bangsa ke depan dari kalangan pesantren. Jangan sampai pengasuh pondok pesantren lupa akan misi tersebut. Dan jangan sampai hanya dimanfaatkan capres dan cawapres tertentu hanya untuk menambah elektoral, namun lupa untuk mendidik santri untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia.

Student now, leader tomorrow. Hari ini menjadi santri, besok hari akan menjadi pemimpin. Dan sesuai dengan pepatah Arab

yang mengatakan “syubbanul yaum rijaalul ghodd”, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Silakan para kiyai berpolitik. Namun jangan lupakan misi utama untuk menjadikan dan membangun santri-santri yang tangguh dan berkarakter yang siap untuk menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Semua harus dipersiapkan. Jangan hanya menjadi penonton. Tapi harus menjadi aktor politik masa depan bangsa.

Politik santri adalah politik pengabdian dan pelayanan. Dan itu sudah ditanamkan di pondok pesantren. Kepentingan umat, bangsa, dan negara akan lebih diutamakan, dari pada kepentingan pribadi, kelompok, dan partai. Politik yang berlandaskan moralitas yang diimplementasikan dengan pengabdian dan pelayanan akan lahir dari pondok pesantren. Bukan lahir dari jalanan atau lembaga-lembaga lain. Jika bangsa ini ingin aman, damai, adil, makmur, dan sejahtera, maka tanamkan dalam hati dan hadirkan dalam perilaku politik pengabdian dan pelayanan. Bukan politik saling tikam dan ingin dilayani.

Mencetak generasi millennial dari kalangan pesantren untuk menjadi pemimpi-pemimpin bangsa kedepan adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas kiyai dan guru di pondok pesantren. Sehingga pesantren bukan hanya tempat yang dikunjungi ketika kampanye. Tapi dilupakan ketika sudah terpilih. Mencetak generasi politisi yang santun dan berbudi pekerti yang baik, jauh lebih penting dari sekedar memperdebatkan apakah capres dan cawapres boleh masuk pesantren atau tidak. Pesantren akan tetap menjadi magnet politik, di manapun dan sampai kapanpun. Hanya capres dan cawapres yang dungu yang tidak mau berkunjung ke pesantren!

Menggagas Indonesia Hebat

TAK mudah memang menjadikan Indonesia hebat dan bermartabat. Butuh kemauan seluruh anak bangsa untuk meraihnya. Perlu kerja keras dan ikhlas untuk membangun bangsa besar yang hebat. Hebat atau tidaknya republik ini bergantung pada bagaimana bangsa ini ditata dan dikelola. Bangsa besar dan hebat adalah bangsa yang menghargai kerja keras, kejujuran, kepedulian, kasih sayang, cinta, kekompakan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Bangsa yang tidak punya visi akan musnah. Itulah penggalan pidato pelantikan Franklin D. Roosevelt (2006), 4 Maret 1933. Roosevelt merupakan Presiden Amerika satu-satunya yang terpilih empat kali. Pidato pada pelantikannya tersebut menjadi salah satu pidato yang mengubah wajah dunia. Begitu juga dengan Indonesia, jika tidak memiliki visi, maka akan musnah. Musnah diterjang oleh perubahan zaman yang tak mengenal kasta, suku, ras, budaya, agama, dan negara.

Visi dapat menjadi petunjuk arah bagi kapal Indonesia raya dalam mencapai tujuan. Kompas bagi cita-cita bangsa kedepan. Jalan bagi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Visi akan mengarahkan bangsa yang kerdil menjadi bangsa yang stabil. Dari bangsa yang lemah menjadi kuat. Dari bangsa yang gelap menjadi terang. Dari bangsa yang hancur menjadi cihuy. Dari bangsa yang gagal menjadi bangsa besar. Visi, ya, kuncinya visi. Tentu visi yang memiliki misi, dan juga dijabarkan dengan program-program pembangunan bangsa yang terukur dan implementatif.

Untuk menjadi Indonesia hebat tidaklah mudah. Namun tidak juga terlalu sulit. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kita pasti bisa. “Nothing is impossible in this world”, begitulah kalimat bijak yang sering menjadi referensi bagi orang yang selalu optimis. Begitu juga tidak ada yang tidak mungkin, untuk menjadikan Indonesia hebat. Indonesia hebat adalah keniscayaan. Indonesia hebat adalah keinginan, harapan, dan cita-cita. Indonesia hebat adalah masa depan yang penuh keceriaan dan kebahagiaan. Dan Indonesia hebat adalah keyakinan kita bersama.

Dengan jumlah penduduk yang menyentuh 265 juta jiwa, terhampar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Memiliki gugusan pulau yang indah hingga 17.000 pulau. Dengan kekayaan ragam bahasa daerah yang berbeda yang mencapai 652 bahasa, dengan jumlah tarian sebanyak 1.592 yang memukau dan berjuta warna. Dengan adat istiadat yang menjunjung luhur nilai-nilai kesopanan dan kesantunan, dengan berbeda-beda keyakinan, ditambah dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, dan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Maka, Indonesia sangat mungkin untuk menjadi negara hebat dan disegani di dunia.

Rindu Indonesia Hebat

Gagasan Indonesia hebat jangan sampai hanya menjadi jargon politik yang tanpa arti dan makna. Jangan hanya menjadi jargon partai politik yang hampa. Jangan juga hanya menjadi retorika sesaat kelompok tertentu. Karena kita semua sedang merindukan dan mendambakan Indonesia hebat. Bukan Indonesia yang pemimpin dan rakyatnya kalah sebelum berperang. Menyerah sebelum bertanding. Terluka sebelum bertempur. Terhuyung sebelum memasang kuda-kuda. Jatuh sebelum mendaki. Benjol sebelum masuk ring tinju. Terhempas sebelum balapan. Terpelanting sebelum dibanting. Tertinggal sebelum berlari. Terlana sebelum terlaksana. Dan terbenam sebelum muncul. Indonesia hebat harus terlaksana. Apapun risikonya. Apapun kendalanya. Dan apapun yang terjadi. Kitalah semua penggerak Indonesia hebat itu.

Indonesia hebat adalah kita. Dan kitalah pejuang Indonesia hebat itu. Membangun optimisme dan menghilangkan pesimisme adalah tugas kita semua. Tak mungkin bangsa ini dibangun atas dasar pesimisme dan berjiwa kerdil. Republik ini akan hebat, jika kita bersama-sama meyakini dengan sepenuh jiwa-raga bahwa kita bisa. Ya, kita pasti bisa. Dengan optimisme dan kerja keras tak ada yang tidak bisa kita lakukan. Termasuk untuk menjadikan Indonesia hebat di masa depan.

Tahun politik inilah momentum untuk menjadikan Indonesia hebat. Bahkan harus lebih hebat lagi. Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019 sejatinya harus melahirkan dan menghasilkan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan partai politik pemenang pemilu yang dapat membawa Indonesia menuju kejayaan dan kehebatan. Sekali lagi kita rindu akan kehebatan

itu. Rindu akan kehebatan tumpah darah Indonesia tercinta ini. Pemilu merupakan momentum terbaik untuk menjadikan Indonesia hebat dan bermartabat.

Membangun Indonesia hebat pasti akan melalui proses jatuh bangun. Membutuhkan energi bangsa yang tidak sedikit. Membangun Indonesia yang hebat memerlukan strategi dan kemauan dari seluruh komponen anak bangsa. Tak ada yang hebat jika dilakukan sendirian. Sesuatu yang hebat akan terlihat dan terpatri jika dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan merupakan modal dasar dalam menciptakan Indonesia hebat yang kuat dan berdaulat. Kebersamaan adalah rumus dalam membangun Indonesia hebat yang kita rindukan tersebut.

Partai politik harus menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia hebat. Parpol sebagai wadah pencetak para pemimpin Indonesia masa depan, sejatinya sudah harus berfikir untuk menjadikan Indonesia yang betul-betul hebat. Hebat bukan hanya sebagai semboyan. Bukan hanya jargon. Tetapi hebat yang betul-betul dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hebat bukan hanya dihargai dan dihormati oleh warganya. Tetapi juga hebat di mata dunia. Hebat dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan para politisi, ekonom, pengusaha, aparat TNI-Polri, birokrasi, dosen, guru, pedagang, petani, buruh, dan nelayan yang hebat untuk menjadikan Indonesia hebat.

Partai-partai politik jangan hanya memikirkan kekuasaan dan jabatan semata. Namun melupakan cita-cita untuk membangun bangsa. Abai dalam menjadikan Indonesia hebat. Tak peduli atas nasib bangsa. Tersesat dalam pragmatisme politik. Melanggengkan kemunafikan. Mentorir Kolusi, Korupsi,

dan Nepotisme (KKN). Memperalat rakyat. Melambatkan dan menumbuhkan nyinyiran. Menambah subur pertentangan. Dan menciptakan perdebatan dan perseteruan yang tidak substantif. Namun partai politik harus yang terdepan dalam menjadikan Indonesia hebat.

Tak perlu ragu untuk menjadikan Indonesia hebat. Indonesia yang bermartabat. Indonesia yang kuat. Indonesia yang berdaulat. Seperti yang Soekarno ajarkan dalam konsep trisaktinya. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Jika ketiga ajaran Bung Karno tersebut bisa dilaksanakan. Maka, Indonesia hebat adalah keniscayaan. Kita masih rindu dan akan selalu merindukan Indonesia yang hebat.

Jika kita amati, salah satu partai yang menjadikan tagline utamanya Indonesia hebat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mungkin PDIP ingin mengimplementasikan cita-cita Bung Karno dalam trisaktinya itu. Atau mungkin juga PDIP ingin meneruskan perjuangan Sang Proklamator tersebut dalam menjadikan Indonesia hebat di masa depan. Kita tunggu saja. Rakyat menunggu janji itu. Jangan hanya hebat di jargon. Namun juga harus hebat dalam pelaksanaan. Bukan hanya hebat ditagline. Tapi hebat juga dalam implementasi. Apakah Indonesia akan betul-betul hebat. Hanya waktu yang akan menjawab. Dan kita juga bisa bertanya kepada rumput yang bergoyang.

Untuk menjadi Indonesia hebat paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, membangun karakter bangsa. Institusi pendidikan harus didorong dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan generasi bangsa yang berkarakter. Kedua, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kreatifitas dan inovasi harus dikembangkan. Ketiga, menciptakan ekonomi yang berbasis pada keadilan dan kerakyatan. Keempat, membangun TNI-Polri yang profesional. Kelima, membangun birokrasi yang melayani. Bukan ingin dilayani. Dan keenam, membangun persatuan dan kesatuan. Karena dengan bersatu kita bisa maju dan hebat.

Gagasan hanya tinggal gagasan. Ide hanya tinggal ide, jika tidak bisa diterapkan. Gagasan akan bergerak, bernyawa, dan memiliki ruh jika bisa dilaksanakan. Implementasi merupakan bentuk dari kehebatan gagasan dan ide. Gagasan yang hebat adalah gagasan yang bisa diimplementasikan. Menjadikan gagasan Indonesia hebat bukan semata-mata tugas partai politik. Bukan hanya tugas capres, capwapres, dan para caleg. Tetapi kewajiban kita semua sebagai anak bangsa. Ya, kewajiban kita semua sebagai anak bangsa. Untuk menjadikan Indonesia benar-benar hebat. Semua bergantung pada kita. Indonesia membutuhkan pengorbanan dan perjuangan kita.

Refleksi

Hari Santri Nasional

ANAK pesantren saat ini tak lagi ketinggalan zaman. Karena pesantren zaman now sudah bermetamorfosis menjadi modern. Setiap pesantren sudah memiliki sekolah formal, dari Taman Kanak-Kanak, bahkan hingga perguruan tinggi. Pesantren yang dulu dipandang terbelakang. Saat ini dipandang sebagai lembaga pendidikan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga moralitas bangsa.

Anak pesantren yang biasa kita sebut santri, bukan lagi menjadi anak yang terbelakang secara pendidikan, terisolasi dalam pergaulan, anti modernitas, miskin pengalaman, konservatif dalam pemikiran, sakit-sakitan, dan tak punya masa depan. Tetapi santri masa kini merupakan santri yang terdidik, sedang ditempa untuk menjadi guru, ulama, pengusaha, pengacara, birokrat, dan pemimpin masa depan bangsa.

Santri yang dulu dianggap kampungan, kini telah menjadi anak bangsa yang diperhitungkan. Bukan hanya dibutuhkan ketika kampanye capres dan cawapres semata. Tetapi santri memang dibutuhkan kiprahnya oleh bangsa. Kiprah ketika di pesantren maupun kiprah ketika sudah berada di masyarakat.

Pesantren merupakan tempat bagi kawah candra dimuka kaum santri dalam berkiprah di pentas nasional dan internasional.

Sudah tak terhitung banyaknya alumni pondok pesantren yang menjadi pemimpin di negeri ini. Baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ini membuktikan bahwa santri sangat diterima dan dibutuhkan oleh negara. Karena begitu besarnya peran dan sumbangsih santri terhadap republik ini, baik ketika berjuang merebut kemerdekaan RI tahun 1945, dalam menjaga NKRI, dan dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, kreatif, dan inovatif.

Sudah sewajarnya jika santri harus dihormati, dimuliakan, disayangi, dicintai, dimengerti, dihargai, diangkat harkat dan martabatnya, ditinggikan derajatnya, dan ditempatkan ditempat yang tinggi, mulia, dan terhormat. Penghormatan kepada kaum santri merupakan bagian dari investasi negara dalam menjaga moralitas dan karakter bangsa. Bangsa besar adalah bangsa yang memuliakan dan menghormati kaum santri. Bukan hanya menghormati jasa para pahlawan seperti yang Bung Karno pernah katakan.

Melupakan santri adalah kerugian. Menghiraukannya adalah kemunafikan. Menidasnya adalah kedzoliman. Menafikannya adalah kebodohan. Mengingkarinya adalah kekerdilan. Membodohnya adalah pengkhianatan. Merendahkannya adalah kesombongan. Membusukinya adalah kekeliruan. Menuduhnya adalah kepongahan. Memperalatnya adalah kejahatan. Dan mendustakannya adalah kekejaman.

Jokowi Presiden RI ke-7 yang telah menjadikan santri menjadi terhormat dan bermartabat. Santri tidak lagi menjadi kaum pinggiran. Santri bukan lagi menjadi kelompok

termarjinalkan. Santri bukan lagi anak pesantren yang terbelakang yang tak punya masa depan. Santri bukan lagi kaum sarungan yang menjadi beban. Dan santri bukan lagi anak bangsa yang terkungkung dalam pesantren. Namun menjadi santri sungguh membanggakan.

Penjaga Moral Bangsa

Saat ini kaum santri boleh berbangga. Karena Jokowi sejak tahun 2015 melalui Keputusan Presiden RI No 22 Tahun 2015, telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ya, Hari Santri Nasional. Salah satu pertimbangannya yaitu negara ingin menghormati santri dan kiyai dari kalangan pesantren yang sudah berdarah-darah dan berjasa dalam merebut kemerdekaan RI, mempertahankan, dan menjaga keutuhan NKRI dengan harta jiwa, dan raga.

Santri merupakan anak didik kiyai. Dan santri juga merupakan sosok dan cikal-bakal kader yang dipersiapkan pesantren untuk menjadi kiyai. Begitu besarnya jasa sang kiyai, sehingga kiyai sangat dihormati. Kiyai berpolitik dengan nalar sehat yang ditopang moralitas kokoh. Keteladanan menjadi kunci utama dalam melakukan dakwah (Salahudin, 2015: 228). Dan kiyai lah yang telah banyak mendidik santri di pesantren-pesantren.

Salah satu lembaga pendidikan yang masih orisinil dan steril dalam menjaga moral bangsa adalah pesantren. Santri, ustad, dan kiyai masih menjadi garda terdepan dalam menjaga moralitas di republik ini. Rusaknya moralitas bangsa ini karena banyak orang baik, pasif dan tidak terlibat dalam urusan politik. Sedangkan politik dikuasai oleh orang-orang yang mengusung

pragmatisme dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan.

Jika bangsa ini tidak ingin terlalu rusak moralitasnya, maka santri, kiyai, dan ustad sejatinya harus turun gunung dalam membangun dan mengembangkan politik kenegaraan, kebangsaan, keadaban, kesopanan, kesantunan, kebaikan, dan pelayanan. Bukan politik yang melanggengkan kemunafikan dan mengembangkan nyinyiran. Bukan politik yang saling menghantam dan menafikan persaudaraan.

Jika yang dikembangkan adalah politik tanpa moralitas, tanpa nilai, dan tanpa visi. Maka tunggulah kehancuran bangsa ini. Sejatinya bukan hanya tugas para santri, kiyai, dan ustadz dalam menjaga moralitas bangsa. Tapi tugas kita semua. Ya, tugas kita semua dalam menjaga dan memelihara moral di negeri tercinta ini. Dengan moralitas, politik akan aman, damai, dan menyenangkan. Namun tanpa moralitas, politik akan rusak. Dan politik hanya akan dikuasai oleh kaum pemburu rente kekuasaan.

Hari Santri Nasional harus menjadi momentum kebangkitan kaum santri dalam berperan dan berkiprah di pentas nasional dan internasional. Suatu kebanggaan jika kaum santri dapat mengisi pos-pos pemerintahan. Semakin banyak kiprah dan kontribusi kaum santri terhadap negara, maka negara ini akan terjaga, terpelihara, dan tertata.

Di tahun politik ini, tidak heran dan tidak aneh, jika para capres dan cawapres secara khusus melakukan road show ke pesantren-pesantren. Karena pesantrenlah tempatnya kaum santri menimba ilmu. Buka hanya puluhan, ratusan, dan ribuan. Tapi jutaan santri mengisi pesantren-pesantren di seluruh pelosok negeri. Dengan banyaknya jumlah santri dan ditambah

dengan besarnya pengaruh kiyai, maka pesantren menjadi tempat berebut meraih simpati dan dukungan bagi para politisi.

Berbanggalah menjadi santri. Jangan pernah minder apalagi keder. Karena sejarah tak akan pernah melupakan kaum santri. Ketika Hari Santri Nasional sudah ditetapkan, maka, berbuat terbaiklah untuk bangsa ini. Republik ini membutuhkan santri-santri yang bukan hanya cerdas dalam pemikiran, pekerja keras, rajin ibadah, menghormati guru, kiyai, dan orang tua, dan melayani sesama. Tetapi juga membutuhkan santri-santri yang mau dan mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Politik santri adalah politik pengabdian dan pelayanan. Bukan politik praktis. Selamat Hari Santri Nasional!.

Politikus Sontoloyo

“HATI-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo,” itulah penggalan perkataan Jokowi ketika menghadiri pembagian 5000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jokowi secara sadar telah membelah dan membedakan dua karakter politikus di Indonesia. Politikus bermental baik dan politikus berkarakter tidak baik, alias politikus sontoloyo.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘sontoloyo’ bermakna konyol, tidak beres, atau bodoh. Kata ‘sontoloyo’ merupakan kata yang tidak enak didengar, sumbang, dan memiliki makna negatif. Kata ‘sontoloyo’ digunakan dan dipakai untuk menghardik atau memaki seseorang atau kelompok orang.

Jokowi dengan jelas mengatakan bahwa politikus sontoloyo yang dia maksud adalah mereka yang lebih mengedepankan adu domba, pecah belah, dan kebencian. Jokowi menginginkan Pemilu 2019 dilakukan dengan adu visi, misi, program, adu ide dan gagasan, juga adu prestasi. Tentu bukan adu nyinyiran, adu otot, apalagi adu jotos.

Politikus sontoloyo bisa juga dimaknai politikus yang hanya mengejar jabatan dan kekuasaan, walaupun dengan menghalalkan segala cara. Tak penting salah atau benar, yang penting menang. Tak penting melanggar atau tidak, yang penting unggul. Tak penting saling serang dan terjang, yang penting finish di urutan pertama. Tak penting berkampanye negatif atau positif, yang penting hasilnya memuaskan. Seperti yang dikemukakan Deng Xiao Ping, tak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Tak penting curang atau tidak yang penting menang. Itulah gambaran politisi sontoloyo yang banyak mewarnai jagat perpolitikan Indonesia.

Politikus baik merupakan politikus yang berdedikasi tinggi dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dan perangai, serta tindak tanduknya mencerminkan kepribadian yang unggul dan dapat menjadi suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi masyarakat. Hati, pikiran, dan sikapnya tercurahkan untuk membangun bangsa dan negara. Dalam dirinya terpancarkan nilai-nilai kebaikan bagi sesama. Juga berjiwa kesatria dengan menyatukan antara perkataan dengan perbuatan.

Jika ingin melihat apakah politikus itu baik atau sontoloyo, maka lihatlah dan nilailah dari perkataan dan perbuatannya. Jika apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat berbeda, maka politikus tersebut masuk kategori sontoloyo. Jika ketika kampanye hadir dan mendekat rakyat, namun ketika terpilih menghindar dan lari menjauh. Takut dan susah ditemui. Jika berkata bohong, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya khianat. Sering dan selalu menipu dan membohongi rakyat.

Wajar jika di Indonesia banyak dihuni para politisi atau politikus sontoloyo. Karena sistem politik di republik ini yang masih liberal. Segala sesuatunya diukur dengan kepemilikan modal. Semuanya diukur dengan uang. Menafikan dan menihilkan kemanusiaan. Bagi yang banyak uang bisa menang dan bagi politisi berkantong cekak, apalagi miskin, pasti akan tumbang. Liberalisasi politik membawa konsekuensi kontestasi politik berbiaya mahal. Dan mahalnya biaya politik akan melahirkan politikus sontoloyo. Dengan biaya mahal, maka politikus harus menang. Dan jika ingin menang, apapun bisa dilakukan, termasuk melakukan adu domba, pecah belah, dan kebencian.

Politik yang terlalu liberal akan membawa konsekuensi melahirkan politikus yang sangat pragmatis dan bersikap sontoloyo. Dengan politik yang liberal, maka jabatan-jabatan politik baik di eksekutif dan legislatif akan diisi oleh orang-orang yang beruang. Mahar politik jadi kewajiban. Suap-menyuap dibiasakan dan dipertontonkan. Ingin terpilih menjadi anggota DPR RI, berbiaya mahal. Ingin jadi kepala dinas, dirjen, dan jabatan-jabatan lainnya di pemerintahan harus setor ke atasan. Sungguh menyedihkan.

Politik yang berbiaya mahal, telah menghasilkan politikus sontoloyo. Dan politik, hanya akan diisi oleh orang-orang yang punya uang, namun miskin karakter baik. Orang-orang baik, tidak bisa bersaing untuk memperebutkan jabatan-jabatan kenegaraan. Jika politik tidak diisi orang baik, maka akan diisi oleh para politikus sontoloyo, dan tunggulah kehancuran republik ini. Ya, tunggulah kehancuran bangsa ini. Jika politisi sontoloyonya lebih baik dari politisi baik.

Karena politik yang dimainkan dan diperankan oleh para politikus sontoloyo, bukan dan tidak mencerminkan politik pengabdian, pelayanan, kenegaraan, dan kebersamaan. Namun politik yang bersifat sesaat, yang mementingkan jabatan untuk kepentingan diri, keluarga, kelompok, dan partainya. Berpolitik bukan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Tapi berpolitik hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Oleh karena itu, tidak heran jika terjadi politik dinasti, istrinya bupati, anaknya anggota DPRD, dan suaminya anggota DPR RI. Jika negara sudah diisi dan dipenuhi para politisi sontoloyo, maka negara tak akan bisa membangun. Negara terbebani oleh para politikus sontoloyo tersebut. Karena hidupnya difasilitasi dan dibiayai negara. Namun bekerja bukan untuk kepentingan negara. Bekerja untuk kekuasaan. Karena dengan kekuasaan bisa mengeruk uang. Oleh karena itu, tidak heran, jika banyak politikus sontoloyo yang terjatuh kasus hukum.

Tak ada yang bisa diharapkan dari para politisi sontoloyo. Dan bangsa ini tidak membutuhkan kehadirannya. Namun politisi sontoloyo tersebut banyak yang eksis di negeri tercinta ini. Karena memang negeri ini masih mentorerir karakter-karakter dan gaya tipu-tipu para politikus sontoloyo tersebut. Terbukti masih ada kepala daerah, atau anggota DPR RI yang ditangkap dan ditahan KPK, namun masih terpilih kembali menjadi bupati dan anggota DPR RI. Artinya masyarakat masih mentorerir keberadaan politisi sontoloyo tersebut. Mungkin karena para politikus sontoloyo tersebut ber-uang, tajir, dan unlimited modal politiknya.

Politisi baik tidak akan korup, politisi baik tidak akan berani memainkan dan mengutak-atik, apalagi memark-up anggaran

atau keuangan negara. Politisi baik tidak akan menggadaikan idealisme demi jabatan dan uang. Namun jumlah politikus baik, bisa dihitung dengan jari. Jumlahnya sedikit. Sangat-sangat sedikit. Dan tertutup oleh hiruk-pikuk dan tingkah polah serta manuver para politikus sontoloyo.

Jika bangsa ini dikuasai dan diisi oleh para politikus sontoloyo, yang berkarakter culas, penipu, pragmatis, dan munafik. Maka, tidak ada jalan lain selain bangsa ini merevolusi mental mereka. Mental politisi sontoloyo tersebut harus dipermak, diperbaiki, dan dirubah. Sulit memang untuk mengubahnya. Karena perubahan tersebut harus datang dari dalam diri mereka. Mungkin baru akan sadar, jika sudah tertangkap KPK karena korupsi, atau karena diberi Tuhan sakit keras yang sulit disembuhkan. Mungkin juga mereka tidak sadar dan tidak mengakui, bahwa mereka merupakan politikus sontoloyo. Introspeksi merupakan jalan terbaik, agar Indonesia lebih baik.

Politisi sontoloyo laksana fenomena gunung es, terlihat sedikit tapi sesungguhnya banyak. Jika politisi sontoloyo tersebut membangun kekuatan dan terorganisir, mereka bisa saja akan menang dan akan mengalahkan politisi baik yang jumlahnya tidak seberapa dan tidak terorganisir. Kejahatan yang terorganisir, akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi, jika politisi baiknya diam, kalah oleh kerumunan para politisi sontoloyo, lalu apa yang bisa diharapkan dari kedua politisi tersebut.

Politisi baik memang menjadi harapan rakyat, untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi warga negara. Namun jika politisi baik, tidak mampu memperjuangkan aspirasi

tersebut. Dan terbawa virus politikus sontoloyo, maka para politis baik tersebut sejatinya harus cepat-cepat introspeksi. Bila perlu mundur dan pulang kampung. Karena politisi baik tidak bisa mewarnai perpolitikan nasional.

Namun menjadi politisi baik merupakan keniscayaan. Jika tak ada politis baik yang berjiwa negarawan, kepada siapa lagi bangsa ini dititipkan. Kepada siapa lagi negeri ini berharap kebaikan. Dan kepada siapa lagi republik ini berharap. Menjadi politisi baik adalah keberuntungan dan keberkahan. Namun keberuntungan dan keberkahan tersebut harus bisa dirasakan dan dinikmati oleh rakyat.

Menjadi politisi merupakan kebaikan. Apalagi menjadi politisi baik. Dan pada dasarnya menjadi politisi sedang membangun sifat-sifat kenegarawanan. Sedang mengukir sejarah bangsa. Namun kebanyakan politisi terjatuh oleh godaan harta, tahta, dan wanita. Sehingga mereka terjerembab menjadi politisi sontoloyo. Yang hanya mementingkan jabatan dan kekuasaan.

Puncak prestasi politikus adalah menjadi negarawan sejati. Bukan menjadi politisi konyol, apalagi sontoloyo. Dan seorang negarawan adalah orang yang dipenuhi dengan kebajikan dan berjiwa baik. Berbicara baik. Bersikap baik. Dan apa yang dilakukannya selalu untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Menjadi politisi baik atau sontoloyo merupakan pilihan. Terserah Anda. Mau menjadi politikus baik atau menjadi politikus sontoloyo.

BAB 5

KAMPANYE PENUH KEBENCIAN

Nyinyiran Politik

AKHIR-akhir ini, politik kita diwarnai narasi politik yang tak bermutu, menjengkelkan, membosankan, menjungkir balikkan keadaan, penuh kebohongan, permusuhan, melanggengkan kebencian, dan penuh nyinyiran. Politik yang diangkat dan dinarasikan, jauh dari kesan santun dan penuh keadaban. Banyaknya politikus sontoloyo, merupakan fakta bahwa politik masih dipenuhi oleh narasi ketidakbaikan.

Nyinyiran politik tumbuh dan berkembang, karena kita melupakan moralitas. Melupakan persaudaraan. Melupakan persatuan dan kesatuan. Melupakan kebersamaan. Melupakan pembangunan bangsa ke depan. Yang dicari hanya kekuasaan dan jabatan. Yang dicari hanya soal uang. Yang dicari hanya soal penghargaan orang. Bukan pelayanan dan pengabdian.

Nyinyiran politik bisa juga disebabkan oleh miskinnya keteladanan. Sangat sedikit, bahkan cenderung tidak ada elit politik yang bisa dijadikan teladan. Miskinnya keteladanan membuat masyarakat malas dan tidak mau menjadikan politikus sebagai role model. Keteladan menjadi sangat penting, di tengah-tengah politik yang tak mengedepankan moralitas dan kebaikan.

Krisis moral dan keteladanan akan menjadikan bangsa ini menuju jurang kehancuran. Dan menurut Vaclav Havel (2006), eks Presiden Cekoslovakia (Republik Ceko), “Kita jatuh sakit secara moral karena kita terbiasa mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pikirkan”. Kebiasaan bermuka dua, tidak selarasnya antara perkataan dan perbuatan, telah mengikis habis nilai-nilai kebaikan.

Bahkan Havel menjelaskan lebih lanjut, “kita hidup dalam lingkungan moral yang sudah tercemar”. Moral menjadi rusak dan tercemar, karena kita terbiasa dan membiasakan politik kebohongan berkembang dan dikembangkan. Politik kebencian diproduksi. Politik nyinyiran disebarluaskan. Dan menumbuhkan kembangkan kemunafikan. Tak satu katanya antara perkataan dan perbuatan membuat moral bangsa menjadi rusak.

Landasan moral dalam berpolitik menjadi penting. Karena akan menjadi landasan etik dalam berpolitik. Politik yang tidak dilandasi moralitas, hanya akan diisi, dihiasi, dan diwarnai dengan nyinyiran. Politik tanpa moralitas, hanya akan menghasilkan politikus-politikus busuk, yang bukan hanya berkelakuan sontoloyo. Tapi juga akan menafikan dan menihilkan nilai-nilai kemanusiaan.

Di benak para politisi yang mengedepankan nyinyiran, hanya akan ada kepalsuan, kebohongan, kemunafikan, permusuhan, kebencian, dan dendam yang tak berujung. Lawan politik dianggap musuh, sehingga harus dijegal, dibegal, dibusuki, dan dihancurkan. Hanya karena perbedaan sikap politik dan dukungan, mereka saling menyakiti. Saling melukai. Saling membuka aib. Dan saling menjatuhkan.

Nyinyiran politik yang dilakukan para elit, dihembuskan dan dikembangkan oleh para pendukung-pendukungnya. Bahkan dilakukan juga oleh buzzer. Sehingga membuat perpolitikan di Republik ini bau busuk tak sedap. Bukan hanya di jagat media sosial. Tetapi juga di dalam realita politik keseharian masyarakat Indonesia.

Stop politik nyinyiran. Nyinyiran politik hanya akan menghasilkan politik saling serang dengan argumen abal-abal. Alih-alih memberikan pendidikan politik kebangsaan yang baik kepada masyarakat. Tapi yang terjadi memberikan contoh yang tidak baik. Nyinyiran politik hanya akan menghasilkan perseteruan dan gontok-gontokan. Dan nyinyiran politik hanya akan merusak persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anak bangsa.

Bangsa dan republik yang beradab ini, jangan diisi dengan politik nyinyiran yang tak berlandaskan moralitas, nilai-nilai agama, dan kemanusiaan. Nyinyiran hanya lahir dan diucapkan oleh politikus yang bobrok dan tak menggunakan akal sehat. Nafsu politik yang dibesarkan, sehingga merusak tatanan politik. Sahwat politik yang dikembangkan, sehingga merusak keadaan.

Kita tentu angkat topi dan hormat kepada para pendiri bangsa dan para politikus zaman old, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahril, Mohammad Natsir, Ki Hajar Dewantara, HOS Tjokroaminoto, dll yang mengedepankan ide dan gagasan cerdas, fresh, dan bernas dalam membangun Indonesia. Mereka tidak membangun Indonesia dengan nyinyiran. Tapi dengan visi besar dan hebat.

Namun berbeda dengan politisi zaman now, mereka berdebat, berargumen, dan berkampanye tanpa substansi. Yang ada hanya

nyinyiran, sehingga mengakibatkan permusuhan, kebencian, dendam, dan kegaduhan. Tidak mencerminkan politikus yang memiliki ide orisinil dalam berfikir. Belum menghasilkan ide-ide dan gagasan yang brilian yang bisa membawa perubahan bagi masyarakat.

Politisi zaman now, masih membicarakan untung rugi. Masih membicarakan urusan perut. Masih membicarakan kepentingan pribadi, kelompok, dan partainya. Masih membicarakan menumpuk kekayaan. Belum berjiwa dan berkarakter negarawan. Negarawan hanya berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Politisi yang berjiwa negarawan, hidup dan matinya, lahir dan batinnya, hanya untuk kepentingan Indonesia. Bukan yang lain.

Sedangkan politikus sontoloyo, berpolitik dengan penuh tipu daya, kebohongan, kemunafikan, menghalalkan segala cara ala Machiavelli, menanamkan dan menebar permusuhan dan kebencian. Dan lebih banyak mengembangkan narasi nyinyiran.

Sudah 73 tahun negara ini merdeka. Sudah 90 tahun sumpah pemuda diperingati. Sudah 7 kali presiden berganti. Namun jika narasi politik nyinyiran yang dikembangkan. Akan menjadi apa bangsa ini ke depan. Membangun kesadaran agar para politikus tidak berkata nyinyir, dan membangun kesadaran, agar mereka menjadi politikus yang berjiwa negarawan merupakan keniscayaan.

Karena seperti kata WS Rendra, dalam puisinya yang indah dan menggugah, bahwa kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi membangun kesadaran para politikus, agar tidak melakukan perkataan nyinyiran, merupakan

bentuk dari kesadaran menjadi matahari yang bisa menyinari bumi Indonesia.

Matahari akan menyinari. Namun nyinyiran akan meredupkan dan menenggelamkannya. Sinar matahari akan tertutup awan, jika kesadaran menghentikan nyinyiran tidak dilakukan. Nyinyiran hanya akan membuat 17.000 pulau Indonesia menjadi gelap. Dan 265 juta penduduk Indonesia, mengelus dada dan mengernyitkan dahi. Keindahan alam dan budaya, hanya akan diam tertunduk malu, melihat politisi yang selalu berkata penuh nyinyiran.

Nyinyiran politik, sejatinya tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat yang agamis. Nyinyiran politik, hanya akan berkembang dan tumbuh, di masyarakat yang tidak bisa menjaga mulutnya dan berotak kosong.

Islam sangat jelas mengajarkan, jika kita tidak bisa berkata baik, kita dianjurkan untuk diam. Daripada ber-nyinyir-nyinyir ria, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Lebih baik berkata dan berbuat kebaikan, agar Indonesia esok menjadi lebih baik. Stop nyinyiran, kembangkan dan tumbuhkan kebaikan.

Masih Adakah Pileg untuk Kita ?

FOR the first time, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak, pada 17 April 2019 mendatang. Di mana Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan di detik, menit, hari, tanggal, dan bulan yang sama. Pesta demokrasi terbesar ini, sejatinya untuk memilih pemimpin terbaik di eksekutif maupun legislatif. Pemilu dan kampanye yang berbarengan, antara pileg dan pilpres, membuat pileg sepi, tertutup oleh kampanye dan pemberitaan pilpres.

Membuat pileg menjadi sepi dan pilpres menjadi gaduh. Masih adakah pileg kita? Jangan sampai pileg terkubur oleh hiruk pikuk kampanye capres dan cawapres semata. Masa kampanye pileg dan pilpres yang cukup panjang, dari 23 September 2018 – 13 April 2019 membuat para caleg, capres, dan cawapres memutar otak dan mengatur strategi agar tidak kehabisan amunisi di tengah jalan. Ibarat lari maraton, jika ritme lari tidak diatur, maka bisa jatuh tersungkur, dan tidak akan sampai garis finish.

Dengan masa kampanye yang cukup lama dan panjang tersebut, bagi capres dan cawapres berkantong tebal, mereka akan

tancap gas menyapa rakyat: ada yang silaturahmi ke pesantren-pesantren, pabrik, pasar, sawah, tempat bencana, bertemu emak-emak, kaum milenial, bahkan kaum buruh. Namun bagi capres berkantong tipis, demi mengirit logistik, hanya akan berjalan merayap hingga akhir tahun. Dan bisa saja akan berlari kencang, di awal tahun demi memenangkan pertarungan.

Pilpres yang rame dan pileg yang sepi. Pilpres menjadi rame, karena terjadi head to head antara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Rematch (tanding ulang) Pilpres 2014 terjadi lagi di Pilpres 2019. Jokowi-Prabowo bertarung kembali. Hanya berganti dicawapres saja. Pileg, walaupun diisi oleh banyak artis yang menjadi caleg. Tetap miskin pemberitaan. Dan sepi gosip politik.

Artis yang tenar di dunia entertainment belum mampu dan tidak berhasil menjadikan publikasi dan kampanye pileg lebih tenar dari pemberitaan pilpres. Pileg hanya berada dalam bayang-bayang pilpres. Padahal pileg dan pilpres sama-sama pentingnya. Karena hasil pileg dan pilpres akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

Media lebih tertarik memberitakan kampanye-kampanye pilpres, jika dibandingkan dengan pileg. Oleh karena itu, wajar jika kampanye pileg tertutup oleh pemberitaan pilpres. Padahal Pemilu 17 April 2019 yang akan datang, bukan sekedar pilpres. Tapi pileg juga. Pemberitaan pilpres memang menjadi primadona. Dan akan terus mendominasi dalam pemberitaan kampanye-kampanye selanjutnya.

Sepinya kampanye pileg, bisa saja para caleg enggan mengeluarkan logistik dan menyimpan sumber-sumber dana, untuk berkampanye di media. Partai-partai politik juga masih

diam seribu bahasa, dan belum beriklan di media massa. Partai politik dan para calegnya, bisa saja menggempur pemberitaan di media massa, pada detik-detik akhir masa kampanye. Atau kita kenal dengan istilah main di ujung. Ya, main di ujung.

Pemilu merupakan sesuatu hal yang diperlukan bagi demokrasi. Namun pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Dan sarana penting untuk mencapai sasaran-sarana demokrasi yang baik ialah sistem pemilu (Croissant dkk, 2003: 2-3). Sistem pemilu serentak telah membuat demokrasi sedikit gaduh. Pemilu serentak juga banyak membuat masyarakat dan elite tidak siap dalam menjalankan proses demokrasi. Sehingga pemilu banyak ditemukan kecurangan-kecurangan.

Permainan di ujung atau di the last minute atau injury time, memang mengurangi biaya politik. Dan lebih efektif. Karena masyarakat akan mengingat kampanye atau iklan yang dilihat terakhir kalinya. Jadi jika kampanye jor-joran di awal, memang akan kehabisan nafas dan logistik, sehingga bisa berhenti di akhir perjalanan. Dan bisa disalip di tikungan oleh lawan.

Pileg tidak kalah pentingnya dengan pilpres. Memastikan partai politik dan para calegnya berkampanye dengan menawarkan program-program terbaiknya adalah keniscayaan. Jangan sampai caleg hanya diam, menghindar dari konstituen, dan baru bergerak ketika masa kampanye akan berakhir. Sungguh sayang, jika masyarakat tidak tahu dan tidak mengerti program-program para calegnya.

Jangan sampai para caleg hanya berfikir, buat apa berkampanye, cukup siram logistik, dan tebar amplop di hari pencoplosan sudah beres. Caleg seperti inilah, yang berbahaya

dan menumbuh suburkan benih-benih korupsi di Indonesia. Namun fakta dan kenyataannya ada. Hadir mewarnai setiap kontestasi politik di Indonesia. Baik dalam pilkada, pileg, ataupun pilpres.

Berdasarkan pengakuan caleg-caleg pada Pemilu 2014 yang lalu. Dan sudah bukan rahasia umum lagi. Para caleg bukan hanya tebar pesona, tersenyum, dan menyapa. Tetapi juga tebar amplop, dalam satu dapil seorang caleg, bisa menebar amplop hingga 500-800 ribu amplop. Mengerikan dan memprihatinkan. Pileg yang kelihatannya sepi. Bisa jadi menyimpan bara pertarungan yang tak kalah sengitnya dengan pilpres.

Jika pada Pileg 2019 nanti, cara-cara culas ini masih terjadi, maka rusaklah demokrasi. Karena suara pemilih dapat dibeli. Dan yang lebih mengerikan, jika setiap caleg partai menyiapkan amplop, maka sudah bisa dibayangkan, berapa banyak peredaran uang di hari pencoblosan. Demokrasi memang berbiaya mahal. Namun membeli suara demi memenangkan pertarungan, sama saja menghancurkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang mahal. Bukan alasan bagi para caleg untuk membeli suara.

Gaduh di pilpres. Namun senyap di pileg. Sepinya kampanye pileg, membuat satu ketua umum partai politik, meminta kepada KPU agar memperbanyak dan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Karena jika tidak tersosialisasikan dengan baik. Jangan-jangan masyarakat hanya tahunya pilpres. Padahal, pada 17 April 2019 nanti, masyarakat akan menerima lima kertas suara, satu untuk pilpres, Dan empat lagi untuk pileg. Artinya kertas suara untuk pileg lebih banyak dari pada kertas suara pilpres yang hanya satu.

Jadi, sejatinya kampanye pileg, harus lebih masif dan lebih greget dari pilpres. Karena bagaimana pun, Pileg merupakan ajang pertarungan hidup mati partai politik. Partai politik yang tidak lolos Presidential Threshold (PT) 4% akan terkubur dengan sendirinya. Mati dan tidak akan bisa ikut pemilu berikutnya.

Karena Pileg merupakan hidup mati partai-partai politik dan para calegnya. Menang di pilpres dan pileg sekaligus memang menyenangkan. Dan juga membanggakan. Namun jika menang di pilpres, lalu kalah di pileg, percuma dan tak berguna. Ya, percuma. Karena hanya akan sia-sia. Capres dan cawapresnya menang. Namun partai politiknya terbenam.

Sesungguhnya, jika berpikir rasional, pragmatis, dan realistis, maka memenangkan pileg, bagi partai-partai dan caleg adalah wajib. Ya, kewajiban. Namun untuk pilpres, hanya sunnah. Jadi pileg lebih utama dari pilpres. Jika menang kedua-duanya, itu bonus dan keberuntungan. Karena di politik, keberuntungan terkadang menjadi sesuatu yang harus disyukuri dan dinikmati. Karena di politik ada yang beruntung. Dan ada juga yang buntung.

Tidak heran dan tidak aneh. Jika banyak partai berfokus, dan berkonsentrasi untuk memenangkan pileg. Tidak dan bukan untuk pilpres. Wajar dan rasional, agar tidak terjungkal. Pilihan terbaik dan menarik agar tetap eksis.

Karena eksistensi partai-partai politik ditentukan di pileg. Bukan pilpres. Pileg adalah wajib. Sedangkan pilpres adalah sunnah. Tapi mengapa kampanye yang wajib sepi. Sedangkan yang sunnah rame dan menyedot perhatian masyarakat dan media. Lalu apa untungnya pileg untuk kita!

Buta dan Budek dalam Politik

AKHIR-akhir ini, politik Indonesia diwarnai komentar, perdebatan, hiruk pikuk, dan pertentangan yang menihilkan kebenaran. Awan kelabu kampanye politik, masih diwarnai kampanye saling serang. Belum memunculkan pelangi kebenaran yang mencerahkan. Kampanye politik capres dan cawapres, masih dikuasai amarah, dendam, dan saling membusuki satu sama lain.

Kebenaran dipinggirkan, dikebiri, bahkan dinafikan. Objektivitas dikesampingkan. Bagi capres dan cawapres yang mengungkap kebenaran, akan disebut pencitraan. Namun yang berkomentar negatif diviralkan. Kita sudah tercerabut dari akar kebenaran, sehingga apa yang kita katakan, jauh dari nilai-nilai kebaikan dan adat ketimuran. Oleh karena itu, tidak heran, jika langit politik kampanye pilpres, diisi oleh kebohongan.

Kebenaran, sejatinya datang dari siapapun dan dari manapun, harus diterima dengan lapang dada. Bukan dicerca dan dihina. Bagi capres, cawapres, dan tim suksesnya yang mengungkap kebenaran, harus didukung. Kebenaran harus diungkapkan, walaupun pahit. Begitulah pesan Rasulullah SAW kepada kita.

“Kullil haqo walau kaana morron”. Katakanlah yang benar, walaupun pahit.

Narasi yang dikembangkan dalam kampanye, sejatinya merujuk pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Bukan nilai-nilai kebohongan yang menghinakan. Kebohongan berkembang dan mewarnai kampanye politik di republik ini, karena kita terbiasa mengingkari nilai-nilai kebenaran. Karena kita juga telah menumbuhkan dan menebarkan kemunafikan.

Jika kita sudah dibutakan dengan kebenaran, maka mata, telinga, mulut, dan hati kita akan tertutup kabut tebal kemunafikan. Sifat-sifat munafik, telah merasuk pada jiwa-jiwa elit politik, sehingga sulit untuk menerima dan berkata kebenaran.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Presiden kelima RI, pernah berkata, “Maju tak gentar, membela yang benar”. Dan akhir-akhir ini, ucapan Gus Dur tersebut, telah dimaknai lain oleh para politisi, dengan dipelintir sehingga menjadi kata berkonotasi negatif: “Maju tak gentar, membela yang bayar”.

Cawapres nomor 01 KH. Ma’ruf Amin, menyindir para politisi yang tidak mengakui prestasi-prestasi Jokowi, sebagai orang yang “buta” dan “budek”. Sebagai ulama, tentu dia paham betul dengan apa yang dikatakannya, karena bisa jadi, dia merujuk pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 18, yang berbunyi, *summum, bukmun, umyun*: mereka tuli, bisu, dan buta.

KH. Ma’ruf Amin tentu tidak menuduh siapapun, tidak menghina siapapun, dan tidak menghakimi siapapun. Karena perkataan tersebut bersifat umum. Dan berlaku kepada siapa

saja yang menutup, dan tidak mengakui kinerja kesuksesan Jokowi. Kata “buta dan “budek”, menjadi kata-kata yang seolah-olah menyerang kubu lawan. Dan seolah-olah mendeskreditkan kelompok tertentu.

Tahun politik memang menjadi tahun penuh warna-warni. Setiap perkataan capres dan cawapres, termasuk tim sukses yang tidak pada tempatnya, akan digoreng hingga gosong. Kesalahan ucapan akan membahayakan. Oleh karena itu, kita dianjurkan menjaga lisan. Banyak orang besar dan hebat, jatuh dan tersungkur dari singgasana kekuasaannya, karena tidak mampu menjaga lisannya.

Pepatah dalam bahasa Arab mengatakan, “salaamatul insan fii hifdzil lisan” yang berarti keselamatan manusia, tergantung dalam menjaga lisannya. Atau kita lebih mengenal dengan istilah, “mulutmu adalah harimaumu”. Orang yang tidak bisa menjaga mulut, pasti akan celaka.

Kampanye politik, memang membutuhkan lisan (mulut), untuk menyampaikan pesan kebaikan dan kebenaran. Menyampaikan visi, misi, dan program-program terbaik, yang bisa diimplementasikan dan dirasakan kenikmatannya oleh rakyat. Menyampaikan ide dan gagasan pembangunan bangsa ke depan.

Namun lisan yang digunakan untuk berkampanye, sejatinya harus meniupkan dan menghembuskan nilai-nilai positif, optimisme, kebaikan, dan kebenaran. Bukan mengutarakan kebencian, sumpah-serapah, pesimisme, dan memecah belah. Berdebat silahkan. Adu argumen tidak dilarang. Namun berdebat dan berargumenlah yang mencerdaskan.

Sehingga kampanye yang diucapkan oleh para elit, menjadi kampanye yang dapat membawa kesejukan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Bukan kampanye agitasi yang memutarbalikkan fakta dan keadaan. Berkampanye dengan penuh kesantunan, masyarakat akan lebih respek kepada capres, cawapres, dan tim sukses yang menebarkan kebaikan dan kebenaran, dalam segala ucapan dan tindakannya.

Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat. Membujuk para pemberi suara untuk memilih calon tertentu. Kampanye yang berorientasi pada hubungan masyarakat, berusaha merangsang perhatian orang kepada sang calon. Ia mencoba meningkatkan identifikasi dan citra sang calon di antara kelompok pemberi suara, menyebarluaskan pandangan sang calon tentang berbagai masalah penting, dan mendorong para pemberi suara untuk memilih sang calon (Agustino, 2005: 12).

Kecerdasan capres dan cawapres dalam berkampanye sedang diuji. Langit politik Nusantara perlu pencerahan. Butuh keteladanan. Menginginkan keindahan. Memimpikan keadilan. Dan sedang mencari kebenaran.

Jagat raya politik republik ini, jangan diisi oleh perang kata-kata yang menyebalkan. Nyinyiran yang menjijikkan. Respons yang menjengkelkan. Serangan yang menjungkirbalikkan keadaan. Nyanyian sumbang yang tak bermakna. Miskin substansi. Kaya kebohongan. Dan melanggengkan dan memelihara kemunafikan.

Buta dan budek, sejatinya bukan mengarah pada kelompok yang buta dan tuli secara fisik. Namun buta dan tuli, bagi kita

dan mereka yang telah tertutup dan tidak mengakui kebenaran. Kebenaran harus tetap ditegakkan, siapapun pilihan kita, di manapun posisi kita. Tak peduli di kubu kawan atau lawan. Yang pasti kebenaran harus menjadi pijakan.

Buta dan budek politik, tidak dan bukan untuk kita yang waras. Memegang rasionalitas. Menegakkan objektivitas. Meyakini kebenaran. Menjauhi kemunafikan. Berkata dan bertindak penuh kebaikan. Buta dan tuli politik, bisa dianalogikan bagi kita, dan mereka yang menghalalkan yang haram. Dan tertutup mata batin kita dalam melihat kebenaran.

Apapun yang dikatakan capres, cawapres, dan tim suksesnya, jika itu mengandung kebaikan dan kebenaran, wajib kita ikuti. Namun jika berkata lain, maka abaikan. Dan jangan ditiru. Mengatakan yang benar, memang sulit dan pahit. Namun berkata benar, akan menjadi nilai tambah (value added) tersendiri.

Buta dan budek politik, jangan diulik. Dan bukan mengarah pada bentuk fisik. Buta dan budek, merupakan penggambaran bagi kita dan mereka yang menutup kebenaran. Hati, mulut, hati, dan mata yang tertutup oleh matahari kebenaran. Dan terhalangi oleh sinar rembulan kebaikan. Maka, membuka mata, telinga, hati, dan pikiran untuk kebenaran merupakan keniscayaan.

Mari bangun narasi kampanye politik yang mencerdaskan. Politik yang dapat membangun peradaban. Bukan politik adu nyinyiran. Menihilkan dan menafikan substansi. Dan mengembangkan narasi cangkang, dari pada isi. Mumpung kampanye masih lima setengah bulan lagi. Berikan masyarakat, politik yang mencerdaskan dan mencerahkan. Jangan sampai masyarakat terus menerus dibuta dan dibudekkan oleh para elit.

Menggagas Kampanye Substantif

KAMPANYE Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) sudah hampir berjalan dua bulan. Sejak dilaunching pada 23 September lalu, kampanye politik masih diwarnai perdebatan yang tidak perlu dan hambar. Saling serang, adu nyinyiran, dan saling menjatuhkan menjadi ciri khas kampanye politik terkini. Saling intip kesalahan, membuka aib kubu lawan, dan memblow up nya merupakan mainan politik para elit politik busuk.

Kampanye sejatinya merupakan sarana para calon presiden (Capres), calon wakil presiden (Cawapres), dan calon legislatif (Caleg) untuk menawarkan dan mensosialisasikan visi, misi, dan program-program terbaiknya. Dalam kampanye, bukan hanya figur yang ditonjolkan. Namun ide dan gagasan yang cemerlang dan mencerahkan, harus juga diperlihatkan, agar masyarakat simpati, sehingga bisa memilih dengan hati nurani.

Kampanye yang mencerdaskan masih belum terlihat. Masih tertutup kabut perdebatan kelas pinggiran. Kampanye politik masih belum menggembirakan. Karena masih dihantui saling fitnah dan kebohongan. Kampanye juga masih belum

terlihat indah dan menyejukkan, karena masih diisi nyinyiran. Kampanye juga belum diisi hal-hal yang substansial. Karena masih diisi cacian dan makian.

Kampanye sejatinya merupakan momentum para kandidat, baik di pilpres maupun pileg untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat tercerahkan. Kampanye jangan diisi oleh komentar-komentar yang kontroversial yang akan membawa kegaduhan bagi masyarakat.

Dalam masyarakat yang berperadaban tinggi. Kampanye sangat dinanti. Karena masyarakat ingin mengetahui apa yang akan dilakukan para kontestan, untuk lima tahun ke depan. Namun dalam masyarakat yang masih berperadaban rendah. Kampanye dijadikan alat untuk saling serang dan menjatuhkan. Saling sikat, agar musuh jatuh tersungkur lalu dikalahkan.

Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh para kontestan pileg dan pilpres. Pertama, membangun citra diri. Di sini, pasangan capres dan cawapres, begitu juga para caleg membangun image positif dengan menghadirkan kampanye yang elegan, kreatif, dan penuh substantif. Di sini pula, visi, misi, dan program-program para kontestan disosialisasikan ke masyarakat.

Visi, misi, dan program-program para kandidat, sejatinya menjadi tolok ukur dan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan di hari pencoblosan. Namun faktor ketokohan para kandidat, terkadang lebih dominan mempengaruhi pemilih, dibandingkan dengan visi, misi, dan program-program.

Kedua, membusuk-busuki lawan politik. Inilah yang berbahaya. Dan saat ini sedang terjadi dan mewarnai langit politik Nusantara. Karena ingin menjatuhkan dan membusuk-

busuki lawan, maka dicarilah kesalahan-kesalahan lawan politiknya, lalu diviralkan, sehingga masyarakat benci dan tidak simpati. Cara-cara inilah yang sedang dipraktikan dalam kampanye politik di republik ini. Bahaya dan harus dihindari. Tetapi tetap terjadi.

Oleh karena itu, jangan aneh dan jangan heran. Jika kampanye hanya disisi oleh nyinyiran, fitnah, kebohongan, dan omong kosong. Kampanye membangun pencitraan, tertutupi oleh awan kegelapan pembusukan terhadap lawan politik. Jadi, faktor kedua, lebih mewarnai dan mendominasi kampanye politik saat ini. Saling memfitnah sudah menjadi kebiasaan. Yang terjadi akhirnya politik tanpa nilai. Dan yang terjadi hanyalah kegaduhan.

Sejatinya para politisi menghindari black campaign, harusnya mulai menciptakan dan mengusung kampanye yang penuh persaudaraan dan persatuan. Bahaya jika hanya gara-gara pemilu, kita bermusuhan dan bercerai berai. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lebih penting dari sekedar urusan pemilu.

Paling tidak, untuk mengatasi persoalan kampanye hitam, saling serang yang tak berujung, dan berdebat yang tak bermartabat. Kita harus mulai membangun kesadaran bersama. Ya, kesadaran bersama. Kesadaran itu harus mulai dan tumbuh di kalangan elit politik. Kalah-menang adalah biasa. Berkompetisi dalam pemilu merupakan kewajiban dalam demokrasi. Yang harus kita jaga adalah persaudaraan.

Pemilu hanya rutinitas lima tahunan. Jangan dijadikan ajang untuk saling mencaci. Membangun kultur politik yang berkeadaban dan berperadaban, jauh lebih penting dari sekedar saling hujat. Kampanye harus diisi dengan hal-hal yang

menyenangkan. Membedah dan memperdebatkan visi, misi, dan program-program terbaik para kontestan, lebih baik dari sekedar saling nyinyir-nyiran.

Kampanye yang substantif merupakan kampanye yang berbobot, penuh dengan ide dan gagasan yang cemerlang dan mencerahkan. Disampaikan dengan cara baik, santun, dan sopan. Diwarnai juga dengan adu dan bedah visi, misi, dan program para kontestan. Visi, misi, dan program bukan hanya menjadi hiasan dan pajangan. Tapi harus menjadi kekuatan yang menggerakkan rakyat agar memilih yang terbaik.

Kampanye adalah salah satu bentuk komunikasi politik. Dan dalam sistem komunikasi politik, sumber utama adalah calon untuk pemilihan bagi jabatan politik, pesannya merupakan serangkaian usul politik, salurannya beruma media televisi, cetak, on line, radio, media sosial, dan lain-lain, pendengarnya adalah anggota kelompok pemilih, dan umpan balik atau responnya adalah persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap usul-usulnya (Rush dan Althoff, 2003: 254).

Visi, misi, dan program jangan hanya di awang-awang dan menara gading, sehingga rakyat sulit untuk meraih dan mendapatkannya. Visi, misi, dan program juga harus aplikatif dan implementatif, agar rakyat merasakan kue pembangunan. Visi, misi, dan program juga jangan hanya dipendam, tapi harus disosialisasikan dan dikampanyekan.

Mumpung masih ada lima bulan setengah lagi untuk berkampanye. Lakukan kampanye yang terbaik. Bangun politik yang berperikemanusiaan. Jalin persaudaraan. Rajut persatuan dan kesatuan. Tumbuhkan dan kembangkan kesopanan dan

kesantunan. Jadikan kampanye sebagai alat untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Bukan memperburuk keadaan.

Mari isi kampanye dengan hal-hal positif, kreatif, inovatif, dan substantif. Jangan jadikan kampanye sebagai alat untuk saling serang dan saling menjatuhkan. Kampanye politik harusnya menyenangkan dan menggembirakan. Bukan membuat ketakutan. Kampanye juga harus berdasarkan fakta. Bukan kebohongan. Mari berkampanye dengan penuh kedamaian. Karena kedamaian itu indah dan menentramkan. Bukankah begitu ?

Planning for Campaigns of Substance

IT is almost two months since the start of the Legislative and Presidential Elections campaign period. Since its start on 23 September, political campaigns have still been rife with unnecessary and bland debates. Political campaigns nowadays are filled with mutual attacks, mutual slinging of catty comments, and efforts to bring down each other. Both sides seek each other's skeletons, drag them out of the closets, and blow up these skeletons up. It's nothing but the political games of rotten elites.

Campaigns should be the means for Presidential, Vice Presidential and Legislative Candidate to offer and showcase the best side of their visions, missions, and programs. Campaigns are more than just showing off the figures of the candidates themselves, but they should be about showcasing their brilliant and enlightening ideas, opinions, and views. This is actually a means for getting honest votes: by touching the masses' sympathy through their conscience, we can get the people to vote according to their full awareness and faith.

Campaigns are events that highly cultured societies look forward to, because this is the chance for the people to find out

what their leaders are going to do in coming years. However, low-cultured societies would use campaigns as a means to attack and defeat each other, to hurt and humiliate each other. Presidential Election campaigns and Legislative Elections campaign should have been the right momentum for the candidates to provide political education to the people and enlighten them. Campaigns should not be filled with controversial comments that cause fights and divisions among our people.

We have yet to see intelligent and educational campaigns. All ideas are still covered by the mist of marginal debates. Our political campaigns are still far from being happy, because they are still haunted by mutual slanders and lies. They are far from being fresh and beautiful, because they are chock-full of catty comments. Campaigns are still filled with snide comments and insults instead of substantial ideas.

There are two vital things that Legislative Election and Presidential Election contestants must do. First, they must build their self-image in the eyes of the public. Presidential, Vice Presidential and Legislative Candidates must build a positive image by organizing elegant, creative, and substantial campaigns. They must showcase their vision, mission, and programs to the voting public. A candidate's vision, mission, and programs should have been basic and true considerations for the people when they decide who to vote for on Voting Day. However, our voters tend to be more affected by the figures of the candidate themselves instead of their vision, mission, and programs.

Second, both the people and campaign teams tend to slander and insult their political opponents. This is very dangerous, and this is exactly what is happening in Nusantara's political scene.

Because they want to destroy their opponents and humiliate them, they seek out the errors made by their political opponents and distribute them through the internet and make them go viral, in order to make the common people hate these opponents and lose sympathy against them.

These are the methods practiced in the political campaigns of this republic. This is extremely dangerous and must be avoided, but it happens nonetheless because of our people's tendency to be easily provoked and get carried away. Therefore, don't wonder too much why our campaigns are filled with nothing but catty comments, slander, hoaxes, and bullshit. Our campaigns try to build up the figures' image not by showcasing their positive side, but more by spreading negative comments about their political opponents. This habit makes our politics nothing but useless babble.

Politicians should avoid this type of black campaign. If they love this country, they should start creating and supporting campaigns filled with messages of brotherhood and unity. It would be extremely dangerous if we become divided and enemies with each other just because of the elections. Maintaining the people's unity and integrity is much more important than just a matter of "who won the elections". Our elites must remember that elections are democratic competitions, and that it is common for anyone to win or lose in any competition.

We must all start to build our mutual awareness of our union and dependence with each other. We must live together with each other before and after the elections are over. We must always remember that elections are routine once-every-5-years

events. We must not turn them into forums for mud-slinging. We need to build a courteous and cultured political scene. This is the most important thing.

Campaigns should be filled with optimistic and well-organized plans for improving the future lives of our citizens. We should simply review and debate the merits and demerits of each Candidate's vision, mission, and programs, instead of being catty with each other. Substantial campaigns are full of brilliant and enlightening ideas, opinions and plans that are explained clearly, properly, and politely.

Vision, mission, and programs should not just be the icing on the cake, the background that shows off the candidate. They must be the basic structure, the bones that hold up the figure of the Candidate. They are the reason why the people should vote for the Candidate, because they show how the Candidate is best equipped to bring stability and prosperity to the people. Vision, mission, and programs should not be airy and difficult to realize for the people. They must be applicable and practical, because the end result is to make the people appreciate the fruits of development that everybody works so hard on. They must not be hidden, but must be defined clearly and distributed widely.

We still have five-and-a-half months' time for campaigns. Let's all do our best campaign – a humane, gentle, solid campaign. We must maintain our brotherhood, our unity and integrity. We must be polite and respectful of each other. Campaigns should serve as an introductory phase to government for a better condition, instead of worsening it. Let us fill in our campaigns with positive, creative, innovative, and substantial issues.

Political campaigns should bring us hope instead of fear, they should be based on truth and not lies. My fellow Indonesians, let us all campaign in peace, because peace is beautiful and is a comfort.

BAB 6

PENUTUP

Penutup

MENGAMATI dan memotret dinamika politik Indonesia memang sangat menarik. Banyak drama, intrik, dan kejadian yang dibuat demi hanya kepentingan politik pragmatis semata. Kejadian-kejadian politik yang terjadi di nusantara ini, tidak terlepas dari aktor-aktor politik yang telah membuat gaduh, berkampnye dengan nyinyiran, dan tidak mencerminkan politik yang adiluhung.

Warna politik Indonesia masih diselimuti oleh kabut asap gelapnya politik yang disebabkan oleh elite-elite yang selalu berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Tidak padu-padannya antara perkataan dan perbuatan membuat langit politik Indonesia dipenuhi dengan politik kemunafikan.

Politik tak ubahnya seperti berain bola dengan tanpa aturan. Atau jika aturan pun ada, dikelabui dan dilanggar. Demi untuk memenangkan pertandingan sepak bola, berlaku curang pun dilakukan. Di dunia politik nusantara juga hampir sama, politik diwarnai oleh kebohongan-kebohongan. Bahkan politisi cenderung bermain politik dengan menghalalkan segala cara. Cara apapun dilakukan, yang penting bisa menang.

Jika politik sudah diisi oleh kecurangan-kecurangan, maka Pemilu pun akan memiliki kadar legitimasi yang rendah. Karena rakyat tak akan percaya pada proses politik dan Pemilu yang dianggap telah terjadi kecurangan-kecurangan. Money politics sudah membudaya. Bukan menjadi rahasia umum lagi. Bagi mereka yang ingin menang, mereka harus menebar uang. Akhirnya Pemilu diisi oleh wajah kecurangan.

Namun apapun yang terjadi dengan kondisi bangsa ini. Kita harus tetap optimis. Kita harus tetap memberikan kontribusi yang terbaik bagi republik yang kita cintai ini. Sekecil apapun kontribusi dan prestasi kita, sangat penting untuk memperbaiki wajah Indonesia. Semoga wajah Indonesia kedepan, diwarnai dengan wajah yang berseri-seri, mencerminkan wajah optimisme, dan mencerminkan wajah bangsa yang penuh kesejahteraan.

Bangsa ini tentu punya harapan, punya visi dan misi, punya program yang harus dijalankan. Dan seandainya harapan-harapan itu tidak sesuai kenyataan, maka kita tetap harus berjuang. Berjuang demi Indonesia yang lebih baik. Berjuang demi Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Dan berjuang demi Indonesia yang jaya dan merdeka. Merdeka lahir dan batin. Dan merdeka secara mental, spritual, dan finansial.

Daftar Pustaka

- Abidin, Yusuf Zainal. (2016). *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Pusata Setia.
- Bakrie, Aburizal. (2012). *Langit Biru, Padi Makin Menguning*. Jakarta: Freedom Institute.
- Bungin, Burhan. (2018). *Komunikasi Politik Pencitraan: The Social Construction of Public Administration (SCoPA). Konstruksi Sosial atas Citra Pemimpin Publik dan Kebijakan-kebijakan Negara dalam Perspektif Postmodern Public Communication and New Public Administration*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Carter, April. (1985). *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chee, Chan Heng. (1994). *Dalam Demokrasi dan Kapitalisme: Perpektif Asia dan Amerika*. Jakarta: CIDES.
- Croissant, Aurel dkk. (2003). *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Dahl, A. Robert. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ghozali, Al. (2016). *Terjemahan Ihya' Ulumuddin*. Bandung: Mizan.
- Haryono, M. Yudhie. (2005). *Melampaui Islam*. Jakarta: Kalam Nusantara.
- Hatta, Mohammad. (2015). *Karya Lengkap Bung Hatta: Buku 4 Keadilan dan Kemakmuran*. Jakarta: LP3ES.
- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-pokok Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismatullah, Deddy. (2009). "Checks and Balances Dalam Mekanisme Pemerintahan Indonesia". *Jurnal Forum Indonesia Bersatu*.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Khoirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komarudin, Ujang. (2016). *Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik*. Jakarta: RM Books.
- (2018). *Menjadi Indonesia: Pikiran-pikiran Politik Seorang Pengamat Indonesia*. Jakarta: PT Pencerah Generasi Antarbangsa.
- Nursyam, Fakchrudin. (2015). *Kumpulan Khotbah dan Kultum Terbaik Sepanjang Masa*. Surakarta: Ziyad Books.
- Rush, Michael & Phillip Althoff. (2003). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salahudin, Asep. (2015). *Dalam Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Jakarta: Kompas.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Soetomo (2006). *Dalam Pidato-pidato yang Mengubah Dunia: Kisah dan Petikan Pidato-pidato yang Bersejarah*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Steinberg, Arnold. (1981). *Kampanye Politik dalam Praktik*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, Isbodroini. (2002). *Dalam Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: AIPI dan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI).
- Tim Majalah Historia. (2018). *Hamka Ulama Serba Bisa dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Jurnal

Agutino, Leo. (2005). *Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: CSIS.

Media

Halal bi Halal, Kamis, 21 Juni 2018, www.akurat.co

Pilkada Rasa Pilpres, Kamis, 28 Juni 2018, www.akurat.co

Mencari Cawapres Ideal, Kamis, 5 Juli 2018, www.akurat.co

Menanti Cawapres Jokowi, Kamis, 12 Juli 2018, www.akurat.co

Rame-rame Jadi Caleg, Kamis, 19 Juli 2018, www.akurat.co

Jokowi versus Prabowo, Kamis, 26 Juli 2018, www.akurat.co

Siapa Cawapres Prabowo, Kamis, 2 Agustus 2018, www.akurat.co

Menebak Isi Kantong Jokowi dan Prabowo, Kamis, 9 Agustus 2018, www.akurat.co

Merdeka atau Mati, Kamis, 16 Agustus 2018, www.akurat.co

Ulama Juga Manusia, Kamis, 18 Agustus 2018, www.akurat.co

Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Kamis, 23 Agustus 2018, www.akurat.co

Untung-Rugi #2019GantiPresiden, Kamis, 30 Agustus 2018, www.akurat.co

Gubernur Dukung Jokowi, Kamis, 6 September 2018, www.akurat.co

Politik Dua Kaki Demokrat, Kamis, 13 September 2018, www.alinea.id

Taktik Demokrat Bermain Dua Kaki, Kamis, 13 September 2018, www.akurat.co

KPU Kena Palu, Rabu, 19 Septemeber 2018, www.monitor.co.id

Berebut Dukungan Ulama, Kamis, 20 September 2018, www.akurat.co

Kampanye Tanpa Hoaks dan SARA, Kamis, 27 September 2018, www.akurat.co

Demokrasi Up and Down, Kamis, 04 Oktober 2018, www.akurat.co

Membidik Amien Rais, Kamis, 11 Oktober 2018, www.akurat.co

Magnet Politik Pesantren, Kamis, 18 Oktober 2018, www.akurat.co

Menggagas Indonesia Hebat, Kamis, 25 Oktober 2018
Koran Harian Terbit (Cetak) dan Harianterbit.com

Refleksi Hari Santri Nasional, Senin, 22 Oktober 2018, www.netralnews.com

Politikus Sontoloyo, Kamis, 25 Oktober 2018, www.akurat.co

Nyinyiran Politik, Kamis, 1 November 2018, www.akurat.co

Masih Adakah Pileg untuk Kita?, Kamis, 8 November 2018, www.akurat.co

Buta dan Budek dalam Politik, Kamis, 15 November 2018, www.akurat.co

Menggagas Kampanye Substantif, Jum'at, 16 November 2018,
Koran Independent Observer

Planning for Campaigns of Substance, Friday, 16 November 2018, Independent Observer Newspaper dan www.observerid.com

Tentang Penulis

Dr. Ujang Komarudin, M.Si adalah Dosen dan Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). Staf Ahli DPR RI tahun 2011-2015. Dan Staf Khusus Ketua DPR RI tahun 2016. Ditetapkan menjadi Doktor Ilmu Politik ke-50 di Universitas Indonesia (UI), di usia sangat muda.

Beliau aktif menulis di berbagai media dan sering menjadi narasumber di beberapa TV Nasional seperti TVRI, Metro TV, TV ONE, Trans7, CNN TV Indonesia, iNews TV, Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Dakta dan lain-lain. Menjadi Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023. Keliling Indonesia dan dunia mengisi seminar dan pelatihan. Kini sedang menikmati menjadi penulis dan pengamat politik.

Beberapa buku yang sudah terbit di antaranya:

1. Dinamika Politik Nasional: Pasang Surut Hubungan Kekuatan Politik di Indonesia;
2. Membangun Indonesia: Sebuah Ikhtiar Membangun Bangsa yang Hampir Tenggelam;
3. Mencintai Indonesia: Catatan dan Harapan Seorang Dosen;
4. Pertarungan Politik di Indonesia: Dinamika Pertarungan Politik dalam Pilkada dan Politik Nasional;
5. Menjadi Indonesia: Pikiran-pikiran Politik Seorang Pengamat Indonesia;
6. Strategi PKS Putihkan Jakarta;
7. Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik;
8. Perspektif Indonesia: Catatan Politik di Tahun Politik;

9. Drama Politik Indonesia: Pikiran-Pikiran Politik Anak Bangsa;
10. Catatan Kaki;
11. Catatan Ujang Komarudin;
12. Demokrasi di Persimpangan: Intrik-intrik Politik di Tahun Politik;
13. Up and Down Politik Indonesia;
14. Memotret Politik Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan;
15. Refleksi Politik Indonesia,

Buku di tangan pembaca ini, merupakan buku referensi, yang lahir dari ucapan, pikiran, dan goresan tangannya.

Beliau bisa dihubungi di alamat email: ujang81@uai.ac.id /ukom.ui@gmail.com atau via WhatsApp di 081-33-782-6674.

